



BUPATI TASIKMALAYA
PROPINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 143 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu penyesuaian klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa Lampiran III Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA KEARSIPAN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal **30 November 2019**

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal **30 November 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR **143**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 143 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA KEARSIPAN

KLASIFIKASI ARSIP DAN INDEX TAUTAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
KP	URUSAN KEPEGAWAIAN
01	Formasi Pegawai 01.01 Usulan dari Perangkat Daerah disertai Analisa Jabatan dan Beban Kerja 01.02 Usulan Permintaan Formasi Kepada MenPAN dan RB dan Kepala BKN 01.03 Persetujuan MenPAN dan RB 01.04 Penetapan Formasi ASN 01.05 Penetapan Formasi Khusus 02 Pengadaan Pegawai 02.01 Aparatur Sipil Negara a. Proses Penerimaan Pegawai 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta 4) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar/Bidang 5) Keputusan Hasil Seleksi 6) Wawancara b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP e. Nota Usul Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Lebih dari 2 Tahun f. SK CPNS/PNS Kolektif g. SK PNS Kolektif h. Usul Surat Izin PNS menjadi Kepala Desa beserta Kelengkapannya i. Surat Izin PNS menjadi Kepala Desa 02.02 Tenaga Ahli Mulai dari Proses Penerimaan sampai dengan Penetapan sebagai Tenaga Ahli Bupati 02.03 Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honor mulai dari Proses Penerimaan sampai dengan Penetapan sebagai Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honor 03 Pembinaan Karir Pegawai 03.01 Diklat/Kursus/Magang /Ujian Dinas /Ijin Belajar Pegawai/Tugas Belajar : Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin Laporan Kegiatan Pengembangan diri. 03.02 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL)/Sertifikat 03.03 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/SKP 03.04 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	03.05 Disiplin Pegawai a. Daftar Hadir b. Rekafitulasi Daftar Hadir 03.06 Berkas Hukuman Disiplin 03.07 Berkas LHKASN/LHKPN 03.08 Penghargaan dan Tanda Jasa 04 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
05	05 Mutasi Pegawai 05.01 Alih Status, Pindahan Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit. 05.02 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 05.03 Mutasi Keluarga, Surat Ijin Pernikahan/Perceraian, Surat Penolakan Ijin Pernikahan/Perceraian, Surat Nikah/Cerai, Akte Kelahiran Anak, Surat Keterangan Adopsi Anak, Surat Keterangan Meninggal Dunia . 05.04 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan 05.05 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional 05.06 Usul penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai 05.07 Peninjauan Masa Kerja 05.08 Berkas Berperjakat 06 Administrasi Pegawai 06.01 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas 06.02 Cuti Besar 06.03 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan 06.04 Cuti Alasan Penting 06.05 Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) 06.06 Dokumentasi Identitas a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/KARIS/KARSU b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 06.07 Berkas Kepegawaian dan daftar Urut Kepangkatan (DUK) 06.08 Berkas Pengurusan Penaikan Gaji Berkala 07 Kesejahteraan Pegawai 07.01 Berkas Tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 07.02 Berkas Tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES 07.03 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>07.04 Berkas Tentang Layanan Bantuan Sosial</p> <p>07.05 Berkas Tentang Layanan Pakaian Dinas</p> <p>07.06 Berkas Tentang Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas</p> <p>07.07 Berkas Tentang Pemberian Tali Kasih</p> <p>07.08 Berkas Tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa</p> <p>07.09 Berkas Tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi</p> <p>08 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun</p> <p>09 Perselisihan/Sengketa Pegawai</p> <p>10 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang meninggal</p> <p>11 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil</p> <p>a. Berkas Lamaran CPNS yang Diterima</p> <p>b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya</p> <p>c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN</p> <p>d. SK Pengangkatan CPNS</p> <p>e. Hasil Pengujian Kesehatan</p> <p>f. SK Pengangkatan PNS</p> <p>g. SK Peninjauan Masa Kerja</p> <p>h. SK Kenaikan Pangkat</p> <p>i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan</p> <p>j. Surat Pernyataan Pelantikan</p> <p>k. SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional</p> <p>l. SK Perpindahan Wilayah Kerja</p> <p>m. SK Perpindahan antar Instansi</p> <p>n. SK Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)</p> <p>o. Berita Acara Pemeriksaan</p> <p>p. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS</p> <p>q. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk</p> <p>r. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan</p> <p>s. SK Pemberian Uang Tunggu</p> <p>t. SK Pembebasan dari jabatan Organik Karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara</p> <p>u. SK Pengalihan PNS</p> <p>v. SK Pemberhentian Sebagai PNS</p> <p>w. SK Pemberhentian Sementara</p> <p>x. Surat Keterangan Pernyataan Hilang</p> <p>y. Surat Keterangan kembalinya PNS Yang Dinyatakan Hilang</p> <p>z. SK Penggantian Nama</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> aa. Surat perbaikan tanggal Tahun Kelahiran bb. Akte Nikah/Cerai cc. Akte Kelahiran Anak dd. Isian Formulir PUPNS ee. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan jabatan ff. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol gg. Surat Keterangan Mutasi Keluarga hh. Surat Keterangan Meninggal dunia/Hilang ii. Surat Keterangan Peningkatan pendidikan jj. Penetapan Angka Kredit Jabatan fungsional kk. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus ll. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala mm. Surat Tugas/Ijin Belajar dalam/Luar Negeri nn. Surat Ijin Bepergian keluar Negeri oo. Kartu Daftar Ulang (Kardap) PNS pp. Ijazah/Sertifikat qq. SK Penempatan/Penarikan Pegawai rr. SK Pengangkatan Pada Jabatan Diluar Instansi Induk ss. Surat Pertimbangan Status PNS tt. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS uu. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatan Organik Karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah vv. SK Pensiun <p>12 Berkas Perseorangan Pejabat Negara Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota</p> <p>13 Berkas Perseorangan Pejabat Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslukada c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya <p>14 Penyelenggaraann Diklat</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Diklat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.01 Perencanaan ; Peserta, Pengajar, penjadwalan 14.02 Penyelenggaraan 14.03 Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat 14.04 Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Bahan Ajar Diklat b. Pengembangan Metodologi Pembelajaran diklat 14.05 Sistem Informasi Diklat

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
15	14.06 Monitoring dan Evaluasi meliputi: a. Penyelenggaraan b. Pasca Diklat 14.07 Alumni Tugas pokok dan fungsi ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi ASN termasuk juga pelaksanaannya.
KD	KEUANGAN DAERAH
01	Anggaran Daerah 01.01 Anggaran Daerah a. Fasilitasi Anggaran Daerah antara lain: Konsultasi, Narasumber, Bimbingan Teknis b. Evaluasi Rancangan Perda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten c. Monitoring 01.02 Dukungan Teknis Anggaran Daerah a. Penyiapan Bahan Perumusan Sinkronisasi Kebijakan Anggaran Daerah b. Penyusunan Tatalaksana Anggaran Daerah c. Penyiapan Dukungan Teknis Anggaran Daerah d. Penyiapan Data, Informasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 02 Pendapatan dan Investasi Daerah 02.01 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah a. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah c. Penyiapan Bahan Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 02.02 Badan Usaha Milik Daerah a. Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan b. Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan non Keuangan c. Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah 02.03 Badan Layanan Umum Daerah a. Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. b. Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis, Prosedur dan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kriteria, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan. c. Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah.

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	02.04 Pengelolaan Kekayaan Daerah a. Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan b. Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah c. Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan dan investasi Daerah. 02.05 Pinjam dan Obligasi Daerah a. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah b. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah c. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBN d. Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir Serta Penyertaan Modal Daerah e. Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah dan Dana Bergulir dan Penyertaan Modal Daerah
03	Fasilitasi Dana Perimbangan 03.01 Fasilitasi Dana Alokasi Umum a. Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum b. Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum c. Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum 03.02 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus a. Koordinasi Penyiapan Data Dasar b. Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus c. Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus 03.03 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam a. Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam b. Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam c. Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam 03.04 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya a. Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus b. Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya 03.05 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan a. Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan b. Penyiapan Dukungan Teknis dana Perimbangan c. Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan 04 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 04.01 Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah a. Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah b. Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 04.02 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah b. Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 04.03 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah b. Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 04.04 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli/pihak ketiga/swa kelola <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah b. Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 04.05 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah b. Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah c. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
KU	KEUANGAN
01	<p>Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01.01 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Umum, Renstra, Prioritas (Dokumen RKPD, Dokumen Rencana Kerja SKPD) b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah c. KUA beserta Nota Kesepakatannya d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) e. Nota Kesepakatan PPA f. Prioritas Plafon Anggaran 01.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD/OPD) <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah b. Dokumen RKA-SKPD/OPD 01.03 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) <ul style="list-style-type: none"> a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah d. Dokumen Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD e. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> f. Penyampaian Permohonan Evaluasi Kepada Gubernur tentang RAPBD beserta Penjabarannya g. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD h. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya i. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD <p>01.04 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang Telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah c. KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya
	<ul style="list-style-type: none"> d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan e. Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan f. Prioritas Plafon Anggaran Perubahan <p>01.05 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah b. Dokumen RKA-SKPD/OPD Perubahan <p>01.06 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan : Nota Keuangan Pemerintah dan Materi RAPBD b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Dokumen Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya e. Penyampaian Pemohonan Evaluasi Kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya f. Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya g. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan
02	<p>Penyusunan Anggaran</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Anggaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02.01 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 02.02 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 02.03 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 02.04 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 02.05 Standar Satuan Harga Barang Daerah (SSHBD) <p>03 Pelaksanaan Anggaran</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03.01 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D) : UP, GU, TU, LS 03.02 Pendapatan <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> d. Surat Setoran Bukan Pajak e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah g. Dokumen Piutang Daerah h. Dokumen Pengelolaan Investasi <p>03.03 Belanja</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Belanja mulai dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung termasuk didalamnya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Subsidi, Bunga, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak</p>
	<p>Terdiri atas</p>
	<p>03.04 Pembiayaan Daerah</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembiayaan Daerah meliputi Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan mulai dari SILPA, Dana Cadangan, Dana Bergulir, Pinjaman Daerah, Pengalihan Piutang, PBBP2 menjadi PAD, Investasi Jangka Panjang dalam Bentuk Dana Bergulir, Penyertaan Modal Pada BUMD, Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD, Pengeluaran dari Dana Cadangan, Pembiayaan Bagi UKM, Penvertaan Modal Kepada BPR Milik Pemerintah Daerah.</p>
	<p>03.05 Dokumen Penatausahaan Keuangan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Penatausahaan Keuangan mulai dari Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p>
	<p>03.06 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Dana termasuk di dalamnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Kas Umum (BKU) b. Buku Kas Pembantu (BKP) c. Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek d. Rekening Koran Bank e. Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi f. Bukti Penyetoran Pajak g. Register Penutupan Kas h. Berita Acara Pemeriksaan i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Arsip Data Komputer (ADK) j. Laporan Pendapatan Negara k. Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran
	<p>03.07 Daftar Gaji</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Gaji</p>
	<p>03.08 Kartu Gaji</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kartu Gaji</p>
	<p>03.09 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>03.10 Pertanggungjawaban APBD Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban APBD termasuk di dalamnya :</p> <p>03.11 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Tahunan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).</p> <p>04 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bantuan/Pinjaman Luar Negeri meliputi:</p> <p>04.01 Dokumen Permohonan Pinjaman Hibah Luar Negeri (Blue Book)</p> <p>04.02 Dokumen Kemampuan Negara Donor Untuk membiayai (Green Book)</p> <p>04.03 Dokumen Memorandum Of understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya</p> <p>04.04 Dokumen Loan Agreement (PHLN) Seperti : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender</p> <p>04.05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l : Usulan Luncuran Dana</p> <p>04.06 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Aplikasi Penarikan Dana BLN meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reimbursement b. Direct Payment/Transfer Procedure c. Special Commitmen/ L/C Opening d. Special Account/Imprest Fund <p>04.07 Dokumen Otorisasi penarikan Dana (Payment Advice)</p> <p>04.08 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM, beserta lampirannya, a.l : SPP, Kontrak,</p> <p>04.09 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)</p> <p>04.10 Staff Appraisal Report</p> <p>04.11 Report/Laporan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Progrees Report b. Monthly Report c. Quarterly Report <p>04.12 Laporan Hutang Daerah terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pembayaran Hutang Daerah b. Laporan Posisi Hutang Daerah <p>04.13 Completion Report/Annual Report</p> <p>04.14 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri</p> <p>05 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)</p> <p>05.01 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuasa Pengguna Anggaran

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
06	<ul style="list-style-type: none"> b. Kuasa Barang atau Jasa c. Pejabat Pembuat Komitmen d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji e. Pejabat Penandatanganan SPM f. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran g. Pengelola Barang h. Berita Acara Serah Terima Jabatan <p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</p>
07	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah/SAKD meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06.01 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 06.02 Kebijakan Akuntansi 06.03 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 06.04 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran <p>Penyeluran Anggaran Tugas Pembantuan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07.01 Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna, Bendahara atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Specimen Tanda Tangan 07.02 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya mulai dari SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftra Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS SPDR-L SPM-LS, SPM- 07.03 Buku Rekening Bank 07.04 Keputusan Pembukuan Rekening 07.05 Pembukuan Anggaran terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Kas Umum (BKU) b. Buku Pembantu c. Register dan Buku Tambahan d. Daftar Pembukuan selama Rekening Masih Aktif e. Pencairan/Pengeluaran (DPP) f. Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP) g. Daftar Himpunan Pencairan (DHP) h. Rekening Koran <p>08 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08.01 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau pengeluaran lainnya 08.02 Berkas Penerimaan Pajak Termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan <p>09 Pengelolaan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09.01 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda, Provinsi, PPK, PPS, KPPS, dan Permohonan pengajuan RKA KPUD dan Panwas d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan bantuan Pemilu e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD g. Berkas Pembemntukan Dana Cadangan Pilkada h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pilkada, dan bantuan Pemilu dari APBD i. Nota Persetujuan APBD Tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
10	<p>Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.01 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu Bendahara pada 10.02 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu 10.03 Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/ Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro 10.04 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 10.05 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
11	<p>Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.01 Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Kabupaten termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya 11.02 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 11.03 Berkas penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
12	<p>Pemerintahan Desa</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12.01 Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 12.02 Program Kerja Pemerintah Desa Meliputi : Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Perangkat Desa 12.03 Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 12.04 Bukti Pungutan Desa 12.05 Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa b. Permohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa c. Hasil Persetujuan /Rapat d. Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah e. Persetujuan Bupati tentang Hasil Musyawarah Harga Tanah Kas Desa f. Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa g. Pembelian Tanah Pengganti h. Musyawarah Tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi Pengganti i. Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
12.06	<p>Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sewa Tanah Kas Desa Tidak Berubah Fungsi b. Sewa Tanah Kas Desa Berubah Fungsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Kas Desa 2) Penawaran dari Penyewa 3) Rekomendasi Bupati tentang Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa 4) Permohonan Ijin Gubernur 5) Ijin Gubernur <p>12.07 Dokumen Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Meliputi : Peraturan Desa tentang Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa, Rekomendasi Bupati tentang</p> <p>12.08 Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong</p> <p>12.09 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Desa yang Berasal dari APBN</p> <p>12.10 Lain-lain Pendapatan Asli Desa</p> <p>12.11 Pembukuan Kas Desa meliputi : Buku Kas Umum (BKU), dan Buku Bantu Pengeluaran.</p> <p>12.12 Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa</p> <p>12.13 Laporan Keuangan Kas Desa</p> <p>12.14 Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa)</p> <p>13 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah meliputi:</p> <p>13.01 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan</p> <p>13.02 Hasil Pengawasan dan pemeriksaan Internal</p> <p>13.03 Laporan Aparat Pemeriksaan Fungsional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP <p>13.04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi
PT	URUSAN PERTANIAN
01	<p>Kebijakan</p> <p>Naskah-naskah kebijakan di Bidang Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang di dalamnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 01.01 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 01.02 Penyiapan Bahan 01.03 Perumusan Kebijakan 01.04 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 01.05 Penetapan Berbentuk NSPK 01.06 Perencanaan Umum, Program, Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian dan Monitoring

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
02	<p>Perkebunan</p> <p>02.01 Tanaman Semusim Naskah-naskah yang berkaitan dengan Identifikasi, Pendayagunaan, Penyiapan Perbenihan, Bimbingan Peredaran Benih, Penyiapan dan Penerapan Teknologi</p> <p>02.02 Tanaman rempah dan penyegar Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanaman Rempah dan Penyegar termasuk didalamnya Pendayagunaan Penyiapan Benih, Identifikasi dan</p> <p>02.03 Tanaman Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanaman Tahunan termasuk di dalamnya Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman, Penyiapan Perbenihan, Bimbingan Peredaran Benih, Penyiapan dan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman, Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan.</p>
03	<p>02.04 Perlindungan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Perkebunan Besar Swasta/Nasional (PBS/N) dan Perkebunan Rakyat yang meliputi Tanaman Semusim,</p> <p>02.05 Pascapanen dan Pembinaan Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perkebunan, Tanaman Semusim, Tanaman Rempah dan Penyegar, Tanaman Tahunan termasuk di dalamnya Teknologi</p> <p>Hortikultura</p> <p>03.01 Perlindungan Hortikultura Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Tanaman Hortikultura, Tanaman Buah, Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat meliputi di dalamnya</p> <p>03.02 Perbenihan Hortikultura</p> <p>a. Penilaian Varietas Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Varietas termasuk di dalamnya Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Bahan Penyusunan Kebijakan, Bahan Pelaksanaan Teknis, Bahan NSPK(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), Bahan Pemberian Bimbingan Teknis, Bahan Evaluasi, Bahan Kedinasan Lain, Bahan Penyusunan dan Penyajian Laporan Kegiatan serta Pertanggungjawaban Keuangan, dan Pemeliharaan Dokumen Seksi Penilaian Varietas.</p> <p>b. Pengawasan Mutu Benih Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Varietas termasuk di dalamnya Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Bahan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Bahan Pelaksanaan Teknis, Bahan NSPK(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), Bahan Pemberian Bimbingan Teknis, Bahan Evaluasi, Bahan Kedinasan Lain Berdasarkan Penugasan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis sesuai Bidang Tugas.</p> <p>c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura Naskah-naskah yang berkaitan dengan Budidaya dan Pascapanen Florikultura meliputi Laporan Kegiatan Budidaya dan Pascapanen Tanaman Daun, Tanaman Bunga Potong, Tanaman Pot, Tanaman Lanskap.</p> <p>04 Prasarana dan Sarana Pertanian</p> <p>04.01 Perluasan dan Pengelolaan Lahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perluasan dan pengelolaan lahan yang di dalamnya meliputi :</p> <p>a. Identifikasi Lahan untuk Basis Data Lahan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Analisis dan Penyajian Data Lahan c. Identifikasi dan Analisis Lahan d. Rekomendasi Teknis Pengendalian Lahan e. Identifikasi dan Analisis Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan f. Bimbingan Teknis Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan g. Identifikasi dan Analisis Perluasan Kawasan Tanaman Pangan h. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perluasan Kawasan Tanaman Pangan i. Identifikasi dan Analisis Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan j. Identifikasi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) k. Bimbingan Teknis dan evaluasi Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan <p>04.02 Pengelolaan Air Irigasi</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Irigasi mulai dari Pengembangan Sumber Air Permukaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pengembangan Jaringan, Optimasi Air, Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, Identifikasi dan Pengembangan Kelembagaan.</p> <p>04.03 Pembiayaan Pertanian</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembiayaan Pertanian termasuk di dalamnya Data dan Informasi Pembiayaan Program, Pendampingan</p> <p>04.04 Pupuk Pestisida</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pupuk Pestisida mulai dari Pupuk Organik Pembenh Tanah Tanaman Pangan, Pupuk Organik</p> <p>04.05 Alat dan Mesin Pertanian</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Alat dan Mesin Pertanian yang di dalamnya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan c. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura d. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Perkebunan dan Peternakan e. Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian f. Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian <p>05 Tanaman Pangan</p> <p>05.01 Perbenihan Tanaman Pangan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembenh Tanaman Pangan yang di dalamnya meliputi Penilaian Varietas, Produksi Benih (Sereal Padi dan Non Padi, Aneka Kacang dan Umbi), Kelembagaan Produksi serta Kelembagaan Pengawasan.</p> <p>05.02 Budidaya Sereal</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan budidaya padi mulai dari padi irigasi, rawa, padi sawah, padi lahan kering, intensifikasi dan pengembangan jagung.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>05.03 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi yang di dalamnya meliputi Intensifikasi dan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi.</p> <p>05.04 Saran dan Prasarana Pendukung Tanaman Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendukung Tanaman Pangan seperti UPPO.</p> <p>05.05 Perlindungan Tanaman Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Tanaman Pangan yang di dalamnya meliputi Kegiatan Monitoring, Analisis, Evaluasi, dan</p> <p>05.06 Pascapanen Tanaman Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Teknologi dan Sarana Pascapanen Padi, Jagung, Aneka Kacang, dan Aneka Umbi</p>
06	<p>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian</p> <p>06.01 Pengolahan Hasil Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengolahan Hasil Pertanian termasuk di dalamnya Tanaman Pangan Serealia, Tanaman Pangan Aneka Kacang dan Umbi, Tanaman Buah dan Sayur, Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat, Tanaman Semusim, Tanaman Tahunan, Peternakan Ruminansia dan Non Ruminansia.</p> <p>06.02 Mutu dan Standardisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Mutu dan Standarisasi yang di dalamnya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Standardisasi Perkebunan dan Peternakan c. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura d. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Perkebunan dan Peternakan e. Akreditasi dan Kelembagaa Tanaman Pangan dan Hortikultura f. Akreditasi dan Kelembagaa Perkebunan dan Peternakan g. Kerjasama dan Harmonisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura h. Kerjasama dan Harmonisasi Perkebunan dan Peternakan <p>06.03 Pengembangan Usaha dan Investasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha yang meliputi Kemitraan, Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, Investasi Tanaman</p> <p>06.04 Pemasaran Domestik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan Analisis dan Desiminasi Informasi Pasar, Pemantauan Pasar, Stabilisasi Harga, Sarana Pasar</p> <p>07 Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Pertanian</p> <p>07.01 Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR, Pembentukan Tim Kerja dan Surat Menyurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Administrasi yang di dalamnya meliputi Rencana Kerja, TOR, Pembentukan Tim Kerja dan Surat</p> <p>07.02 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil Penelitian dan Pengembangan, Hasil Pengkajian dan Kebijakan Strategi</p> <p>07.03 Diseminasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Diseminisasi</p> <p>07.04 Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian yang di dalamnya meliputi Kegiatan Pameran, Temu Lapangan, Temu</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>07.05 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>07.06 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan</p> <p>07.07 Data Penelitian dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Penelitian dan Pengembangan</p> <p>07.08 Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan</p>
08	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hak Cipta, Hak Paten Sederhana, Hak Paten Biasa, Hak Merek, Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan
09	Ketahanan Pangan
	09.01 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan meliputi Analisis Ketersediaan Pangan, Analisis dan Pengembangan Akses Pangan, Analisis Kerawanan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.
	09.02 Distribusi dan Cadangan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Distribusi dan Cadangan Pangan yang meliputi di dalamnya Analisis dan Kelembagaan Distribusi
	09.03 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan meliputi Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan,
	09.04 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kelembagaan Ketahanan Pangan yang meliputi Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan, Dewan
10	Karantina Pertanian
	10.01 Data Karantina Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Karantina Hewan dan Tumbuhan yang di dalamnya meliputi Data Penyakit, Teknik dan Metoda,
	10.02 Inventarisasi Penyakit Naskah-naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi Penyakit Hewan dan Tumbuhan yang di dalamnya meliputi Survei, Determinasi
	10.03 Tindakan Karantina Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan yang di dalamnya meliputi Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, dan Pembebasan.
	10.04 Sertifikasi Pelepasan Karantina Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
	10.05 Pemberantasan Penyakit
	a. Pemberantasan Penyakit Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberantasan Penyakit Hewan meliputi Penutupan Satu Daerah, Pemberantasan Gerakan HPHK,
	b. Pemberantasan Penyakit Tumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberantasan Penyakit Hewan meliputi Penutupan Satu Daerah, Pemberantasan Gerakan
	HPHKOPTK, dan Pembinaan OPTK.

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
10.06	Keamanan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan) dan Pengawasan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)
10.07	Tertib Operasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tertib Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan yang di dalamnya meliputi Penelitian Data Laporan Operasional, Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS).
11	Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
11.01	Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman yang meliputi Permohonan dan Pengujian Perlindungan
11.02	Pelayanan Perijinan Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Pertanian yang di dalam nya meliputi Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat dan
11.03	Pelayanan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hukum yang meliputi Sertifikasi dan Pertimbangan Hukum
12	Bimbingan Teknis
13	Evaluasi
14	Peternakan dan Kesehatan Hewan
14.01	Perbibitan Ternak
	a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembibitan Ternak yang di dalamnya meliputi Produksi Bibit Ternak Ruminisia Besar dan Kecil, Produk
	b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Kawasan Budidaya Ternak/Cluster.
14.02	Pakan Ternak Naskah-naskah yang berkaitan dengan pakan ternak yang di dalamnya meliputi bahan pakan asal hewan dan tumbuhan, budidaya pakan
14.03	Budidaya Ternak
	a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Budidaya Ternak yang di dalamnya meliputi Ternak Potong, Ternak Perah, Ternak Unggas, Aneka Ternak
	b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan inseminasi buatan.
14.04	Kesehatan Hewan
	a. Pengamatan Penyakit Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Hewan yang meliputi Epidemiologi dan Veteriner, dan Penyidikan Penyakit Hewan.
	b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan yang di dalamnya meliputi Pencegahan Penyakit
	c. Perlindungan Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Hewan yang meliputi Analisis Resiko Eksotik, dan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan.
	d. Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kelembagaan Kesehatan Hewan, Sumber Daya Kesehatan Hewan, Laporan THL, Proposal Puskesmas,
	e. Pengawasan Obat Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Obat yang meliputi Mutu Obat Hewan, Peredaran Obat Hewan, Pendaftaran Obat Hewan,
	f. Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>14.05 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen yang di dalamnya meliputi Teknologi dan Sarana</p> <p>14.06 Data unit pengolahan hasil peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Unit Pengolahan Hasil Peternakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data Unit Olahan Hasil Peternakan b. Profil Unit Pengolahan Hasil Peternakan c. Informasi Harga Komoditas Peternakan di Tingkat Produsen, Grosir dan Konsumen Harian dan Bulanan.
15	<p>14.07 Data Pengeluaran dan Pemasukan Ternak di Pasar Hewan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Pengeluaran dan Pemasukan Ternak di Pasar Hewan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data Pemeriksaan dan Pematangan Hewan Qurban b. Data Jumlah Pematangan Hewan dan Produksi Daging di Rumah Pematangan Hewan (RPH) c. Data Jumlah Pematangan Unggas di Kabupaten Tasikmalaya <p>Karantina Peternakan</p> <p>15.01 Data Karantina Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Karantina Hewan yang meliputi Data Penyakit Hewan, Teknik dan Metode, Data Kualitatif dan Kuantitatif, Laporan, Data Sarana/Laboratorium/Lokasi.</p> <p>15.02 Inventarisasi Penyakit Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi Penyakit Hewan yang di dalamnya meliputi Survei, Determinasi Penyakit/Daerah Pencar/Pengamatan Penyakit di Paboratorium/Kandang Uji Diagnosa</p> <p>15.03 Tindakan Karantina Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindakan Karantina Hewan yang meliputi Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan.</p> <p>15.04 Sertifikasi Pelepasan Karantina Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan</p> <p>15.05 Pemberantasan Penyakit Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberantasan Penyakit Hewan yang di dalamnya meliputi Penutupan Satu Daerah, Pemberantasan Gerak HPHK, dan Pembinaan HPHK.</p> <p>15.06 Keamanan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan)</p> <p>15.07 Tertib Operasional Karantina Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tertib Operasional Karantina Hewan yang meliputi Laporan Operasional dan Ketertiban (PPNS)</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
16	<p>Perlindungan dan Perizinan Peternakan</p> <p>16.01 Pelayanan Perijinan Peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Peternakan yang di dalamnya meliputi Bidang Bibit, Karkas, Daging dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik.</p> <p>16.02 Pelayanan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hukum yang meliputi Setifikasi dan Pertimbangan Hukum.</p>
17	<p>Laporan Statistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan.</p>
LH	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
01	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan</p> <p>01.01 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan: a. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah b. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor c. Kajian Dampak Lingkungan d. Pengembangan Perangkat Kebijakan</p> <p>01.02 Penyiapan Bahan</p> <p>01.03 Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan</p> <p>01.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data</p> <p>01.05 Penetapan dalam bentuk NSPK</p>
02	<p>Tata Lingkungan</p> <p>02.01 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mulai dari Dokumentasi</p> <p>02.02 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor mulai dari Evaluasi Penerapan, dan Perencanaan Lingkungan</p> <p>02.03 Ekonomi Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Evaluasi Ekonomi dan Internalisasi Lingkungan, Intensif dan Pendanaan Lingkungan.</p> <p>02.04 Dampak Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dampak Lingkungan meliputi Bimtek Dampak Lingkungan, Penerapan Sistem Kajian Dampak</p>
03	<p>Pengendalian Pencemaran Lingkungan</p> <p>03.01 Pemantauan dan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan Pengawasan meliputi: a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa 1) Industri Kimia 2) Industri Logam, Elektronika dan Mesin</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Aneka Industri 4) Prasarana dan Jasa b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil <ul style="list-style-type: none"> 1) Peternakan dan Perikanan 2) Perkebunan 3) Kehutanan dan Holtikultura 4) Usaha Skala Kecil d. Udara Sumber Bergerak <ul style="list-style-type: none"> 1) Transportasi Air dan Udara 2) Transportasi Darat 3) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat <p>03.02 Evaluasi dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Evaluasi dan Pengembangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Kimia 2) Industri Logam, Elektronika dan Mesin 3) Aneka Industri 4) Prasarana dan Jasa b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil <ul style="list-style-type: none"> 1) Peternakan dan Perikanan 2) Perkebunan 3) Kehutanan dan Holtikultura 4) Usaha Skala Kecil d. Udara Sumber Bergerak <ul style="list-style-type: none"> 1) Transportasi Air dan Udara 2) Transportasi Darat 3) Laporan Implementasi Kajian Dampak Lingkungan <p>04 Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim</p> <p>04.01 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Genetik 2) Keamanan Hayati b. Pemanfaatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Genetik

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan dan Pemanfaatan 2) Pemantauan dan Pengawasan d. Keamanan Hayati <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan dan Pengelolaan 2) Pemantauan dan Pengawasan e. Pengendalian Kerusakan Lahan <ul style="list-style-type: none"> 1) Lahan Budidaya 2) Lahan Non Budidaya <p>04.02 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat (Kerusakan Sungai, Ekosistem, dan Pengelolaan Kualitas Air),</p> <p>04.03 Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengendalian Kerusakan Pesisir Pantai mulai dari Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan.</p> <p>04.04 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perangkat Mitigasi, Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Data Bidang Inventarisasi</p> <p>04.05 Adaptasi Perubahan Iklim Naskah-naskah yang berkaitan dengan Adaptasi Perubahan Iklim meliputi kegiatan Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim,</p> <p>05 Pengelolaan B3, Limbah, Dan Sampah</p> <p>05.01 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi Reregistrasi dan Notifikasi, Pemantauan Sektor</p> <p>05.02 Verifikasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Naskah-naskah yang berkaitan dengan Verifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mulai dari Pengumpulan dan Pemanfaatan,</p> <p>05.03 Pengolahan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengolahan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 meliputi Pemantauan dan Pemulihan Kontaminasi (Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas, Manufaktur, Agroindustri, Prasarana, Jasa, Non Institusi)</p> <p>05.04 Pengelolaan Sampah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah meliputi Pembatasan Sampah, Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah,</p> <p>06 Hukum Lingkungan</p> <p>06.01 Hukum Administrasi Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan Pengaduan 2) Pengembangan Pengaduan b. Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penerapan Hukum Administrasi Lingkungan 2) Pengembangan Hukum Administrasi Lingkungan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>06.02 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Lingkungan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> 1) Administrasi Gugatan 2) Gugatan b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerugian Negara dan Masyarakat 2) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	<p>06.03 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan termasuk di dalamnya Administrasi Penyidikan dan Pelaksanaan</p>
	<p>06.04 Perjanjian Internasional Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional, Tindak Lanjut Perjanjian Internasional,</p>
07	<p>Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>
	<p>07.01 Komunikasi Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Komunikasi Lingkungan mulai dari Pengembangan Program dan Evaluasi Komunikasi, Publikasi dan</p>
	<p>07.02 Penguatan Inisiatif Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Komunitas Pendidikan Lingkungan dan Kearifan Lingkungan mulai dari Pengembangan dan</p>
	<p>07.03 Peningkatan Peran Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Peran Masyarakat Perkotaan dan Perdesaan mulai dari Masyarakat Kawasan Permukiman</p>
	<p>07.04 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Peran Organisasi Sosial dan Masyarakat, Organisasi Profesi dan Dunia Usaha.</p>
08	<p>Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas</p>
	<p>08.01 Data dan Informasi lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Data <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan dan Pengelolaan Data 2) Manajemen Basis Data
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengelolaan Informasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis Data dan Penyajian Informasi 2) Perpustakaan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengembangan Perangkat Lunak <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi 2) Pengembangan Instrumen Analisis Data
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Sistem Jaringan 2) Pemeliharaan Jaringan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
<p>08.02 Kelembagaan Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kelembagaan Lingkungan meliputi Pengembangan Kelembagaan dan Tatalaksana, Fasilitasi Standar</p> <p>08.03 Standarisasi dan Teknologi Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Manajemen Lingkungan 2) Pengujian Lingkungan b. Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi Keahlian Lingkungan 2) Kompetensi Penyedia Jasa Lingkungan c. Teknologi Ramah Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan 2) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan <p>08.04 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan termasuk di dalamnya Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan, Laboratorium Rujukan serta Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.</p> <p>09 Laporan Statistik Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.</p>	
KI	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<p>01 Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika meliputi:</p> <p>01.01 Kebijakan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumus kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyuluhan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK <p>01.02 Standardisasi perangkat pos dan informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teknik pos dan telekomunikasi b. Teknik komunikasi radio c. Penerapan standar pos dan telekomunikasi d. Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar e. Standar dan audit perangkat lunak <p>02 Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Naskah-naskah yang berkaitan dengan sumber daya dan perangkat pos dan informatika meliputi:</p>	

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>02.01 Penataan sumber daya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi dinas tetap 2) Alokasi dinas bergerak darat b. Alokasi spektrum non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi dinas penyiaran 2) Alokasi dinas penerbangan dan satelit c. Ekonomi sumber daya <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisa industri dan ekonomi 2) Penanganan izin pita <p>02.02 Operasi sumber daya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan dinas tetap 2) Pelayanan dinas bergerak darat b. Pelayanan spektrum non dinas <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan dinas penyiaran 2) Pelayanan dinas penerbangan dan satelit c. Sertifikasi operator radio <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk 2) Pelayanan operator radio d. Penanganan biaya <ul style="list-style-type: none"> 1) Penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio 2) Analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio e. Konsultasi dan data operasi sumber daya <ul style="list-style-type: none"> 1) Konsultasi dan informasi sumber daya 2) Pengelolaan data operasi sumber daya <p>03 Penyelenggaraan Informatika</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Informatika meliputi:</p> <p>03.01 Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan jaringan telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Akses 2) Backbone b. Layanan jasa telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Jasa teleponi dasar, Nilai tambah teleponi, sisten dan transaksi elektronik 2) Jasa multimedia c. Penomoran telekomunikasi dan informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Penomoran telekomunikasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Penomoran inomatika d. Tarif dan interkoneksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Tarif telekomunikasi 2) Interkoneksi telekomunikasi e. Kelayakan sistem telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelayakan sistem jaringan dan jasa 2) Penerapan teknologi telekomunikasi .03.02 Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan dan database <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi 2) database penyelenggaraan radio dan televisi b. Verifikasi dan Uji Coba Siaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Verifikasi dan Penyiaran Radio 2) Verifikasi dan Penyiaran Televisi c. Radio <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Peyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio 2) Lembaga Penyiaran Swasta Radio d. Televisi <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penyiaran Komunitas,Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi 2) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi e. Iklim Usaha Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyusun dan Evaluasi Regulasi Penyiaran 2) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran 03.03 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal <ul style="list-style-type: none"> a. Telekomunikasi khusus pemetrintah <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisa Penyelenggaraan 2) Pelayanan b. Telekomunikasi khusus non pemerintah <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisa Penyelenggaraan 2) Pelayanan c. Layanan Khusus Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Publik Radio 2) Publik Televisi d. Pelayanan kewajiban universal <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pembangunan 2) Monitoring dan evaluasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> e. Pengembangan Infrastruktur SKPD <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Infrastruktur 2) Analisa Ekonomis Imfrastruktur 03.04 Pengendalian informatika <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoring 2) Evaluasi b. Monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoring 2) Evaluasi c. Monitoring dan evaluasi penyiaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoring 2) Evaluasi d. Pencegahan dan penerbitan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pencegahan 2) Penerbitan 04 Aplikasi Informatika <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Aplikasi Informatika meliputi:</p> 04.01 e-Government <ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola e-Government <ul style="list-style-type: none"> 1) Program e-Government 2) Evaluasi e-Government b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknologi e-Government 2) Infrastruktur e-Government c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government <ul style="list-style-type: none"> 1) Interoperabilitas e-Government 2) Interkonektivitas e-Government d. Aplikasi Layanan Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah e. Aplikasi Layanan Publik <ul style="list-style-type: none"> 1) Inisiasi Aplikasi Layanan Publik 2) Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik 04.02 e-Business <ul style="list-style-type: none"> a. Tata kelola e-Business <ul style="list-style-type: none"> 1) Program e-Business 2) Evluasi e-Business

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
07	Laporan Statistik Komunikasi dan Informatika Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik Komunikasi dan Informatika meliputi: Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
MD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
01	<p>Pemerintahan Desa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa meliputi:</p> <p>01.01 Fasilitasi pengembangan desa yang mencakup pelaksanaan pengembangan desa</p> <p>01.02 Administrasi pemerintahan desa mencakup pembinaan administrasi pemerintahan desa.</p> <p>01.03 Fasilitasi pemusyawaratan desa mencakup pelaksanaan penataan kelembagaan dan kewenangan badan pemusyawaratan desa.</p> <p>01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mencakup pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pengelolaan aset desa</p> <p>01.06 Pengembangan Kapasitas Desa mencakup pelaksanaan pengembangan kapasitas Desa dan Badan Permusyawaratan Desa</p> <p>02 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat meliputi:</p> <p>02.01 Lembaga Masyarakat yang mencakup di dalamnya pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa serta pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat.</p> <p>02.02 Pembangunan Partisipatif yang mencakup di dalamnya pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif serta pelaporan kinerja pembangunan desa.</p> <p>02.03 Pendataan Potensi Masyarakat yang mencakup di dalamnya inventarisasi potensi masyarakat, profil desa, serta evaluasi perkembangan masyarakat.</p> <p>02.04 Pengembangan Kawasan Desa yang mencakup di dalamnya pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan desa serta</p> <p>02.05 Pelatihan Masyarakat yang mencakup di dalamnya:</p> <p>a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat yang mencakup Grand Design Pelatihan Masyarakat, Pedoman pelatihan masyarakat, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>b. Evaluasi Pelatihan Masyarakat yang mencakup Penyelenggaraan pelatihan, Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>03 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:</p> <p>03.01 Budaya Nusantara</p> <p>a. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>b. Pelaksanaan Kerjasama Adat Istiadat</p> <p>03.02 Pemberdayaan Perempuan</p> <p>a. Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>b. Pembinaan, Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Ketidaksetaraan Gender</p> <p>03.03 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>a. Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga</p> <p>b. Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
05.03 05.04 06	Pengelolaan Media Publik a. Media Cetak b. Media Online c. Media Luar Ruang dan Audio Visual 05.04 Kemitraan Komunikasi a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara 1) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara 2) Monitoring dan Evaluasi b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha 1) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha 2) Monitoring dan Evaluasi c. Kemitraan Organisasi Masyarakat dan Profesi 1) Program Kemitraan Organisasi dan Lembaga Negara 2) Monitoring dan Evaluasi 06 Pusat Data dan Sarana Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pusat Data dan Sarana Informasi meliputi: 06.01 Infrastruktur Informatika a. Jaringan b. Piranti Teknologi Informatika c. Keamanan Informatika 06.02 Sistem dan Data a. Portal dan Konten b. Pengumpulan dan Pengolahan Data c. Pengembangan Aplikasi 06.03 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat a. Pelayanan Informasi 1) Media Baru 2) Media Konvensional 3) Dokumentasi dan Perpustakaan b. Hubungan Masyarakat 1) Publikasi 2) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik 3) Hubungan Internal dan Eksternal c. Bimbingan Teknis Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
05	<p>1) Kelembagaan 2) Manajemen Resiko</p> <p>b. Teknologi Keamanan Informasi 1) Infrastruktur 2) Aplikasi</p> <p>c. Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan Darurat Keamanan Informasi 1) Infrastruktur e-Busniess 2) Aplikasi</p> <p>d. Penyidikan dan penindakan 1) Monitoring dan evaluasi keamanan informasi 2) Tanggapan darurat peristiwa keamanan informasi</p> <p>e. Budaya Keamanan Informasi 1) Penyidikan 2) Penindakan</p> <p>Informasi dan Komunikasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi:</p> <p>05.01 Komunikasi Publik a. Tata Kelola Komunikasi Publik 1) Program Komunikasi Publik 2) Monitoring dan Evaluasi b. Pengolahan Opini Publik 1) Pengumpulan Opini Publik 2) Pengolahan Opini Publik c. Layanan Komunikasi Publik 1) Pengumpulan Data 2) Pengolahan Data</p> <p>05.02 Pengolahan dan Penyediaan Informasi a. Informasi Politik, Hukum dan Keamanan 1) Politik dan Keamanan 2) Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Informasi Perekonomian 1) Keuangan, Perbankan, dan Jasa 2) Industri dan Perdagangan c. Informasi Kesejahteraan Rakyat 1) Agama, Sosial, dan Budaya 2) Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Teknologi dan infrastruktur e-business <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknologi e-Business 2) Infrastruktur e-Business c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business <ul style="list-style-type: none"> 1) Interoperabilitas e-Business 2) Interkonektivitas e-Business d. Aplikasi Layanan e-Business <ul style="list-style-type: none"> 1) Bidang usaha kecil dan mikro 2) Bidang usaha menengah dan besar <p>04.03 Pemberdayaan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan model 2) Penerapan model b. Pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan model 2) Penerapan model c. Pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan model 2) Penerapan model d. Pemberdayaan informatika masyarakat khusus <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan model 2) Penerapan model <p>04.04 Pemberdayaan Industri Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Perberdayaan 2) Promosi b. Industri perangkat informatika pengguna <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan 2) Pengembangan produk c. Industri Perangkat Lunak <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan 2) Pengembangan Produk d. Industri konten Multimedia <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan 2) Pengembangan Produk <p>04.05 Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola Informasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>03.04 Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial b. Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial <p>03.04 Tenaga Kerja Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan Evaluasi Pembinaan Tenaga Kerja b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja <p>Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Masyarakat meliputi:</p> <p>04.01 Usaha Pertanian dan Pangan</p>
	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan lumbung pangan meliputi Identifikasi</p> <p>04.02 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro yang Belum Berbadan Hukum 2) Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Desa 3) Inventarisasi Badan Usaha Milik Desa 4) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 5) Fasilitasi Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan 6) Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan 2) Monitoring dan Evaluasi <p>04.03 Produksi dan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pengembangan Informasi Pasar <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan informasi pasar meliputi Identifikasi produk unggulan desa, Fasilitasi, serta Monitoring dan Evaluasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan Diversifikasi Pasar <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan diversifikasi pasar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi Pengelolaan Desa 2) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 3) Sistem Penilaian Kinerja Pasar Desa 4) Monitoring dan Evaluasi 5) Data Pasar Desa <p>04.04 Usaha Ekonomi dan Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perekonomian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga 2) Monitoring dan Evaluasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>b. Pelaksanaan Pengembangan Usaha Jasa dan industri kecil Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Modul 2) Fasilitasi 3) Monitoring dan Evaluasi <p>04.05 Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ekonomi Desa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ekonomi desa meliputi Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi desa, Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa, serta Monitoring dan evaluasi. b. Masyarakat tertinggal Naskah-naskah yang berkaitan dengan Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat, Fasilitasi pengembangan masyarakat, dan Monitoring dan evaluasi. <p>05 Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Desa</p> <p>05.01 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Desa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan desa meliputi Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan dan Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan.</p> <p>05.02 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Desa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir desa meliputi Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan desa dan pesisir desa.</p> <p>05.03 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Desa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi sarana dan prasarana desa meliputi Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan serta Pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman.</p> <p>05.04 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi di Desa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi di desa meliputi Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi di desa serta Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi di desa.</p> <p>05.05 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi di Desa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemasyarakatan dan kerjasama teknologi di desa meliputi Pelaksanaan pemasyarakatan teknologi di desa serta Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi di desa.</p>
PA	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pengkajian dan Pengusulan</p> <p>02 Pengarusutamaan Gender (PUG) Ekonomi, Politik, Sosial dan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum meliputi Data Gender, Advokasi dan Fasilitasi, serta (Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender)</p> <p>03 Perlindungan Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan) meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Perlindungan Perempuan b. Advokasi dan Fasilitasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04 05 06	<ul style="list-style-type: none"> c. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan d. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender e. Analisis dan penyajian informasi gender <p>Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Anak meliputi Data Perlindungan Anak, Advokasi dan Fasilitasi serta (Monitoring, Evaluasi dan</p> <p>Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tumbuh Kembang Anak meliputi Data Tumbuh Kembang Anak, Advokasi dan Fasilitasi, serta (Monitoring, evaluasi dan analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak, Forum Anak Daerah)</p> <p>Laporan Statistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik meliputi Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan</p>
KB	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
01 02	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga termasuk di</p> <p>Pengendalian Penduduk</p> <p>02.01 Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk meliputi pengumpulan dan pengolahan data, b. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk termasuk di dalamnya penyiapan fasilitas, evaluasi dan pelaporan. <p>02.02 Perencanaan pengendalian penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Profil dan Proyeksi Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan profil dan proyeksi penduduk meliputi data profil dan proyeksi penduduk, evaluasi data dan proyeksi b. Penetapan parameter pengendalian penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan parameter pengendalian penduduk termasuk di dalamnya penetapan dan evaluasi sasaran c. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk termasuk di dalamnya pemanfaatan profil,proyeksi dan parameter. <p>02.03 Kerja sama pendidikan kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem jalur pendidikan formal, non formal dan informal. b. Pengembangan Materi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan materi jalur pendidikan formal, non formal dan informal c. Monitoring dan evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>02.04 Analisis dampak kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis dampak kependudukan mulai dari analisis sosial, analisis ekonomi, analisis dampak politik dan pertahanan, analisis dampak keamanan, analisis daya dukung dan analisis daya tampung lingkungan.</p> <p>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</p> <p>03.01 Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah termasuk di dalamnya bina keluarga berencana</p> <p>03.02 Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina kesetaraan keluarga berencana jalur swasta meliputi bina keluarga berencana rumah sakit dan</p> <p>03.03 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus</p>
04	<p>a. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan terbatas</p> <p>b. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 1) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 2) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan c.</p> <p>c. Kesertaan keluarga berencana pria 1) Peningkatan akses keluarga berencana pria 2) Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria</p> <p>03.04 Kesehatan Reproduksi Naskah-naskah yang berkaitan kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya kelangsungan hidup(ibu, bayi dan anak), pencegahan pra menstruasi syndrome dan HIV/AIDS, pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas.</p> <p>Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga</p> <p>04.01 Bina keluarga Balita dan Anak a. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelembagaan bina keluarga dan balita termasuk di dalamnya pengembangan kelompok dan kemitraan</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak</p> <p>04.02 Bina ketahanan remaja Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina ketahanan remaja termasuk di dalamnya pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan</p> <p>04.03 Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan termasuk di dalamnya pengembangan program bina</p> <p>04.04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga termasuk di dalamnya pengembangan program usaha ekonomi</p> <p>04.05 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Naskah-naskah yang berkaitan dengan pusat pelayanan keluarga sejahtera termasuk di dalamnya pengembangan program pusat pelayanan</p> <p>05 Advokasi dan Informasi</p> <p>05.01 Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi a. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan advokasi, komunikasi dan edukasi termasuk di dalamnya perencanaan dan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Advokasi dan pencitraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi dan pencitraan c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan komunikasi, informasi dan edukasi mulai dari promosi, sarana produksi media komunikasi, produk 05.02 Bina hubungan antar lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina hubungan antar lembaga termasuk di dalamnya hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan 05.03 Bina lini lapangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina lini lapangan termasuk di dalamnya pengembangan, monitoring dan evaluasi(tenaga lini lapangan, 05.04 Pelaporan dan statistik <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan mulai dari perumusan pola sistem pencatatan dan b. Pengumpulan dan pengolahan data Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data c. Analisis dan evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi pengendalian penduduk, analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga 05.05 Teknologi Informasi dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem aplikasi dan bank data Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem aplikasi dan bank data mulai dari pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data b. Infrastruktur teknologi informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi mulai dari pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi c. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi dan penyebarluasan informasi termasuk di dalamnya dokumentasi dan perpustakaan, 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil termasuk di dalamnya buku induk administrasi kependudukan, buku induk catatan sipil, dan laporan evaluasi tahunan. 07 Data Statistik Kependudukan dan Keluarga Berencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan data statistik kependudukan dan keluarga berencana meliputi Laporan statistik Bulanan, Triwulan, Semester
DT	URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
01	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sumber Daya Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 01.01 Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pengembangan Sumber daya Pendidikan dan Keterampilan b. Fasilitasi Pengembangan Sumber daya Kesehatan c. Fasilitasi Pengembangan Sumber daya Hayati d. Fasilitasi Pengembangan Sumber daya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
01.02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya 01.03 Pemantauan dan Evaluasi 02 Peningkatan Infrastruktur 02.01 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur 02.02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur 02.03 Pemantauan dan Evaluasi 03 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha 03.01 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha 03.02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha 03.03 Pemantauan dan evaluasi 04 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya 04.01 Fasilitasi Pembinaan 04.02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya 04.03 Pemantauan dan evaluasi	e. Teknologi dan Inovasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Infrastruktur meliputi: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur meliputi: a. Fasilitasi peningkatan infrastruktur transportasi b. Fasilitasi peningkatan infrastruktur informasi dan telekomunikasi c. Fasilitasi peningkatan infrastruktur sosial d. Fasilitasi peningkatan infrastruktur ekonomi e. Fasilitasi peningkatan infrastruktur energi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha meliputi: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha meliputi: a. Investasi fasilitasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha b. Pembinaan kelembagaan ekonomi dan dunia usaha c. Pembinaan ekonomi dan dunia usaha mikro, kecil dan menengah d. Kemitraan pembinaan ekonomi dan dunia usaha e. Pembinaan ekonomi dan dunia usaha pengembangan dunia komoditas unggulan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya meliputi: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Pembinaan meliputi: a. Fasilitasi pembinaan penguatan kapasitas lembaga lokal b. Fasilitasi pembinaan penguatan organisasi masyarakat c. Fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat d. Fasilitasi pembinaan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya e. Fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
05	<p>Pengembangan Daerah Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Daerah Khusus meliputi:</p> <p>05.01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pengembangan daerah khusus perbatasan b. Fasilitasi pengembangan daerah khusus daerah rawan konflik dan bencana c. Fasilitasi pengembangan daerah khusus perdesaan d. Fasilitasi pengembangan daerah khusus daerah pulau terpencil dan terluar e. Fasilitasi pengembangan daerah khusus Wilayah Strategis <p>05.02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus</p> <p>05.03 Pemantauan dan evaluasi</p>
KS	URUSAN KESEHATAN
01	<p>Perumusan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan dibidang bina upaya kesehatan, pengendalian penyakit dan Penyehatan lingkungan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, bina kefarmasian dan alat kesehatan meliputi engkajian dan pengusulan kebijakan, Penyiapan bahan, Pemberian masukan</p>
02	<p>Upaya Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Upaya Kesehatan meliputi:</p> <p>02.01 Upaya Kesehatan Dasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan Upaya Kesehatan Dasar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kedokteran keluarga b. Praktik klinis bagi dokter di fanyaskes primer c. Pelaksanaan kesehatan primer d. Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas e. Kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit f. ICD 10, Dentistry & Stomatology g. Infeksi menular lewat tranfusi darah h. Penyakit mulut di tingkat primer i. Pembiayaan darah j. Penggunaan darah rasional k. Unit tranfusi darah, Bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah l. Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan m. Akreditasi Puskesmas n. Puskesmas berprestasi <p>02.02 Upaya Kesehatan Rujukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Upaya Kesehatan Rujukan meliputi:</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan rujukan <ul style="list-style-type: none"> 1) Rumah Sakit Bergerak 2) Rumah Sakit Pratama 3) Rumah Sakit Publik 4) Rumah Sakit Privat 5) Rumah Sakit Khusus b. Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK) c. Pelayanan Rumah Sakit Privat <ul style="list-style-type: none"> 1) Akses pelayanan SPGDT call 119 2) Akses pelayanan rekayasa jaringan dan sel punca 3) Pelayanan geriatri 4) Pelayanan medical tourism 5) Pelayanan Hyperbarik d. Pelayan kesehatan di Rumah Sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain <ul style="list-style-type: none"> 1) Rumah Sakit rujukan regional jejaring pelayanan kanker 2) Rumah Sakit rujukan nasional dan rumah sakit rujukan regional 3) Pencegahan <i>Froud</i> di Rumah Sakit e. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 1) Keselamatan pasien di Rumah Sakit 2) Pelayanan jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit 3) Pelayanan penyakit ginjal 4) Pelayanan HIV/AIDS 5) Pelayanan tim reproduksi berbantu di Rumah Sakit 6) Penguatan Rumah Sakit vertikal sebagai <i>Sister Hospital</i> 7) Program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDSBK) f. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan pasien jaminan kesehatan 2) Biaya klaim tenaga kerja Indonesia bermasalah(TKIB) dari luar negeri g. Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa h. Badan pengawas di Rumah Sakit i. Perizinan dan penetapan kelas Rumah Sakit kelas C dan Penanam Modal Asing. <ul style="list-style-type: none"> 1) Usulan penetapan atau peningkatan peningkatan kelas dari pemilik RS atau pimpinan badan Rumah Sakit 2) Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota 3) Profil dan daata Rumah Sakit 3 (tiga) tahun terakhir 4) <i>Self instrumen assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan 5) Keputusan penetapan kelas (jika penetapan kelas) 6) Sertifikat lulus akreditasi (jika penetapan kelas)

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>j. Akreditasi Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) 2) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional 3) Rumah Sakit pasca akreditasi Nasional 4) <i>Surveyor</i> akreditasi Rumah Sakit <p>02.03 Keperawatan dan keteknisian medik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keperawatan dan keteknisian medik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan keperawatan dasar b. Pelayanan keperawatan profesional di Rumah Sakit c. Pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum d. Pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Khusus e. Bina pelayanan kebidanan f. Bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik <p>02.04 Penunjang medik dan sarana kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penunjang medik dan sarana kesehatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mikrobiologi dan imunologi <ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorium kesehatan 2) Laboratorium Klinik 3) Laboratorium Puskesmas 4) Laboratorium mikrobiologi kultur b. Patologi dan toksikologi <ol style="list-style-type: none"> 1) PNPME 2) Sarana kesehatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) c. Radiologi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan radiologi 2) Dosis radiasi nasional 3) radiologi, radioterapi dan kedokteran nuklir 4) Radioterapi di Rumah Sakit 5) Telemedicine 6) Radiologi diagnostik 7) Teleradiologi d. Perijinan dan sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Perijinan pelayanan radiologi 2) Sertifikasi peningkatan kapabilitas e. Sarana dan prasarana kesehatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Prasarana bangunan Rumah Sakit kelas A 2) Prasarana bangunan Rumah Sakit kelas B 3) Prasarana bangunan Rumah Sakit kelas C

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> 4) Prasarana ruang gawat darurat 5) Prasarana ruang operasi 6) Prasarana ruang perawatan intensif 7) Prasarana ruang rawat inap 8) Prasarana ruang rehabilitasi medik 9) Prasarana ruang instalasisterilisasi sentral (CSSD) 10) Prasarana ruang yang aman dalam situasi dalam situasi darurat dan bencana 11) Prasarana instalasi peyediaan air bersih untuk fasilitas pelayanan kesehatan 12) Prasarana instalasi pengolahan air limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan 13) Prasarana Rumah Sakit keselamatan jiwa 14) Prasarana Rumah Sakit sistem instalasi gas medik dan vakum medik 15) Prasarana Rumah Sakit sistem instalasi tata udara 16) Prasarana Rumah Sakit sistem proteksi kebakaran aktif f. Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) KalibrasiBPFK/LPFK/UPFK 2) Kalibrasi Rumah Sakit 3) Kalibrasi Puskesmas 4) Pemeliharaan peralatan kesehatan Rumah Sakit 5) Pemeliharaan peralatan kesehatan Puskesmas g. Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan (ASPAK) <ul style="list-style-type: none"> 1) ASPAK Rumah Sakit 2) ASPAK Puskesmas 3) ASPAK Dinas Kesehatan <p>02.05 Kesehatan Jiwa</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Jiwa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan jiwa dan Non fasilitas pelayanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kesehatan jiwa di Desa siaga 2) Kegawat daruratan psikiatrik di fasilitas pelayanan kesehatan primer 3) Promosi kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan b. Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Layananunggulan di RS jiwa 2) Rehabilitasi psikososial di RS jiwa 3) Idikator mutu RS jiwa 4) Mutu layanan jiwa di RS jiwa dan RSUD sesuai penyelenggaraan RS c. Etikolegal dan Asesmen <ul style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan penelantaran dan pemasungan serta penanganan salah lainnya terhadap orang dengan penderita gangguan jiwa 2) visum et repertum

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>d. Pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika psikotropika dan zat adiktif, rokok, dan alkohol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program terapi rumatan metadon (PTRM) 2) Pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan penggunaan alkohol 3) Wajib lapor pecandu Narkotika 4) Pencegahan masalah akibat penggunaan tembakau etil rehabilitasi medis terkait hukum <p>e. Kesehatan jiwa kelompok berisiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kesehatan jiwa di sekolah 2) Kesehatan jiwa dan dukungan psikososial penanggulangan bencana 3) Penanggulangan autisme 4) Kesehatan jiwa pada kelompok berisiko 5) Psikologi awal (PFA) bagi petugas siaga bencana <p>03 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan meliputi:</p> <p>03.01 Surveilans, Imunisasi, karantina, dan kesehatan matra Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surveilans, Imunisasi, karantina, dan kesehatan matra meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surveilans <ol style="list-style-type: none"> 1) Difteri 2) Polio 3) Penyelenggaraan kegiatan survei pre TAS filariasis 4) Surveilans influenza b. Imunisasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pekan imunisasi nasional 2) Coldchain bagi petugas imunisasi 3) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan balita 4) Imunisasi bagi petugas kesehatan 5) Imunisasi di daerah sulit 6) Imunisasi TT bagi wanita usia subur (WUS) 7) Imunisasi bagi masyarakat umum 8) Vaksin dan serum program imunisasi, pencangan vaksin baru DPT-HIB-Hib 9) Imunisasi campak, polio, difteri, TT, DPT, pertusis, tetanus dan HIB B / Haemophilis influenza tipe B c. Karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Icv (International certificate vaccine) 2) Hapus serangga dan hapus tikus 3) Teknik pengendalian resiko kesehatan lingkungan di pelabuhan/ bandara/ pos lintas batas 4) Vaksinasi meningitis pada RS, KKP dan poliklinik 5) Kekarantinaan kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan 6) Obat dan P3K kapal 7) Kesehatan nakoda/pilot dan ABK/pesawat 8) Air bersih di kapal 9) Fumigasi di kapal

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>d. Kesehatan matra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mudik sehat 2) Kesehatan bagi penumpang darat, penumpang kapal laut dan penumpang pesawat udara 3) Kesehatan migran 4) Upaya kesehatan penyelaman dan hyperbarik 5) Penanggulangan kesehatan akibat gangguan kamtibmas 6) Kesehatan transmigrasi bagi tenaga kesehatan <p>03.02 Pengendalian penyakit menular langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengendalian penyakit menular langsung meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian tuberkulosis <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian penyakit TB 2) TB multi drug resistance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB anak, TB HIV, keperawatan TB 3) Laboratorium TB b. Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual <ol style="list-style-type: none"> 1) Survei Terpadu biologis dan perilaku (STBP) / <i>integrated bio-behavioural surveillance</i> (IBBS) 2) <i>Human immuno deficiency virus</i> (HIV) 3) Infeksi menular seksual (IMS) , perawatan, dukungan dan pengoatan (PDP), konseling dan test 4) Obat <i>anti retro viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV c. Pengendalian infeksi pengendalian saluran pernafasan akut <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Middle east respiratory syndrome corona virus</i> (MERS CoV) 2) Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) d. Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Diare 2) Tifoid 3) Hepatitis e. Pengendalian kusta dan frambusia <ol style="list-style-type: none"> 1) Kusta 2) Frambusia 3) Aliansi nasional eliminasi kusta dan frambusia (ANEK) <p>03.03 Pengendalian penyakit bersumber binatang Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengendalian penyakit bersumber binatang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian malaria <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelambu berinsektisida (LLINs) 2) Eliminasi malaria 3) Crosschecker mikroskopis malaria b. Pengendalian arbovirolosis <ol style="list-style-type: none"> 1) DBD 2) Chikungunya

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>3) Ebola</p> <p>c. Pengendalian zoonosis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyakit flu burung 2) Vaksin anti rabies (VAR) baru 3) Penyakit pes 4) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) <p>d. Pengendalian filariasis dan kecacingan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Filariasis 2) Kecacingan 3) Schistosomiasis <p>e. Pengendalian vektor</p> <p>03.04 Pengendalian penyakit tidak menular</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengendalian penyakit tidak menular meliputi:</p> <p>a. Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyakit jantung 2) Penyakit pembuluh darah 3) Penyakit Hipertensi 4) Penyakit Stroke <p>b. Pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyakit diabetes melitus 2) Penyakit gangguan metabolik 3) Penyakit gangguan tiroid 4) Penyakit obesitas <p>c. Pengendalian penyakit Kanker</p> <p>d. Pengendalian penyakit kronis dan generatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyakit akibat produk tembakau 2) Asma, Lupus, Thalassemia <p>e. Pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian cedera 2) Pengendalian kecelakaan lalu lintas 3) Penanganan kesehatan akibat tindak kekerasan <p>03.05 Penyehatan lingkungan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyehatan lingkungan meliputi:</p> <p>a. Penyehatan air dan sanitasi dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan kualitas air minum 2) Sanitasi total berbasis masyarakat

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyehatan pemukiman dan tempat-tempat umum <ul style="list-style-type: none"> 1) Higiene sanitasi dan bangunan umum 2) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan 3) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum c. Penyehatan kawasan dan sanitasi darurat <ul style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan Kedaruratan bidang kesehatan lingkungan 2) Pelabuhan sehat, pasar sehat, dan kota sehat 3) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar d. Higiene sanitasi pangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan Kedaruratan bidang kesehatan lingkungan 2) Pelabuhan sehat, pasar sehat, dan kota sehat 3) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar 4) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar e. Pengamanan limbah, udara radiasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan Kedaruratan bidang kesehatan lingkungan 2) Pelabuhan sehat, pasar sehat, dan kota sehat 3) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar 4) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar <p>03.06 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Pengembangan teknologi dan laboratorium Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Pengembangan teknologi dan laboratorium meliputi: Laboratorium pengendali penyakit, Laboratorium kesehatan lingkungan, Laboratorium kesehatan matra, Model dan teknologi tepat guna, Uji kendali mutu dan kalibrasi serta Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi</p> <p>03.07 Sertifikasi sanitasi kesehatan dan pengujian kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sertifikasi sanitasi kesehatan dan pengujian kesehatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ship sanitation <ul style="list-style-type: none"> 1) Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC) 2) Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC) 3) Sertifikat pengawasan obat/alat P3K kapal b. Sertifikat <ul style="list-style-type: none"> 1) Health Certificate 2) International Certificate of Vaccination 3) Surat keterangan pengujian kesehatan Nahkoda/Pilot dan anak buah kapal /pesawat udara 4) Sertifikat air bersih 5) Sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga 6) Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan 7) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Anak</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi:</p> <p>04.01 Gizi</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Gizi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gizi Makro <ol style="list-style-type: none"> 1) Gerakan nasional sadar gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) 2) Pemantauan pertumbuhan anak (posyandu) b. Gizi Mikro <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (gangguan akibat kekurangan Yodium)). KVA (kekurangan vitamin A). AGB (Anemia Gizi) 2) Manajemen taburia 3) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya c. Gizi Klinik dan Dietetik <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi 2) Tatalaksana anak gizi buruk 3) Pencegahan dan penanggulangan gizi lebih d. Konsumsi makan dan jasa makanan <ol style="list-style-type: none"> 1) Makanan pendamping ASI 2) ASI eksklusif 3) Pedoman gizi seimbang 4) Makanan bayi dan anak 5) Buffer stock makanan pendamping ASI 6) Makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita gizi kurang 7) Makanan tambahan anak sekolah e. Kewaspadaan gizi <ol style="list-style-type: none"> 1) Makanan pendamping ASI 2) ASI eksklusif 3) Pedoman gizi seimbang 4) Makanan bayi dan anak <p>04.02 Kesehatan ibu</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Gizi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesehatan ibu hamil <ol style="list-style-type: none"> 1) Makanan pendamping ASI 2) ASI eksklusif 3) Pedoman gizi seimbang b. Kesehatan ibu bersalin <ol style="list-style-type: none"> 1) Makanan pendamping ASI 2) ASI eksklusif 3) Pedoman gizi seimbang

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> c. Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Audit maternal perinatal 2) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/pemberdayaan masyarakat 3) Tanda bahaya pada kehamilan 4) Surveilans kematian ibu d. Keluarga berencana <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan KB pasca persalinan 2) Pelatihan KB pasca persalinan e. Perlindungan kesehatan Reproduksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) 2) Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana (paket pelayanan awal minimal/PPAM Kespro) 3) Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan 4) Pengaruh Utama Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) <p>04.03 Kesehatan Anak</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Anak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelangsungan Hidup Bayi <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR(Berat Bayi Lahir Rendah) 4) Pencegahan infeksi b. Kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR(Berat Bayi Lahir Rendah) c. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR(Berat Bayi Lahir Rendah) d. Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR(Berat Bayi Lahir Rendah) e. Perlindungan Kesehatan Anak <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR(Berat Bayi Lahir Rendah) 4) Anak yang berhadapan dengan hukum di lapas/rutan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>5) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas</p> <p>04.04 Kesehatan tradisional alternatif, dan komplementer Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan tradisional alternatif, dan komplementer meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan Tradisional Keterampilan <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4) Anak yang berhadapan dengan hukum di lapas/rutan b. Kesehatan Tradisional Ramuan <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4) Anak yang berhadapan dengan hukum di lapas/rutan 5) Pelayanan kesehatan tradisional ramuan di fasyankes c. Kesehatan Alternatif dan Komplementer <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4) Anak yang berhadapan dengan hukum di lapas/rutan d. Penapisan dan Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4) Anak yang berhadapan dengan hukum di lapas/rutan 5) Pengobatan tradisional (lokal) 6) Asosiasi pengobatan tradisional <p>04.05 Kesehatan Kerja dan Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Kerja dan Olahraga meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) b. Kapasitas kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
05	<p>Kefarmasian dan Alat Kesehatan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kefarmasian dan Alat Kesehatan meliputi:</p> <p>05.01 Obat publik dan perbekalan kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, analisis, pemantauan & evaluasi)</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan obat publik dan perbekalan kesehatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harga obat publik <ul style="list-style-type: none"> 1) Kebugaran jasmani bagi karyawan/pekerja 2) Kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji 3) Kebugaran jasmani bagi usia sekolah b. Pengadaan obat <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak <p>c. Lingkungan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4) K3 Puskesmas 5) Biomonitoring efek kesehatan 6) Reviem pedoman pengendalian risiko kesehatan <p>d. Kemitraan kesehatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelayanan kesehatan neonnatal 2) Manajemen asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4) K3 Puskesmas 5) Biomonitoring efek kesehatan <p>e. Kesehatan Perkotaan/Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kawasan kumuh dan miskin kabupaten/perkotaan 2) Forum Kota/Desa <p>f. Kesehatan olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kebugaran jasmani bagi karyawan/pekerja 2) Kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji 3) Kebugaran jasmani bagi usia sekolah 4) Olahraga bagi ibu hamil/masa nifas 5) Olahraga bagi usia lanjut 6) Pelayanan kesehatan olahraga masyarakat

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>6) Obat program kesehatan ibu 7) Obat program gizi 8) Obat anti Tuberkulosis 9) Obat dan alat kesehatan haji 10) Obat penderita <i>Thalassemia</i> 11) Obat psikotropika generik 12) Obat anti <i>retro viral</i> c. Perbekalan kesehatan 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Hasil <i>stock opname</i> obat</p> <p>05.02 Produksi dan distribusi alat kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produksi dan distribusi alat kesehatan meliputi: a. Alat kesehatan 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Hasil <i>stock opname</i> obat b. Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Hasil <i>stock opname</i> obat c. Produk diagnostik in vitro dan perbekalaan kesehatan rumah tangga (PKRT) 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Hasil <i>stock opname</i> obat</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>7) Post market & surveillance PKRT</p> <p>05.03 Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komnitas dan obat tradisional) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kefarmasian meliputi:</p> <p>a. Pelayanan kefarmasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar <p>b. Farmasi klinik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Hasil <i>stock opname</i> obat 7) Post market & surveillance PKRT 8) Pharmaceutical care lainnya 9) Dispensing sediaan steril 10) Pencampuran obat suntikan penanganan sediaan sitostatika 11) Pharmaceutical care untuk pasien penyakit jantung Koroner : fokus sindrom koroner akut <p>c. Farmasi komunitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak <p>d. Penggunaan obat rasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria <p>05.04 Produksi dan distribusi kefarmasian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produksi dan distribusi kefarmasian meliputi:</p> <p>a. Obat tradisional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Hasil <i>stock opname</i> obat

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> 7) Post market & surveillance PKRT 8) Pharmaceutical care lainnya 9) Dispensing sediaan steril 10) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) 11) Usaha Jamu Gendong (UJG) 12) Usaha Jamu Racik (UJR) 13) Farmakope herbal Indonesia & suplemennya versi bahasa Inggris
	<ul style="list-style-type: none"> b. Kosmetik dan makanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat <i>esensial</i> 3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program Malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Hasil <i>stock opname</i> obat c. Narkotika, Psikotropika, Prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus <ul style="list-style-type: none"> 1) Narkotika dan psikotropika 2) Prekursor farmasi 3) Sediaan farmasi khusus 4) Persetujuan impor dan ekspor 5) Pelaksanaan perizinan import dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi d. Kemandirian obat dan bahan baku obat Indonesia pharmaceutical industry directory
06	<p>Surat Keterangan, Sertifikat dan Perijinan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan, Sertifikat dan Perijinan meliputi:</p>
06.01	<p>Surat keterangan</p>
	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan meliputi Surat keterangan Special Acces Scheme (SAS), Surat keterangan alat</p>
06.02	<p>Sertifikasi dan perijinan</p>
	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sertifikasi dan Perijinan meliputi Sertifikasi produksi alat kesehatan, Sertifikasi sarana distribusi alat</p>
07	<p>Penanggulangan Krisis Kesehatan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanggulangan Krisis Kesehatan meliputi:</p>
07.01	<p>Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan</p>
	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencegahan, Mitigasi dan kesiapsiagaan meliputi: Pencegahan dan Mitigasi serta Kesiapsiagaan</p>
07.02	<p>Tanggap darurat dan pemulihan</p>
	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanggap darurat dan pemulihan meliputi Tanggap darurat serta Pemulihan</p>
07.03	<p>Pemantauan dan informasi</p>
	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan informasi meliputi Pemantauan serta Informasi</p>
07.04	<p>Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan</p>
07.05	<p>Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
07 08 09 10	<p>07 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Jaminan Kesehatan meliputi tersedianya data NHA setiap tahun dan tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN</p> <p>08 Intelegensia Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Intelegensia Kesehatan meliputi: 08.01 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensi kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensi kesehatan meliputi Intelegensia anak serta Intelegensia remaja, dewasa, dan lanjut usia 08.02 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan meliputi Intelegensia akibat gangguan bawaan serta Intelegensia akibat gangguan degeneratif dan sistem persyarafan</p> <p>09 Kesehatan Haji Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Haji meliputi: 09.01 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan Haji Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan Haji meliputi: a. Pemeriksaan kesehatan jamaah Haji b. Pelayanan kesehatan jamaah haji Kab/Kota c. Klaim pelayanan kesehatan di embarkasi/debarkasi atau KKP d. Pelayanan kesehatan embarkasi e. Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) f. Rekrutmen tenaga musiman 09.02 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehaatan Haji Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan Haji meliputi: a. Advokasi dan kemitraan pembinaan kesehatan Haji b. Kesehatan Haji di Kab/Kota c. Kesehatan Haji terpadu d. Pemeriksaan jasa boga catering jemaah Haji e. Vaksinasi jamaah Haji f. Sanitasi asrama Haji g. Penyelenggaraan kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi</p> <p>10 Promosi Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Promosi Kesehatan meliputi: 10.01 Sarana promosi kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Promosi Kesehatan meliputi: a. Booklet b. Poster c. Leaflet</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pamflet e. Lembar balik f. Selebaran g. Buletin h. Festival i. Lomba j. Pameran k. Seminar l. Iklan layanan masyarakat m. Film n. Radio Spot 10.02 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Saka Bhakti Husada b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga c. Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan d. Kawasan tanpa rokok e. Kerjasama dengan swasta dibidang kesehatan f. Kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan g. Koordinasi lintas program/ lintas sektor di bidang kesehatan h. Peran serta kader PKK dan dasawisma dalam mendukung kesehatan ibu dan anak 10.03 Pengembangan pesan promosi kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan pesan promosi kesehatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pesan promosi kesehatan b. Kampanye promosi kesehatan c. Video animasi promosi kesehatan 10.04 Hari kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hari Kesehatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Hari Kesehatan Nasional b. Hari kesehatan dunia c. Hari tanpa tembakau se-dunia d. Hari-hari besar kesehatan 11 Data dan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data dan Informasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 11.01 Statistik Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Statistik Kesehatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Statistik derajat dan upaya kesehatan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>b. Statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan</p> <p>11.02 Analisis dan Diseminasi Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisis dan Diseminasi Informasi meliputi:</p> <p>a. Analisis data kesehatan</p> <p>b. Diseminasi Informasi kesehatan</p> <p>11.03 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan meliputi:</p> <p>a. Pengembangan sistem informasi</p> <p>b. Bank Data</p> <p>12 Laporan Statistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik kesehatan meliputi Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan</p>
AR	URUSAN KEARSIPAN
01	<p>Perumusan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Kearsipan meliputi Pengkajian dan pengusulan kebijakan, Penyiapan kebijakan, Perumusan kebijakan serta Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria)</p> <p>02 Pembinaan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Kearsipan meliputi:</p> <p>02.01 Bina Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bina Arsiparis meliputi:</p> <p>a. Pengembangan Profesi Arsiparis (Formasi Jabatan Arsiparis dan Standar Kompetensi Arsiparis)</p> <p>b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis</p> <p>c. Penilaian Arsiparis (Berkas Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit/DUPAK dan Berkas Penetapan Angka Kredit/PAK Arsiparis)</p> <p>d. Pemilihan Arsiparis Teladan (Penyelenggaraan dan Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)</p> <p>e. Data Base Arsiparis</p> <p>02.02 Bimbingan dan Konsultasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan dan Konsultasi meliputi:</p> <p>a. Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)</p> <p>b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan</p> <p>c. Unit Kearsipan</p> <p>d. Sumberdaya Manusia</p> <p>02.03 Supervisi dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Supervisi dan Evaluasi meliputi Perencanaan, Pelaksanaan serta Laporan Tahunan supervisi dan Evaluasi</p> <p>02.04 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi</p> <p>02.05 Fasilitasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Kearsipan meliputi SDM Kearsipan dan Prasarana dan Sarana</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
02.06 02.07 03 03.01	<p>Penilaian Organisasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Organisasi Kearsipan meliputi Penyelenggaraan dan database Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip</p> <p>Jadwal Retensi Arsip (JRA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jadwal Retensi Arsip meliputi Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip serta Database Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip</p> <p>Pengelolaan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip meliputi:</p> <p>Pengelolaan Arsip Dinamis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencatatan (Buku Agenda, Kartu Kendali dan Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi) 2) Pendistribusian b. Penggunaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencatatan (Buku Agenda, Kartu Kendali dan Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi) 2) Pendistribusian c. Pemeliharaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberkasan (Daftar arsip aktif /daftar berkas dan isi berkas) 2) Penataan Arsip Inaktif (Pengaturan fisik, Pengolahan informasi arsip dan Penyusunan daftar arsip inaktif) 3) Penyimpanan arsip (Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif dan Pengamanan) 4) Alih Media (Kebijakan alih media, Autentikasi, Bderita Acara dan Daftar Arsip yang dialihmediakan) 5) Program Arsip vital (Identifikasi, Perlindungan dan Pengamanan, Penyelamatan dan Pemulihan serta Daftar Arsip Vital) d. Autentikasi Arsip Dinamis <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberkasan (Daftar arsip aktif /daftar berkas dan isi berkas) 2) Penataan Arsip Inaktif (Pengaturan fisik, Pengolahan informasi arsip dan Penyusunan daftar arsip inaktif) 3) Penyimpanan arsip (Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif dan Pengamanan) 4) Alih Media (Kebijakan alih media, Autentikasi, Bderita Acara dan Daftar Arsip yang dialihmediakan) e. Penyusutan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemandahan Arsip Inaktif (Berita Acara Pemandahan dan Daftar arsip yang dipindahkan) 2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna (Pembentukan Panitia penilai, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan 3) Penyerahan arsip statis <ol style="list-style-type: none"> a)Pembentukan Panitia Penilai b) Notulen Rapat Panitia c) Surat pertimbangan Panitia Penilai d) Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan e) Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip f) Keputusan Penetapan Penyerahan g) Berita Acara Penyerahan Arsip

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>h) Daftar arsip yang diserahkan</p> <p>f. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis (Data Base Pengelolaan Arsip Aktif dan Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif)</p> <p>g. Jadwal Retensi Arsip (Pengusulan dan Persetujuan JRA serta Data Base Persetujuan JRA)</p> <p>03.02 Pengelolaan Arsip Statis</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Statis meliputi:</p> <p>a. Akuisisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring fisik dan daftar 2) Verifikasi terhadap daftar arsip 3) Menetapkan status arsip statis 4) Persetujuan untuk Penyerahan 5) Penetapan arsip yang diserahkan 6) Berita Acara Penyerahan Arsip 7) Daftar arsip yang diserahkan <p>b. Sejarah Lisan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring fisik dan daftar 2) Verifikasi terhadap daftar arsip <p>c. Daftar Pencarian Arsip Statis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring fisik dan daftar 2) Verifikasi terhadap daftar arsip <p>d. Penghargaan dan Imbalan</p> <p>e. Pengolahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menata Informasi 2) Menata Fisik 3) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (Guide, Daftar Arsip Statis dan Inventaris Arsip Statis) <p>f. Preservasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menata Informasi 2) Menata Fisik 3) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (Guide, Daftar Arsip Statis dan Inventaris Arsip Statis) <p>g. Autentikasi Arsip Statis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan <p>h. Akses Arsip Statis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	i. Jasa Kearsipan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Otomasi Kearsipan 5) Penyimpanan Arsip 6) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 7) Data Base Jasa Kearsipan
PS	URUSAN PERPUSTAKAAN
01	Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Perpustakaan meliputi kebijakan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Sumber Daya Perpustakaan Sumber Daya Perpustakaan termasuk di dalamnya Pengkajian dan pengusulan kebijakan, Penyipian kebijakan, Perumusan dan penyusunan bahan, Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan serta Penetapan dalam bentuk NSPK/Norma Standar Prosedur Kriteria (Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan dan Kajian Pengolahan)
02	Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi <ol style="list-style-type: none"> 02.01 Deposit Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan Deposit Bahan Pustaka meliputi Seran Simpan karya Cetak dan karya Rekam, Pemantauan wajib Seran Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Bibliografi dan Katalog (Bibliografi Daerah/BD, Katalog Induk Daerah/KID, Katalog Dalam Terbitan/KDT), Pendaftaran Nomor International Standard Book Number/ISBN, serta Pendaftaran Nomor International Standard Music Number/ISMN 02.02 Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka meliputi Akuisisi (Pembelian, Hibah, Hadiah, Tukar Menukar, Implementasi UU KCKR, Terbitan Internal, Pendistribusian bahan pustaka surplus, Inventarisasi koleksi/Buku Induk), Pengolahan Bahan Pustaka serta Pangkalan Data Katalog Koleksi 02.03 Jasa Perpustakaan dan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jasa Perpustakaan dan Informasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Keanggotaan b. Sirkulasi c. Referensi d. Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara e. Kerjasama Perpustakaan (MoU, Perjanjian kerjasama serta Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama Internasional) 02.04 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan meliputi Pengembangan situs web, Pengembangan kemas ulang informasi multimedia, Pengembangan program aplikasi perpustakaan serta Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>02.05 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pangkalan Data Layanan Perpustakaan</p> <p>02.06 Preservasi Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan Preservasi Bahan Pustaka meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konservasi (Perawatan Bahan Perpustakaan, Perbaikan Bahan Perpustakaan dan Penjilidan Bahan Perpustakaan) b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital <p>03 Sumber Daya Perpustakaan</p> <p>03.01 Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Perpustakaan (Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah) b. Akreditasi Perpustakaan (Permintaan Akreditasi dan Pemberian Akreditasi) c. Pangkalan Data Perpustakaan (Nomor Pokok Perpustakaan dan Perpustakaan Berbasis Wilayah) d. Pemasarakatan Minat Baca e. Organisasi Perpustakaan (Forum Perpustakaan Umum, Forum Perpustakaan Khusus, Forum Perpustakaan Sekolah, Gerakan Pemasarakatan Minat Baca dan Organisasi Perpustakaan Lainnya) <p>03.02 Pengembangan Pustakawan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Pustakawan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan c. Penerbitan Jurnal (Master) d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan (Tim Penilai Instansi/Perpustakaan Nasional, Tim Penilai Pusat, dan Pangkalan Data Tim Penilai Pustakawan) e. Pemasarakatan f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan
SS	URUSAN SOSIAL
01	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Sosial meliputi Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta (Pengkajian dan pengusulan kebijakan, Penyiapan kebijakan, Perumusan kebijakan, Masukan dan dukungan kebijakan dan Penetapan NSPK/Norma Standar Prosedur Kriteria)</p>
02	<p>Rehabilitasi Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial meliputi:</p> <p>02.01 Kesejahteraan sosial anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesejahteraan sosial anak meliputi:</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita (Pangangkatan Anak dan Pengasuhan Anak Balita)</p> <p>b. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (Pengasuhan Anak dalam Keluarga dan Pengasuhan Anak dalam Lembaga)</p> <p>c. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum serta</p> <p>d. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan yang mencakup di dalamnya Aksesibilitas anak dengan kecacatan</p> <p>e. Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus mencakup di dalamnya Advokasi dan Perlindungan khusus</p> <p>02.02 Rehabilitasi Sosial</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial meliputi:</p> <p>a. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental (Dalam Panti dan Luar Panti)</p> <p>b. Kelembagaan dan Advokasi Sosial</p> <p>c. Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>02.03 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial meliputi:</p> <p>a. Gelandangan, Pengemis dan Pemulung</p> <p>b. Tuna Susila dan Korban Traffiking Perempuan</p> <p>c. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Penyiapan dan Reintegrasi)</p> <p>d. Pelayanan Sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas</p> <p>02.04 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA meliputi Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat dan Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi</p> <p>02.05 Pelayanan Sosial Lanjut Usia</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Sosial Lanjut Usia meliputi:</p> <p>a. Pelayanan sosial dalam dan luar panti</p> <p>b. Pengembangan kelembagaan (Pembinaan Lembaga dan Kerjasama Lembaga)</p> <p>c. Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan</p> <p>03 Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi:</p> <p>03.01 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi Bimbingan dan Standardisasi serta Perizinan dan Pengumpulan</p> <p>03.02 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran meliputi:</p> <p>a. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan (Pemulihan Sosial serta Pemulangan dan Reintegrasi)</p> <p>b. Perlindungan Sosial Pekerja Migran (Penampungan dan Pemulihan Sosial serta Pemulangan dan Reintegrasi)</p> <p>c. Evaluasi dan Pelaporan (Kerjasama serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan)</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>03.03 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketahanan Sosial Masyarakat (Keserasian Sosial dan Penguatan Sumber Daya) b. Tanggap Darurat (Bantuan Darurat dan Advokasi Sosial) c. Pemulihan Sosial (Penguatan Sosial dan Reintegrasi Sosial) d. Kerjasama (Kerjasama Pemerintah dan Kerjasama non Pemerintah) <p>03.04 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesiapsiagaan dan Mitigasi b. Tanggap Darurat (Bantuan Darurat dan Advokasi Sosial) c. Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial d. Kerjasama (Kerjasama Pemerintah dan Kerjasama non Pemerintah)
04	<p>Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:</p> <p>04.01 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Analisis Pengembangan Kapasitas (Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kapasitas Usaha) b. Penataan Sosial Lingkungan Kumuh (Bimbingan Sosial dan Pengembangan Lingkungan Sosial) c. Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas (Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas) <p>04.02 Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan (Pengangkatan, Penghargaan dan Kesejahteraan) b. Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keberintisan (Identifikasi dan Pendayagunaan) c. Pengembangan Kesetiakawanan Sosial (Penggalian Nilai dan Pelestarian Nilai) d. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan di Daerah (Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Standardisasi Taman Makam Pahlawan)
05	<p>Laporan Statistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik meliputi Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan</p>
KP	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01	<p>Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil meliputi:</p> <p>01.01 Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi (rencana tata ruang laut nasional, rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan)

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>b. Rencana Tata Ruang dan zona wilayah I Jawa, Sumatera dan Leuseur Sunda</p> <p>c. Rencana Tata Ruang dan zona wilayah II (Kalimantan dan Maluku, zonasi wilayah Sulawesi dan Papua)</p> <p>d. Informasi dan evaluasi spasial</p> <p>e. Rencana Zonasi Wilayah Perairan (RZWP) dan Rencana aksinya</p> <p>01.02 Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan meliputi:</p> <p>a. Jejaring, data, dan informasi konservasi</p> <p>b. Konservasi kawasan (perancangan konservasi kawasan, perlindungan dan pelestarian kawasan)</p> <p>c. Konservasi jenis ikan (perancangan konservasi jenis ikan, perlindungan dan pelestarian jenis ikan)</p> <p>d. Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jenis ikan)</p> <p>01.03 Pesisir dan Lautan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pesisir dan Lautan meliputi:</p> <p>a. Mitigasi bencana lingkungan (mitigasi bencana pesisir dan lautan, adaptasi dampak perubahan iklim)</p> <p>b. Pendayagunaan sumber daya kelautan (benda muatan kapal tenggelam, jasa kelautan)</p> <p>c. Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir, penanggulangan pencemaran sumber daya laut)</p> <p>d. Rehabilitasi dan reklamasi</p> <p>e. Identifikasi pulau-pulau terkecil</p> <p>f. Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil</p> <p>g. Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil</p> <p>h. Sarana dan prasana pulau-pulau terkecil</p> <p>01.04 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha meliputi:</p> <p>a. Akses permodalan (akses perbankan, akses non Bank)</p> <p>b. Akses ilmu pengetahuan dan teknologi (identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi)</p> <p>c. Sosial budaya masyarakat (penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat)</p> <p>d. Pengembangan usaha (pelayanan usaha, usaha micro)</p> <p>01.05 Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Sumber Daya Perikanan meliputi:</p> <p>a. Pengawasan penangkapan wilayah Barat (pengawasan penangkapan ikan wilayah barat I, pengawasan penangkapan ikan wilayah barat II)</p> <p>b. Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur (pengawasan penangkapan ikan wilayah timur I dan II)</p> <p>c. Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran (pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah barat, pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah timur)</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>d. Pengawasan usaha budidaya wilayah barat dan wilayah timur</p> <p>01.06 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi b. Pengawasan pencemaran perairan (pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai, pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman) c. Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil d. Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati <p>01.07 Kapal Pengawas Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kapal Pengawas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Logistik dan operasional Wilayah Barat b. Logistik dan operasional Wilayah Timur c. Perawatan kapal pengawas (wilayah barat dan timur) d. Pengawakan kapal pengawas (wilayah barat dan timur) <p>01.08 Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pemantauan (pengembangan sistem pemantauan, kerjasama pemantauan) b. Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (operasional sintem pemantauan pemanfaatan sumber, analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan) c. Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya ikan) d. Pengembangan infrastruktur pengawasan (penyiapan infrastruktur, evaluasi infrastruktur) <p>01.09 Penanganan Pelanggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyidikan (wilayah barat dan timur) b. Penanganan barang bukti dan awak kapal (wilayah barat dan timur) c. Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan d. Pemantauan dan evaluasi <p>01.10 Tindak Karantina Ikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Karantina Ikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan ikan b. Penahanan c. Pengasingan d. Pengamatan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
01	<p>e. Pengamanan f. Penolakan g. Pemusnahan h. Pelepasan/pembebasan</p> <p>01.11 Tertib operasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tertib Operasioanal meliputi: a. Persyaratan lalu lintas pemasukan b. Persyaratan lalu lintas pengeluaran c. Permohonan sertifikat d. Pemasukan formulir e. Pemasukan sertifikat f. Evaluasi dan Monitoring sertifikat g. Surat perintah h. Rekomendasi</p> <p>01.12 Pencegahan penyakit Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencegahan penyakit meliputi Penutupan suatu area dan Pelanggaran lalu lintas ikan</p> <p>01.13 Pengawasan Karantina Ikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Karantina Ikan meliputi Regulasi karantina ikan, Pengendalian mutu ikan, Keamanan hasil perikanan.</p> <p>01.14 Instalasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Instalasi meliputi Instalasi karantina sementara dan Lokasi karantina</p> <p>02 Perikanan Tangkap Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perikanan Tangkap meliputi: 02.01 Sumber Daya Ikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan meliputi: a. Data dan statistik Perikanan Tangkap (pengumpulan dan pengolahan, analisis dan penyajian) b. Sumber Daya Ikan Perairan Umum Pemulihan sumber daya ikan perairan umum, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan c. Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan (pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan) d. Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas meliputi Identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan Tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif</p> <p>02.02 Pelabuhan Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelabuhan Perikanan meliputi:</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan (identifikasi dan analisis, penyiapan bangunan) b. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (tata laksana pelabuhan perikanan, pengusaha dan pelayanan) c. Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan (bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP, bimbingan pembangunan PPI dan Pelabuhan swasta) d. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (tata laksana dan sarana, keselamatan pelayaran) e. Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan (pemantauan dan evaluasi PPS, PPN dan PPP, pemantauan dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta)
	<p>02.03 Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan rancang bangun kapal perikanan, kelaikan kapal perikanan b. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkap Ikan c. Pendaftaran Kapal Perikanan (identifikasi dan pengukuran, pencatatan dan dokumentasi) d. Pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan e. Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan pelaporan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi usaha penangkapan ikan (verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan, pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan) b) Rancang bangun dan kelaikan alat penangkapan ikan c) Pendaftaran kapal perikanan (identifikasi dan pengukuran, pencatatan dan dokumentasi) d) Pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan e) Pemantauan dan evaluasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dan pelaporan 2) Alokasi usaha penangkapan ikan (verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan, pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan) 3) Tata pengusaha penangkapan ikan (verifikasi pengusaha penangkapan ikan, administrasi pengusaha penangkapan ikan) 4) Verifikasi dokumen penangkapan ikan (verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan berbadab hukum, verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan) 5) Pelayanan dokumen penangkapan ikan (pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan) 6) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan (pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan) <p>02.04 Pengembangan Usaha Penangkapan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha Penangkapan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan usaha (tata laksana kelembagaan, kerjasama usaha) b. Investasi dan permodalan usaha (tata laksana investasi dan permodalan usaha, bimbingan investasi dan permodalan usaha) c. Kenelayan (identifikasi dan kapasitas nelayan, bimbingan nelayan)

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>d. Pembinaan pengelolaan usaha (bimbingan pengelolaan usaha, bimbingan diversifikasi usaha)</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan</p> <p>02.05 Prasarana dan sarana budidaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Prasarana dan sarana budidaya meliputi:</p> <p>a. Lahan dan air (identifikasi potensi, penataan)</p> <p>b. Prasarana dan sarana budidaya air tawar (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)</p> <p>c. Prasarana dan sarana budidaya air payau (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)</p> <p>d. Prasarana dan sarana budidaya air laut (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)</p> <p>e. Distribusi prasarana dan sarana budidaya (Berita acara serah terima pekerjaan)</p> <p>f. Minapolitan budidaya (identifikasi potensi, pemanfaatan potensi)</p> <p>02.06 Perbenihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perbenihan meliputi:</p> <p>a. Induk (pengelolaan induk ikan air tawar, pengelolaan induk ikan air payau dan laut)</p> <p>b. Perbenihan skala kecil ikan air tawar dan ikan air laut</p> <p>c. Perbenihan skala besar (perbenihan skala besar ikan air tawar, perbenihan skala besar air payau dan laut)</p> <p>d. Standarisasi dan sertifikasi perbenihan</p> <p>e. Informasi dan distribusi perbenihan</p> <p>02.07 Produksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produksi meliputi:</p> <p>a. Budidaya air tawar (standarisasi dan penerapan teknologi budidaya air tawar)</p> <p>b. Budidaya air payau dan laut (standarisasi dan penerapan teknologi budidaya air payau dan laut)</p> <p>c. Budidaya ikan hias (standarisasi dan penerapan teknologi budidaya ikan hias)</p> <p>d. Sertifikasi (monitoring dan evaluasi sertifikasi)</p> <p>e. Data dan statistik Perikanan budidaya (pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan penyajian data statistik)</p> <p>02.08 Kesehatan Ikan dan Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan Ikan dan Lingkungan meliputi:</p> <p>a. Hama dan penyakit ikan (metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit, monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan)</p> <p>b. Perlindungan lingkungan budidaya (pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya)</p> <p>c. Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan (dan standarisasi mode uji kesehatan ikan dan lingkungan)</p> <p>d. Obat ikan, kimia, dan bahan biologi (monitoring dan evaluasi obat ikan kimia dan bahan biologi)</p> <p>e. Pengendalian residu (perencanaan dan tindak lanjut pengendalian residu)</p> <p>02.09 Usaha Budidaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usaha Budidaya meliputi:</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> a. Investasi dan permodalan b. Kewirausahaan (bimbingan usaha dan kemitraan) c. Pelayanan usaha (perizinan, pemantauan dan evaluasi) d. Kelembagaan dan ketenagakerjaan e. Informasi usaha dan promosi <p>02.10 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengolahan Hasil <ul style="list-style-type: none"> 1) Standarisasi (analisis standar, penerapan standar) 2) Pengembangan produk (skala mikro, kecil, menengah, pengembangan produk skala besar) 3) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, kerjasama usaha mikro, kecil dan menengah) 4) Industri pengolahan (bimbingan teknis industri pengolahan, kerjasama asosiasi dan industri pengolahan) 5) Sarana dan prasarana b. Pengembangan Produk non Konsumsi <ul style="list-style-type: none"> 1) standarisasi (analisis standar, penerapan standar) 2) Promosi dan jaringan pasar ikan hias 3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk) 4) Pengembangan industri (kerjasama industri) 5) Sarana dan prasarana c. Pemasaran Dalam Negeri <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemasaran Dalam Negeri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan (kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan, kelembagaan pasar hasil perikanan) 2) Analisis dan informasi pasar dalam negeri 3) Jaringan distribusi dan kemitraan 4) Promosi dan kerjasama 5) Sarana dan prasana d. Usaha dan investasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan usaha (mikro, kecil dan menengah, pelayanan usaha besar) 2) Kemitraan usaha (usaha kecil dan menengah, kemitraan usaha besar) 3) Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran 4) Investasi dan permodalan 5) Investasi dan promosi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>02.11 Kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana tata ruang laut nasional dan perairan Yurisdiksi (rencana tata ruang laut nasional, rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan) 2) Rencana tata ruang dan zona wilayah I (Jawa, Sumatera dan Leuseur Sunda) 3) Rencana tata ruang dan zona wilayah II (Kalimantan dan Maluku, zonasi wilayah Sulawesi dan Papua) 4) Informasi dan evaluasi spasial b. Konservasi kawasan dan jenis ikan <ol style="list-style-type: none"> 1) Jejaring, data, dan informasi konservasi 2) Konservasi wawasan (perancangan konservasi kawasan, perlindungan dan pelestarian kawasan) 3) Konservasi jenis ikan (perancangan konservasi jenis ikan, perlindungan dan pelestarian jenis ikan) 4) Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jenis ikan) c. Pesisir dan Lautan <ol style="list-style-type: none"> 1) Mitigasi bencana lingkungan (mitigasi bencana pesisir dan lautan, adaptasi dampak perubahan iklim) 2) Pendayagunaan sumber daya kelautan (benda mutan kapal tenggelam, jasa kelautan) 3) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir, penanggulangan pencemaran sumber daya laut) d. Rehabilitasi dan reklamasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi pulau-pulau terkecil 2) Pegelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil (rehabilitasi, mitigasi dan adaptasi) 3) Investasi dan promosi pulau-pulau kecil 4) Sarana dan prasarana pulau-pulau kecil e. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses permodalan (akses perbankan, akses non Bank) 2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi (identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi) 3) Sosial budaya masyarakat (penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat) 4) Pengembangan usaha (pelayanan usaha, usaha mikro) <p>02.12 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan sumber daya perikanan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan penangkapan wilayah Barat (pengawasan penangkapan ikan wilayah barat I, pengawasan penangkapan ikan wilayah barat II)

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>2) Pengawasan penangkapan ikan wilayah timur (pengawasan penangkapan ikan wilayah timur I dan II 3) Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran (pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah barat, pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah timur) 4) Pengawasan usaha budidaya wilayah barat dan wilayah timur</p> <p>b. Pengawasan sumber daya kelautan 1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi 2) Pengawasan pencemaran perairan (pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai, pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman) 3) Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil 4) Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati</p> <p>c. Kapal pengawas 1) Logistik dan operasional wilayah barat 2) Logistik dan operasional wilayah timur 3) Perawatan kapal pengawas (wilayah barat dan timur)</p> <p>d. Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur 1) Sistem pemantauan (pengembangan sistem pemantauan, kerjasama pemantauan) 2) Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber, analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan) 3) Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya ikan)</p> <p>e. Penanganan pelanggaran 1) Penyidikan (wilayah barat dan timur) 2) Penanganan barang bukti dan awak kapal (wilayah barat dan timur) 3) Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan 4) Pemantauan dan evaluasi</p> <p>02.13 Karantina ikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Karantina Ikan meliputi:</p> <p>a. Tindak karantina ikan 1) Pemeriksaan ikan 2) Pengasingan 3) Pengamatan 4) Penolakan 5) Pemusnahan 6) Pelepasan/pembebasan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Tertib Operasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan lalu lintas pemasukan 2) Persyaratan lalu lintas pengeluaran 3) Permohonan sertifikat 4) Pemasukan formulir 5) Pemasukan sertifikat 6) Evaluasi dan monitoring sertifikat 7) Surat perintah 8) Rekomendasi c. Pencegahan penyakit <ul style="list-style-type: none"> 1) Penutupan suatu area 2) Pelanggaran lalu lintas ikan d. Pengawasan karantina ikan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan peraturan perkarantinaaan 2) Pengawasan pelaksanaan operasional e. Instalasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Instalasi karantina sementara 2) Lokasi karantina
PI	URUSAN PERINDUSTRIAN
01	<p>Kebijakan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerjasama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim, dan mutu industri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01.01 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 01.02 Penyiapan bahan 01.03 Perumusan dan penyusunan bahan 01.04 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 01.05 Penetapan dalam bentuk NSPK
02	<p>Iklim Usaha dan Kerjasama</p> <p>02.01 Industri Manufaktur</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan iklim usaha dan kerja sama industri manufaktur meliputi Industri Material Dasar Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya), industri kimia dasar (anorganik dasar, organik dasar, dan dasar lainnya), industri kimia hilir (kimia anorganik hilir, kimia organik hilir, kimia organik hilir lainnya), industri tekstil dan aneka tekstil (pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki kulit, dan aneka).</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>02.02 Industri Agro Naskah-naskah yang berkaitan dengan iklim usaha dan kerja sama industri agro meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kayu 2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Tanaman Pangan 2) Hasil Perkebunan 3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya <p>02.03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan iklim usaha dan kerja sama industri unggulan berbasis teknologi tinggi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Transportasi Darat <ul style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih 2) Kendaraan Roda Dua 3) Industri Komponen b. Elektronikan dan Telematika <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Software dan Konten 2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan 2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan 3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat <p>02.04 Industri Kecil dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan iklim usaha dan kerjasama meliputi industri pangan, industri kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan dan sandang.</p> <p>03 Promosi Industri</p> <p>03.01 Industri Manufaktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi industri manufaktur meliputi: Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Material Dasar Logam <ul style="list-style-type: none"> 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> 1) Anorganik Dasar 2) Organik Dasar 3) Dasar Lainnya c. Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> 1) Kimia Anorganik Hilir 2) Kimia Organik Hilir 3) Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> 1) Tekstil 2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya 3) Alas Kaki, Kulit dan Aneka <p>03.02 Industri Agro Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi industri agro termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kayu 2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Tanaman Pangan 2) Hasil Perkebunan 3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya <p>03.03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi industri unggulan berbasis teknologi tinggi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Transportasi Darat <ul style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih 2) Kendaraan Roda Dua 3) Industri Komponen b. Elektronika dan Telematika <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Software dan Konten 2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestarian Lingkungan 3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat</p> <p>03.04 Industri Kecil dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi industri kecil dan menengah meliputi:</p> <p>a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan 1) Pangan 2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan</p> <p>b. Industri Kerajinan dan Sandang 1) Kerajinan 2) Sandang</p> <p>c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika 1) Industri Produk Logam, Alat Angkut 2) Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</p> <p>04 Standarisasi dan Teknologi</p> <p>04.01 Industri Manufaktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>a. Industri Material Logam 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi</p> <p>b. Industri Kimia Dasar 1) Anorganik Dasar 2) Organik Dasar 3) Dasar Lainnya</p> <p>c. Industri Kimia Hilir 1) Kimia Anorganik Hilir 2) Kimia Organik Hilir 3) Kimia Hilir Lainnya</p> <p>d. Industri Tekstil dan Aneka 1) Tekstil 2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya 3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</p> <p>04.02 Industri Agro Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1) Kayu 2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Tanaman Pangan 2) Hasil Perkebunan 3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya
	<p>04.03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Transportasi Darat <ul style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih 2) Kendaraan Roda Dua 3) Industri Komponen b. Elektronika dan Telematika <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Software dan Konten 2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan 2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan 3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat
	<p>04.04 Industri Kecil dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pangan 2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan b. Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerajinan 2) Sandang
05	<p>Hak dan Kekayaan Intelektual</p> <p>05.01 Industri Manufaktur Naskah-naskah yang berhubungan dengan Hak dan kekayaan Industri Manufaktur meliputi Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> 1) Anorganik Dasar 2) Organik Dasar 3) Dasar Lainnya c. Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> 1) Kimia Anorganik hilir 2) Kimia Organik Hilir 3) Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> 1) Tekstil 2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya 3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka <p>05.02 Industri Agro Naskah-naskah yang berhubungan dengan Hak dan kekayaan Industri Agro, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kayu 2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Tanaman Pangan 2) Hasil Perkebunan 3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya <p>05.03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Industri unggulan berbasis teknologi tinggi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Transportasi Darat <ul style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih 2) Kendaraan Roda Dua 3) Industri Komponen b. Elektronika dan Telematika <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Software dan Konten 2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran dan Elektronika Profesional 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
12	<p>c. Pengamanan Industri</p> <p>1) Pengamanan Industri Agro</p> <p>2) Pengamanan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>12.01 Standar Naskah-naskah yang berkaitan dengan standarisasi meliputi Standar industri manufaktur, Agro, dan Teknologi Tinggi</p> <p>12.02 Penyiapan Penerapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan penerapan standar dan kerjasama standarisasi</p> <p>12.03 Infrastruktur Standar Naskah-naskah yang berkaitan dengan infrastruktur standar meliputi pengembangan infrastruktur standar dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian</p> <p>13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri</p> <p>13.01 Kebijakan Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan industri sektoral dan kewilayahan.</p> <p>13.02 Perpajakan dan Tarif Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perpajakan dan tarif serta Tarif dan non tarif</p> <p>13.03 Pengembangan Model Industrial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan model industrial meliputi pemrograman model dan aplikasi model.</p> <p>14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup</p> <p>14.01 Industri Hijau Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan industri hijau serta kerjasama industri hijau</p> <p>14.02 Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan lingkungan hidup meliputi lingkungan global dan pengendalian lingkungan hidup.</p> <p>14.03 Energi Naskah-naskah yang berkaitan dengan konservasi energi dan diversifikasi energi</p> <p>15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengkajian dan Penerapan kebijakan juga inovasi teknologi industri serta pengembangan hak kekayaan intelektual yang meliputi fasilitasi dan komersialisasi hak kekayaan intelektual.</p> <p>16 Laporan Statistik Perindustrian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan statistik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.</p>
DG	URUSAN PERDAGANGAN
01'	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional yang di dalamnya meliputi pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan. penetapan berbentuk NSPK, perumusan dan penerapan standar.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
02	<p>Perdagangan dalam Negeri</p> <p>02.01 Bina Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina usaha yang meliputi kelembagaan dan penguatan usaha, jasa perdagangan berbasis elektronik, distribusi dan bisnis, usaha dagang asing dan keagenan, pendaftaran perusahaan, seksi analisa LKTP, pengecer dan pemasok.</p> <p>02.02 Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan dagangan kecil menengah dan produk dalam negeri meliputi di dalamnya iklim usaha dan bimbingan teknis, fasilitas usaha produksi dan pemasaran, penelaahan potensi produk lokal, fasilitasi penguatan produk lokal, kerja sama peningkatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan promosi.</p> <p>02.03 Logistik dan Sarana Distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan logistik dan sarana distribusi meliputi perencanaan dan bimbingan teknis sarana distribusi, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sarana distribusi, kerja sama pengembangan sistem logistik, informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik.</p> <p>02.04 Bahan Pokok dan Barang Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan pokok dan barang strategis meliputi informasi harga dan non harga (pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis), hasil inndutri(gula, tepung, minyak goreng dan garam), barang strategis hasil agro dan industri, bahan pokok agro(serealia, hewan dan non serealia)</p> <p>03 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>03.01 Standarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan standarisasi yang meliputi di dalamnya hubungan kelembagaan dan informasi standar, kerjasama regional bilateral dan multilateral, perumusan dan penerapan standar, tata usaha (kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program,inventaris kantor/BUMN).</p> <p>03.02 Pemberdayaan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberdayaan konsumen meliputi kerja sama, informasi dan publikasi, analisis penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku pasar, pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemberdayaan badan penvelesaian sengketa konsumen.</p> <p>03.03 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan barang yang beredar dan jasa meliputi produk pertambangan dan olahan, produk aneka industri, produk pertanian dan kehutanan, produk kimia dan olahan, jasa distribusi dan bisnis, kerjasama lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.</p> <p>03.04 Metrologi Naskah-naskah yang berkaitan dengan metrologi meliputi sarana dan kerja sama metrologi legal, kelembagaan dan penilaian kelembagaan metrologi legal, UTTP dan standar ukuran(besaran massa, listrik, tekanan, suhu besaran arus, panjang dan volume), pengawasan (pengawasan alat ukur, takar, timbangdan perlengkapannya, barang terbungkus dan satuan internasional), bimbingan mutu dan pelayanan teknis balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran(SNSU).</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>Perdagangan Luar Negeri</p> <p>04.01 Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan ekspor produk pertanian dan kehutanan meliputi ekspor produk tanaman pangan, ekspor produk perikanan dan peternakan, perkebunan tanaman tahunan dan semusim, hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat, hasil kayu dan produk kayu, hasil hutan bukan kayu.</p> <p>04.02 Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan ekspor produk industri dan pertambangan yang di dalamnya meliputi produk tekstil dan produk tekstil (TPT), produk aneka dan jasa, produk logam dan mesin, produk alat transformasi dan elektronika, produk industri agro dan kimia, produk migas dan pertambangan.</p> <p>04.03 Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan impor meliputi impor barang modal (Mesin, peralatan mesin dan alat angkut), barang pertanian dan kehutanan, barang kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi tahan lama dan tidak tahan lama, barang kimia dan bahan berbahaya, bahan tambang dan limbah.</p> <p>04.04 Fasilitasi Ekspor dan Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan ekspor dan impor meliputi kerja sama internasional, kerja sama multilateral dan regional termasuk kerjasama bilateral, pembiayaan perdagangan, sumber pembiayaan dan sistem pembayaran, penjaminan pembiayaan ekspor dan impor, prosedur ekspor dan impor, dokumen ekspor dan impor, sarana prasarana perdagangan, regulasi penunjang perdagangan, analisa pelayanan perdagangan dan fasilitasi pelayanan perdagangan.</p> <p>04.05 Pengamanan Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan perdagangan meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan, penanganan hambatan teknis perdagangan, penanganan tuduhan dumping, penanganan tuduhan subsidi dan safe guard.</p> <p>05 Kerjasama Perdagangan Internasional</p> <p>05.01 Multilateral Naskah-naskah yang berkaitan dengan akses pasar tarif dan non tarif barang pertanian, akses pasar tarif dan non tarif barang non pertanian, fasilitasi perdagangan, fasilitasi aturan perdagangan, hak kekayaan intelektual(HKI) dan investasi, lingkungan dan isu, tinjauan ketentuan perdagangan dan notifikasi.</p> <p>05.02 ASEAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan ASEAN meliputi perdagangan barang, fasilitasi perdagangan barang, investasi, daya saing dan isu lainnya.</p> <p>05.03 APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan APEC dan organisasi internasional lainnya yang di dalamnya meliputi akses perdagangan barang dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, badan-badan PBB dan non PBB, organisasi komoditi internasional.</p> <p>05.04 Bilateral Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
06	<p>05.05 Perundingan Perdagangan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan jasa bisnis dan industri, jasa keuangan, jasa kontruksi, jasa pariwisata, jasa rekreasi budaya dan olah raga, jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa lingkungan dan jasa lainnya, rules dan peraturan domestik, analisis informasi " perumusan"</p> <p>06.01 Pasar dan Informasi Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pasar b. Pengembangan sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan data ekspor 2) Pengumpulan 3) Pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi 4) Pengolahan 5) Analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan c. Sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan aplikasi 2) Pengelolaan jaringan informasi 3) Pengembangan situs web d. Pelayanan informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan pelaku usaha 2) Publikasi informasi ekspor <p>06.02 Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan produk ekspor dan ekonomi kreatif meliputi hasil industri manufaktur (mesin, logam, elektronika, telematika, pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka), produk agro kehutanan dan perkebunan, produk agro pertanian dan perikanan, jasa bisnis dan profesi, jasa kontruksi dan distribusi, media dan iptek ekonomi kreatif, seni budaya dan desain ekonomi kreatif.</p> <p>06.03 Kerjasama Pengembangan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama pengembangan ekspor yang di dalamnya meliputi kerjasama luar negeri dan dalam negeri baik pemerintah maupun non pemerintah.</p> <p>06.04 Promosi dan Citra Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi dan pencitraan meliputi promosi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, penerapan pencitraan dalam negeri dan luar negeri.</p> <p>06.05 Perdagangan Berjangka Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan bina usaha kelembagaan dan pelaku penunjang, bina usaha pelaku pasar, pengawasan transaksi kelembagaan dan pelaku penunjang, pengawasan transaksi pelaku pasar, pengawasan dan evaluasi keuangan, audit kepatuhan dan keuangan.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
06.06 06.07 06.08 06.09 07	<p>06.06 Analisis Pasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian pasar fisik dan penyerahan, posisi dan pelaporan, pengembangan kelembagaan dan produk pasar, tata tertib dan kontrak, teknologi informasi dan data.</p> <p>06.07 Pasar Fisik dan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang, pembinaan pelaku sistem resi gudang, pengawasan transaksi pasar lelang, pengawasan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang, pengawasan pengelolaan agunan dan lembaga sertifikasi.</p> <p>06.08 Bimbingan Teknis</p> <p>06.09 Evaluasi</p> <p>07 Laporan Statistik Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan statistik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.</p>
PH	URUSAN PERHUBUNGAN
01 02	<p>01 Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan mengenai Perhubungan Darat yang di dalamnya meliputi pengkajian dan pengusulan kebijakan,</p> <p>02 Perhubungan Darat</p> <p>02.01 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>a. Jaringan Transportasi Jalan :</p> <p>1) Jaringan Prasarana dan Pelayanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan prasarana dan pelayanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang b) penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C c) penetapan lokasi terminal barang utama d) standar pelayanan minimal pengoperasian terminal e) jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi f) jaringan lintas pada jaringan jalan primer g) penetapan kelas jalan primer h) kualifikasi teknis petugas terminal i) jaringan transportasi jalan sekunder <p>2) Pengembangan Transportasi Jalan : Naskah-naskah yang berkaitan dengan sarana angkutan transportasi jalan meliputi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan transformasi jalan.</p> <p>b. Sarana Angkutan Jalan</p> <p>1) Pengujian Kendaraan Bermotor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengujian tipe kendaraan bermotor meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor b. sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>c. sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor d. akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor</p> <p>2) Teknologi Kendaraan Bermotor Naskah-naskah yang berkaitan dengan teknologi kendaraan bermotor meliputi:</p> <p>a) sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor b) pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor c) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor d) harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor</p> <p>c. Lalu lintas jalan</p> <p>1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :</p> <p>a) analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan b) manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol</p> <p>2) Perlengkapan Jalan :</p> <p>a) Pedoman teknis perlengkapan jalan b) penimbangan kendaraan bermotor di jalan c) akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor d) kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor e) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional</p> <p>d. Angkutan Jalan</p> <p>1) Angkutan Penumpang :</p> <p>a) tarif angkutan penumpang kelas ekonomi b) izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara c) izin trayek antar kota antar propinsi d) izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/provinsi e) penilaian kinerja perusahaan angkutan umum f) pemberian subsidi angkutan umum g) angkutan perintis h) penghargaan Perusahaan Angkutan Umum</p> <p>2) Angkutan Barang :</p> <p>a) sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan barang b) tarif angkutan barang c) izin operasi angkutan barang tertentu d) pembinaan angkutan barang</p> <p>e. Pengendalian operasional</p> <p>1) Monitoring Operasional :</p> <p>a) pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>b) pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewangan</p> <p>2) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :</p> <p>a) Pedoman Teknis</p> <p>b) Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>c) Bimtek PPNS</p> <p>d) pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>02.02 Bina Sistem Transportasi Perkotaan</p> <p>a. Jaringan Transportasi Perkotaan</p> <p>1) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan</p> <p>2) Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p> <p>3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan</p> <p>b. Lalu Lintas Perkotaan</p> <p>1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan</p> <p>2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>3) Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah</p> <p>c. Angkutan Perkotaan</p> <p>1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek</p> <p>2) Jaringan trayek perkotaan</p> <p>3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administratif provinsi</p> <p>d. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang</p> <p>2) Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p> <p>3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administratif provinsi</p> <p>e. Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>1) Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</p> <p>2) Penanganan dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</p> <p>3) Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</p> <p>4) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota</p> <p>5) Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>6) Masterplan transportasi perkotaan</p> <p>02.03 Keselamatan Transportasi Darat</p> <p>a. Manajemen Keselamatan</p> <p>1) Monitoring dan Evaluasi :</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi data kecelakaan b) kualifikasi unit pengkajian c) pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 2) Pengembangan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> a) program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan b) harmonisasi kebijakan b. Promosi dan Kemitraan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Promosi : <ul style="list-style-type: none"> a) promosi keselamatan b) Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan c) Jalan, sungai, danau, dan penyeberangan 2) Kemitraan: <ul style="list-style-type: none"> Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan. c. Bina Keselamatan Angkutan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum 2) Keselamatan Awak Angkutan Umum keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau. d. Audit dan Inspeksi Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Audit Keselamatan: <ul style="list-style-type: none"> a) Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia b) Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau, dan penyeberangan. c) Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan. 2) Inspeksi Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> a) Pedoman Keselamatan b) Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan. c) Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan. 02.04 Lalu Lintas <ul style="list-style-type: none"> a. Lalu Lintas Antarkota : <ul style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan sinyal, tanda dan marka 2) Pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi (SIM) lalu lintas 3) Penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antar kota b. Lalu Lintas Perkotaan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan sinyal, tanda, dan marka 2) Penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA) 3) Penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api 4) Teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya 5) Pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>6) Pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api 7) Pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api 8) Penyelenggaraan, rancangan operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antar kota</p> <p>02.05 Angkutan a. Angkutan Antarkota 1) Penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan 2) Pelaksanaan penghitungan pemantauan dan evaluasi tarif 3) Kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan printis 4) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan 5) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun 6) Penetapan penempatan, pemantaun dan evaluasi kereta-kereta ekonomi b. Angkutan Perkotaan : 1) Penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan 2) Pelaksanaan penghitungan pemantaun dan evaluasi tarif 3) Kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis 4) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan</p> <p>03 Laporan Statistik Perhubungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan statistik perhubungan yang meliputi laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan</p>
PM	URUSAN PENANAMAN MODAL
01	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan.</p> <p>02 Perencanaan Penanaman Modal 02.01 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan industri agribisnis meliputi agribisnis tanaman pangan dan perkebunan, agribisnis perikanan dan perkebunan, energi terbarukan, energi tak terbarukan, sumber daya mineral logam dan non logam. 02.02 Perencanaan Industri Manufaktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan industri manufaktur mulai dari industri logam, industri tekstil dan aneka, industri kimia dasar, industri barang kimia dan farmasi, industri alat tranformasi dan industri telematika. 02.03 Perencanaan Jasa dan Kawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan jasa dan kawasan di dalamnya meliputi jasa perdagangan dan pariwisata, jasa kesehatan/pendidikan/jasa ketenagakerjaan dan jasa lainnya, kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi lainnya. 02.04 Perencanaan Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan manufaktur mulai dari infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur energi dan sumber daya air, infrastruktur transportasi laut/udara serta manufaktur lainnya.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>03.01 Deregulasi Penanaman Modal Naskah-naskah yang berkaitan dengan deregulasi penanaman modal di dalamnya meliputi sektor primer (sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor energi, sektor sumber daya mineral dan kehutanan), sektor sekunder (sektor industri logam dan mesin, sektor transportasi dan telematika, sektor agro, sektor kimia, sektor tekstil dan aneka), sektor tersier (sektor pariwisata, sektor perdagangan dan telekomunikasi, sektor perhubungan, sektor pekerjaan umum dan jasa lainnya).</p> <p>03.02 Pengembangan Potensi Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan potensi daerah mulai dari sektor primer, sektor tersier, dan sektor sekunder (sektor industri logam, mesin, transportasi/telematika, agro, kimia, tekstil, dan aneka)</p>
04	<p>03.03 Pemberdayaan Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha meliputi kegiatan pembinaan dan penyuluhan, kemitraan usaha sektor primer dan tersier, kemitraan usaha sekunder, pelayanan usaha sektor primer dan tersier, pelayanan usaha sektor sekunder.</p> <p>Promosi Penanaman Modal</p> <p>04.01 Pengembangan Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan promosi mulai dari analisis strategi target promosi, analisis strategi daya saing promosi.</p> <p>04.02 Promosi Sektoral Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi sektoral meliputi di dalamnya promosi industri sumber daya alam, promosi industri jasa dan kawasan, promosi industri manufaktur (industri logam, bahan logam, mesin dan elektronik, dan industri manufaktur lainnya), promosi infrastruktur (infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan, energi, sumber daya air, dan infrastruktur lainnya).</p> <p>04.03 Pameran dan Sarana Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pameran dan sarana promosi mulai dari penyusunan program dan monitoring pameran, penyelenggaraan dan evaluasi pameran, materi promosi media cetak, publikasi dan distribusi media cetak, materi promosi media elektronik, pelayanan informasi media elektronik.</p>
05	<p>Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>05.01 Pelayanan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan aplikasi sektor primer dan tersier (aplikasi baru, perluasan dan perubahan), aplikasi sektor sekunder (aplikasi baru, perluasan dan perubahan).</p> <p>05.02 Pelayanan Perizinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perizinan sektor primer dan tersier, perizinan sektor sekunder mulai dari perizinan pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana, Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi, Industri Mesin, industri Logam dan Barang Logam, Industri Kimia dan Barang Kimia, industri aneka.</p> <p>05.03 Pelayanan Fasilitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan fasilitas perizinan sektor primer dan tersier, sektor sekunder meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana, Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi, Industri Mesin, industri Logam dan Barang Logam, Industri Kimia dan Barang Kimia, industri aneka.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
06	<p>Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelayanan penanaman modal meliputi di dalamnya pemantauan penanaman modal, bimbingan sosialisai, fasilitasi penyelesaian masalah, pengawasan penanaman modal, pencabutan perizinan penanaman modal, dan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) di bidang penanaman modal</p>
07	<p>Laporan Statistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan statistik bulanan, triwulan, semester dan tahunan.</p>
KM	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
01	<p>Kebijakan Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi , pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan usaha Pengkajian Sumber Daya UKMK Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK
02	Monitoring dan Evaluasi
03	<p>Kelembagaan Koperasi dan UKM</p> <p>03.01 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kelembagaan Koperasi dan UKM meliputi Organisasi Koperasi dan UKM, Badan Hukum Koperasi dan UKM(Penatausahaan dan evaluasi badan hukum koperasi dan UKM), serta Penelaahan kasus hukum Koperasi dan UKM</p> <p>03.02 Peraturan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM serta dokumentasi mengenai produk dan peraturan daerah nya.</p> <p>03.03 Tatalaksana Koperasi dan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan tata laksana Koperasi Primer maupun Sekunder, tata laksana Usaha kecil maupun Usaha Menengah, dan Klasifikasi Koperasi dan UKM</p> <p>03.04 Keanggotaan Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dnegan Keanggotaan Koperasi meliputi Partisipasi Usaha dan Permodalah, Partisipasi Pengawasan (Rapat anggota dan Pengawasan), Pengembangan anggota (Kaderisasi dan Penyuluhan).</p> <p>03.05 Pengendalian dan Akuntabilitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengendalian, Bidang akuntabilitas/akuntansi dan audit, serta monitoring dan evaluasi.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>Produksi</p> <p>04.01 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Naskah-naskah yang berkaitan dengan tanaman pangan padi, tanaman pangan palawija, hortikultura buah-buahan dan tanaman obat, tanaman hortikultura tanaman hias dan sayur, termasuk sarana produksi, dan sarana pengolahan.</p> <p>04.02 Kehutanan dan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hutan produksi, hutan kemasyarakatan, perkebunan tanaman semusim dan rempah-rempah, perkebunan tanaman keras, termasuk sarana produksi dan sarana pengolahan.</p> <p>04.03 Perikanan dan Peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan (ternak besar dan kecil), termasuk sarana produksi, sarana pengolahan.</p> <p>04.04 Industri Kerajinan dan Pertambangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan industri (sandang, logam, elektronik, pangan, kimia, aneka), kerajinan (logam dan non logam), pertambangan dan migas (Pertambangan umum dan migas).</p> <p>04.05 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketenagalistrikan dan konstruksi, aneka usaha (jasa umum, angkutan), pariwisata, pos dan telekomunikasi.</p> <p>05 Pembiayaan</p> <p>05.01 Program Pendanaan Koperasi dan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program pendanaan jangka pendek, menengah, panjang, usaha mikro dan dana bergulir.</p> <p>05.02 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan dan pengendalian Kelembagaan KSP, Pengembangan dan pengendalian USP Koperasi, Pengembangan dan pengendalian USP-LKM</p> <p>05.03 Urusan Permodalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan permodalan sendiri koperasi dan UKM, Pengembangan Permodalan Luar (permodalan bank dan non bank), Pengembangan kredit program bank dan non bank.</p> <p>05.04 Asuransi dan Jasa Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Asuransi Koperasi dan UKM, Perpajakan Koperasi dan UKM, Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank dan non komersial Bank.</p> <p>05.05 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan (Modal Ventura, Sewa guna usaha dan anak piutang), Penjaminan dan asuransi kredit, Pasar modal (Obligasi dan modal penyertaan).</p> <p>05.06 Lembaga Pengelola Dana Bergulir UKM (LPDB)</p> <p>06 Pemasaran dan Jaringan Usaha</p> <p>06.01 Perdagangan Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengadaan Sektor Formal dan Informal, Distribusi Sektor Formal dan Informal, Pengembangan Sektor Formal dan Informal</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
BC	URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA
01	<p>Kebijakan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan meliputi :</p> <p>01.01 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>01.02 Penyiapan bahan</p> <p>01.03 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>01.04 Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>01.05 Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)</p>
02	<p>Potensi Pencarian dan Pertolongan</p> <p>02.01 Sarana dan Prasarana</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Rencana dan Standarisasi</p> <p>1) Perencanaan dan analisa kebutuhan</p> <p>a) Kajian Kebutuhan Peralatan</p> <p>b) Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan</p> <p>2) Standarisasi, dan Inventarisasi</p> <p>a) Standarisasi Peralatan</p> <p>b) Daftar Inventarisasi Peralatan</p> <p>b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, Laut, Udara dan Peralatan pencarian dan pertolongan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan yang meliputi manual book, jadwal pemeliharaan, dan laporan</p> <p>c. Pengawakan dan Perbekalan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <p>1) Pengawakan</p> <p>a) Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara</p> <p>b) Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara</p> <p>c) Bahan Pembinaan awak sarana darat, laut dan udara</p> <p>2) Perbekalan</p> <p>a) Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan</p> <p>b) Daftar perbekalan</p> <p>c) Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan</p> <p>d) Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan</p> <p>02.02 Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>1) Kurikulum dan Silabus</p> <p>2) Evaluasi dan Monitoring</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>06.02 Ekspor dan Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ekspor, Impor, Hubungan Perdagangan Internasional (Hubungan Perdagangan Multilateral, Regional, dan Bilateral)</p> <p>06.03 Sarana dan Prasarana Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sarana (Pengembangan Pasar Tradisional dan Pengembangan Sentra Pemasaran), Prasarana (Lembaga</p> <p>06.04 Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kemitraan, Jaringan usaha, Pengembangan kerjasama kelambagaan.</p> <p>06.05 Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM</p>
07	<p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengumpulan dan pengolahan informasi serta publikasi dan promosi.</p> <p>06.06 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM</p> <p>Pengembangan Sumber daya Manusia</p> <p>07.01 Pengembangan Kewirausahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lembaga Kewirausahaan (Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan), Penumbuhan Kewirausahaan (Peningkatan Kemampuan dan Evaluasi Kewirausahaan), Sosialisasi Kewirausahaan (Perangkat lunak dan Promori Kewirausahaan).</p> <p>07.02 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Diklat Formal dan informal, Diklat Non Formal (Perangkat lunak serta sarana dan prasarana diklat), Kerjasama Lembaga Diklat (Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah dan non Pemerintah)</p> <p>07.03 Peran Serta Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Dukungan Media Masa, LSM, dan Organisasi Profesi terhadap Koperasi dan UKM</p> <p>07.04 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi koperasi dan UKM, formal dan informal, lembaga diklat pemerintah dan non pemerintah</p> <p>07.05 Advokasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi organisasi dan manajemen, advokasi kemitraan dan teknologi, dan advokasi peraturan</p>
08	<p>Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>08.01 Produktifitas dan Mutu Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produktifitas (Inkubator teknologi dan Pengembangan klaster), Peningkatan mutu (Disain dan standarisasi), Sertifikasi/Label/Merk Produk.</p> <p>08.02 Restrukturisasi Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Restrukturisasi Manajemen, Pendanaan, Kelembagaan Koperasi dan UKM</p> <p>08.03 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan LBP/Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (asosiasi, manajemen, akreditasi LBP), Pengembangan Bisnis LBP (Peningkatan kerjasama dan Kerjasama layanan LBP), Pengembangan jaringan LBP (Kerjasama kelembagaan, sarana dan teknologi LBP).</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
08.04 08.05 09 09.01 09.02 09.03 09.04 10 11	<p>08.04 Fasilitasi Investasi UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Investasi klaster UKM agro dan non agro bisnis, Pengembangan kerjasama investasi usaha (pengembangan pangan dan non pangan), Fasilitasi investasi aneka usaha UKM (Fasilitasi investasi usaha koperasi dan UKM).</p> <p>08.05 Pengembangan Sistem Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan Fasilitasi transaksi dalam dan luar negeri, Kerjasama usaha (pertukaran koperasi dan pertukaran UKM), Jaringan komunikasi Bisnis (Komunikasi Bisnis serta Pengembangan sarana komunikasi bisnis).</p> <p>09 Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM</p> <p>09.01 Penelitian Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian Koperasi meliputi Perencanaan dan pengendalian (Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan), Penyelenggaraan (Kelembagaan koperasi dan bisnis koperasi), Tata laksana penelitian (Temu ilmiah dan pengembangan metodologi serta sarana dan prasarana).</p> <p>09.02 Penelitian UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian UKM meliputi Perencanaan dan pengendalian (Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan), Penyelenggaraan (Kelembagaan UKM dan bisnis UKM), Tata laksana penelitian (Temu ilmiah dan pengembangan metodologi serta sarana dan prasarana).</p> <p>09.03 Penelitian Sumber Daya Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian sumber daya meliputi Perencanaan dan pengendalian (Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan), Penyelenggaraan (Sumber Daya manusia dan pembiayaan), Tata Laksana Penelitian (Temu ilmiah dan pengembangan metodologi serta sarana dan prasarana).</p> <p>09.04 Pengembangan Perkaderan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan perkaderan UKM meliputi Penyuluhan (Penyelenggaraan dan Materi Penyuluhan), Perkaderan (Penilaian dan pengembangan), Kerjasama dan Jaringan (Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah)</p> <p>10 Kerjasama Intrenasional dan Hubungan Antar Lembaga</p> <p>11 Laporan Statistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan statistik meliputi Laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.</p>
KK	URUSAN KETENAGAKERJAAN
01	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan di Bidang Perencanaan Tenaga Kerja Daerah, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi:</p> <p>01.01 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>01.02 Penyiapan bahan</p> <p>01.03 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>01.04 Pengumpulan dan pengolahan data</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
01.05	Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
02	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah meliputi:
	02.01 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
	02.02 Pembinaan dan Pemantauan perencanaan Tenaga Kerja Daerah
	02.03 Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
03	Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan dan Produktivitas meliputi:
	03.01 Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
	a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	1) Penerapan Standar Kompetensi
	2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi
	3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan
	a) Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan
	b) Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan
	4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	a) Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	b) Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
	a) Program Pelatihan Ketransmigrasian
	b) Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian
	b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
	1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	a) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
	b) Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan
	2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	a) Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	b) Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas
	3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	a) Standar Mutu Lembaga Pelatihan
	b) Bimbingan Penerapan Standar Mutu
	4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Negara
	a) Sistem Pendanaan Pelatihan
	b) Kerjasama Antar Lembaga
	c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
	1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	a) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b) Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah 2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta b) Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta 3) Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> a)- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan b) Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan 4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> a) Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan b) Penyebaran Informasi Instruktur, PSM dan Tenaga Pelatihan d. Bina Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemagangan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a) Program Pemagangan dalam Negeri b) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri 2) Pemagangan Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> a) Program Pemagangan Luar Negeri b) Bimbingan dan Penyuluhan Pemaganga Luar Negeri 3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> a) Perizinan dan Rekomendasi b) Advokasi dan Perlindungan 4) Promosi dan Jenjang Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> a) Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan b) Pemagangan Jejaring Pemagangan e. Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> a) Promosi Produktivitas dan Kewirausahaan b) Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan 2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> a) Sistem dan Metode Produktivitas b) Alat dan Teknis Peningkatan Produktipitas 3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> a) Pengukuran Produktivitas b) Kajian Produktivitas 4) Pengembangan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> a) Pelatihan Mnajemen Kewirausahaan b) Bimbingan Konsultasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja meliputi:</p> <p>04.01 Pengembangan Pasar Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi Pasar Kerja dalam Negeri 2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri b. Analisis Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis Pasar Kerja dalam Negeri 2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri c. Bursa Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Bursa Kerja dalam Negeri 2) Bursa Kerja Luar Negeri d. Analisis Jabatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis dan Informasi Jabatan 2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan <p>04.02 Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Antar Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal 2) Kelembagaan Penempatan tenaga Kerja b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus <ul style="list-style-type: none"> 1) Penempatan Tenaga Khusus Muda dan Wanita 2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyuluhan Jabatan 2) Bimbingan Jabatan d. Pemberdayaan Pengantar Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kompetensi Pengantar Kerja 2) Kerjasama Antar Lembaga <p>04.03 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan Penempatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Kelembagaan 2) Evaluasi Kinerja b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI 2) Fasilitas Penyediaan TKI c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia <ul style="list-style-type: none"> 1) Advokasi dan Kepulangan 2) Sarana dan Perlindungan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> d. Kerjasama Internasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama Birateral 2) Kerjasama Regional dan Multilateral <p>04.04 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Formal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Formal <ul style="list-style-type: none"> 1) Tenaga Kerja Mandiri 2) Tenaga Kerja Sektor Informal b. Pengembangan Padat Karya <ul style="list-style-type: none"> 1) Padat Karya Pedesaan 2) Padat Karya Perkotaan c. Terapan teknologi Tepat Guna <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan Pendampingan 2) Kerjasama Antar Lembaga
	<p>04.05 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis dan Perijinan Sektor Industri <ul style="list-style-type: none"> 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa <ul style="list-style-type: none"> 1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa c. Pengendalian Kerja Sama Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian 2) Kerjasama Kelembagaan <p>04.06 Standardisasi Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi dan Registrasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Yang Berhubungan dengan Sistem Informasi dan Registrasi 2) Dokumen yang Berhubungan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja b. Pembakuan Akreditasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Yang Berhubungan dengan Kopotensi dan Akreditasi Kelembagaan Sertifikasi 2) Dokumen yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Koppensi dan Persidangan
05	<p>Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi:</p> <p>05.01 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Perusahaan 2) Perjanjian Kerja Bersama b. Perjanjian Kerja c. Kesejahteraan Pekerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Program Kesejahteraan 2) Fasilitas Kesejahteraan d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja 2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja
05.02	<p>Kelembagaan dan Pemasayarakatan Hubungan Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha <ul style="list-style-type: none"> 1) Organsasi Pekerja 2) Organisasi Pengusaha b. Kelembagaan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT 2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT c. Pemasayarakatan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial
05.03	<p>Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengupahan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penerapan Standar Pengupahan 2) Pengurusan Pengupahan b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengurusan jamsostek Dalam Hubungan Kerja 2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja
05.04	<p>Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1) Pencegahan Dini 2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial 2) Evaluasi Pelaporan c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1) fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan 2) Kelembagaan dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan
06	<p>Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi :</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>06.01 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Norma Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Waktu Waktu Istirahat 2) Pengawasan Norma Pengupahan b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja 2) Pengeawasan Norma Perlindungan Berserikat c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri 2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri 3) Pengawasan norma Kerja dan Jamsostek <p>06.02 Pengawasan norma Kerja Perempuan dan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi 2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan b. Pengawasan Norma Kerja Anak <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak 2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak c. Kerjasama Lintas Sektoral <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan 2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> 1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan 2) Advokasi Tenaga Kerja Anak <p>06.03 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana tekanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Mekanik 2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekanan b. Pengawasan Norma Kontruksi Bangunan Listrik dan Penanggulangan kebal <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Kontruksi Bangunan 2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran c. Pengawasan Norma Kesehatan kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Pelayanan kesehatan kerja 2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan kerja d. Pengawasan Norma Lingkungan kerja dab Bahan Berbahaya <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan lingkungan kerja 2) Pengawasan Norma bahan berbahaya

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> e. Pengawasan Norma Kelembagaan Kerja, keahlian sistem manajemen K3 <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3 06.04 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan 06.05 Bina Penegakan Hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan PPNS 2) Sarana dan Prasarana PPNS d. Kerjasama Penegakan Hukum <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum 2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan 07 Keselamatan dan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> 07.01 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian K3 <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis dan Standarisasi Bidang K3 2) Hasil Kajian Perekrayasaan dan Penerapan Teknologi K3 3) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3 b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3 07.02 Pengembangan SDM dan kompetensi K3 <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Daya Manusia K3 <ul style="list-style-type: none"> 1) Program, Analisa dan standarisasi Pengembangan SDM dan kompetensi K3 2) Penyebar Luasan Informasi Pengembangan SDM dan kompetensi K3 b. Kompetensi K3 <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 3) Kerjasama Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan kompetensi K3 08 Laporan Statistik Ketenagakerjaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik Ketenagakerjaan meliputi: Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>b. Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang meliputi Pengolahan Data Tenaga 2) Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang meliputi Pengolahan Data Potensi <p>c. Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) 2) Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan <p>03.01 Operasi dan Latihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Standarisasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan dan Evaluasi 2) Standarisasi Operasi dan Latihan SAR b. Penyelenggaraan Operasi SAR <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengerahan Potensi SAR 2) Pengendalian Operasi SAR 3) Evaluasi Operasi c. Siaga dan Latihan <ol style="list-style-type: none"> 1) Siaga yang meliputi laporan harian, bulanan, tahunan, dan evaluasi 2) Latihan yang meliputi Lokal, Nasional, dan Internasional <p>03.02 Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pengembangan dan Standarisasi Komunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengembangan dan standarisasi komunikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi yang meliputi analisa kebutuhan 2) Standarisasi dan Evaluasi b. Operasi Komunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan operasi komunikasi yang meliputi Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR), Operasi Peralatan c. Inventarisasi dan Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi dan pemeliharaan meliputi Inventarisasi Perangkat Komunikasi dan Pemeliharaan
04	<p>04.01 Pengembangan Sistem Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perangkat lunak dan perangkat keras</p> <p>04.02 Pelayanan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyajian dan pelayanan data informasi serta laporan dan pembuatan dokumentasi (data base)</p> <p>04.03 Data Statistik Kebencanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan</p> <p>04.04 Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pengawasan meliputi Pengawasan Kinerja, Keuangan, dan Pengawasan Kebencanaan untuk tujuan tertentu</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
05	<p>Penanggulangan Bencana</p> <p>05.01 Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <p>a. Identifikasi Potensi Bencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan Identifikasi Potensi Bencana meliputi Evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan Mitigasi bencana.</p> <p>b. Pengurangan Resiko Bencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengurangan Resiko Bencana meliputi Pencegahan (pengkajian resiko dan pengelolaan resiko) dan Mitigasi (Mitigasi Struktur dan Mitigasi non Struktural)</p> <p>c. Organisasi Sistem dan Prosedur Naskah-naskah yang berkaitan dengan Organisasi Sistem dan Prosedur meliputi Fasilitasi Data base Daerah Rawan Bencana, Koordinasi, serta Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</p> <p>d. Peringatan Dini Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peringatan Dini meliputi Peringatan Dini (pemanduan sistem jaringan, pemantauan dan peringatan), Perencanaan Siaga (kebutuhan dan potensi sumber daya, penerapan rencana strategis), Penyiapan Sumber Daya (penyediaan dan penyiapan sumber daya, pengendalian)</p> <p>e. Pemberdayaan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Peran Lembaga Usaha (Usaha Padat Modal dan Karya), peran</p> <p>f. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana meliputi Bidang Pencegahan</p> <p>05.02 Penanganan Darurat</p> <p>a. Tanggap Darurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanggap Darurat meliputi Perencanaan Darurat (Pendataan darurat dan Perencanaan Operasi), Pengendalian Operasi (Pengorganisasian Pos Komando, Sarana dan Prasarana Pos Komando), Penyelamatan dan Evakuasi (Penyelamatan dan Evakuasi)</p> <p>b. Bantuan Darurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bantuan Darurat meliputi Bantuan Sandang dan Pangan, Bantuan Kesehatan dan Air Bersih, Bantuan Hunian Sementara (Pembangunan hunian sementara, pendukung hunian sementara)</p> <p>c. Perbaikan Darurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perbaikan Darurat meliputi Pembersihan Lingkungan (Penyiapan Peralatan dan Angkutan), Perbaikan Sarana Vital (Prasarana Sosial dan Ekonomi), Pemantauan dan Pelaporan</p> <p>05.03 Logistik dan Peralatan</p> <p>a. Logistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Logistik meliputi Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi</p> <p>b. Peralatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peralatan meliputi Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan (Analisis Kebutuhan dan Pengadaan),</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>c. Sarana dan Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana meliputi Evaluasi Standarisasi Aplikasi Peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Evaluasi Pengembangan Informasi serta Teknologi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>05.04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>a. Penilaian Kerusakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Kerusakan meliputi Inventarisasi Kerusakan (Inventarisasi Fisik dan sosial Ekonomi),</p> <p>b. Pemulihan dan Peningkatan Fisik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemulihan dan Peningkatan Fisik meliputi Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum, Rehabilitasi</p> <p>c. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi meliputi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya dan</p> <p>d. Penanganan Pengungsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi, Penempatan Pengungsi (Pemulangan dan Repatriasi, Relokasi/Pengalihan)</p> <p>05.05 a. Logistik dan Peralatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis inventarisasi kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan dan distribusi</p> <p>b. Peralatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis inventarisasi kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan</p> <p>06 Data Statistik Kebencanaan</p> <p>a. Laporan Statistik Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</p> <p>b. Laporan Statistik Tahunan</p>
PD	URUSAN PENDIDIKAN
01	<p>Kebijakan</p> <p>01.01 Kebijakan Bersifat Pengaturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar dan menengah</p> <p>01.02 Kebijakan Bersifat Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan yang bersifat Penetapan termasuk di dalamnya Pengkajian dan pengusulan penetapan, Penyiapan bahan, Perumusan Penetapan, Pemberian amsukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan, dan Penetapan dalam bentuk keputusan</p> <p>02 Pembinaan Pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Pendidikan:</p> <p>02.01 Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal</p> <p>a. PAUD</p> <p>1) Penyelenggaraan program meliputi Uji kompetensi, Penilaian dan Penetapan Kinerja Lembaga Pendidikan Usia Dini</p> <p>2) Bahan ajar</p> <p>3) Pelatihan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>4) Block Grant 5) Sosialisasi 6) Peringatan Hari Anak Nasional</p> <p>b. Pendidikan Masyarakat</p> <p>1) Penyelenggaraan program meliputi Bahan ajar dan Penyusunan Majalah 2) Pemberian bantuan sosial meliputi Penilaian proposal dan Pemberian Bansos 3) Pembinaan program meliputi Temu koordinasi, Bintek program/pendampingan, dan Peningkatan kapasitas kelembagaan 4) Lomba, penghargaan, dan anugerah 5) Peringatan Hari Anak Internasional 6) Pameran/publikasi/sosialisasi</p> <p>c. Kursus dan pelatihan</p> <p>1) Penyelenggaraan program</p> <p>a) Uji kompetensi (akreditasi) b) Penilaian dan penetapan kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) c) Pendataan lembaga kursus dan pelatihan d) Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra</p> <p>2) Pemberian bantuan sosial 3) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya 4) Standar kursus dan pelatihan meliputi Kurikulum dan Bahan Ajar 5) Lomba lembaga kursus berprestasi 6) Publikasi dan promosi kursus 7) Sertifikasi</p> <p>d. Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>1) Bahan ajar 2) Block grant 3) Sosialisasi (modul) 4) Data pendidik dan tenaga kependidikan 5) Data Induk Siswa</p> <p>02.02 Pendidikan Dasar</p> <p>a. Sekolah Dasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kurikulum, Bahan Ajar, Pelatihan, Block Grant, Bimbingan teknis/sosialisasi, Lomba/sayembara/festival, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, Data Induk Siswa untuk Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendataan Siswa SD, Usulan bantuan kegiatan siswa, Lomba OSN, Lomba Lintas PAI, Lomba O2SN, Lomba FL2SN, Lomba UKS, Lomba SD Sehat, Laporan Kesiswaan SD</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK meliputi Bahan ajar, Petunjuk teknis, Block grant, Sosialisasi, Lomba/sayembar/festival/gebyar/jambore, Kurikulum/bahan pembelajaran, Pendataan, Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, Pendidikan inklusi, Block grant, Bimbingan teknis/sosialisasi, Lomba/sayembara/festival, gebyar, jambore), Sertifikat Piagam Kejuaran, Ijin Memimpin Sekolah Swasta, Berita Acara Serah Terima Barang, Penghapusan Ijazah</p> <p>c. Pendidikan khusus-Layanan khusus/PK-LK</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendataan dan pemetaan 2) Pembinaan guru dan tenaga kependidikan 3) Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) 4) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah 5) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 6) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 7) Block grant 8) Bimbingan teknis/sosialisasi 9) Data Induk Siswa <p>d. Kurikulum</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbukuan meliputi Penyusunan standar mutu buku, Pengumpulan naskah, Penilaian mutu buku dan pemilihan, Persetujuan dan pengesahan naskah, Penerbitan/pencetakan, Master buku/naskah yang dicetak, Distribusi buku, Pengembangan Naskah, Pengkajian buku</p> <p>e. Perbukuan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbukuan meliputi Penyusunan standar mutu buku, Pengumpulan naskah, Penilaian mutu buku dan pemilihan, Persetujuan dan pengesahan naskah, Penerbitan/pencetakan, Master buku/naskah yang dicetak, Distribusi buku, Pengembangan Naskah, Pengkajian buku</p> <p>f. Penilaian Pendidikan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pendidikan meliputi Penilaian akademik, non akademik, analisis dan sistem informasi penilaian</p> <p>03 Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p> <p>03.01 Pengembangan dan perlindungan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan perlindungan bahasa meliputi Pengkajian bahasa dan sastra b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa meliputi Pembakuan dan perlindungan c. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan perlindungan bahasa meliputi Informasi dan publikasi <p>03.02 Pembinaan dan pemasyarakatan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemasyarakatan bahasa meliputi Penyuluhan dan Bantuan Teknis</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>03.03 Pembelajaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa meliputi Proses pembelajaran dan Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan</p> <p>03.04 Peningkatan dan pengendalian Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa meliputi Peningkatan fungsi dan peran serta Pengendalian penggunaan bahasa</p> <p>04 Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan</p> <p>04.01 Pengembangan profesi pendidik a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan kompetensi meliputi Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal, b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sertifikasi meliputi Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, informal, pendidik pendidikan</p> <p>04.02 Pengembangan tenaga kependidikan a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik serta pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan tenaga kependidikan melalui Evaluasi yang meliputi Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik serta pimpinan dan pegawai</p> <p>04.03 Pengembangan SDM kebudayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan SDM kebudayaan meliputi Program dan Evaluasi Peningkatan kompetensi dan sertifikasi</p> <p>04.04 Penjaminan mutu pendidikan a. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemetaan mutu melalui Penjaminan mutu paud, nonformal, informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah tingkat pertama b. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Informasi melalui Penjaminan mutu paud, nonformal, informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah tingkat pertama</p> <p>04.05 Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman Proposal/TOR/KAK</p> <p>04.06 Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi</p> <p>04.07 Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi</p> <p>04.08 Penyaluran block grant pasca bencana</p> <p>04.09 Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional</p> <p>05 Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan</p> <p>05.01 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film melalui Perancangan dan produksi serta Penyiaran dan pengendalian</p> <p>05.02 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web meliputi Perancangan dan produksi serta Aplikasi dan Pengendalian</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
06	<p>05.03 Pengembangan jejaring</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan jejaring melalui Pengkajian dan perancangan serta Pemeliharaan dan Pengendalian</p> <p>06 Data dan Statistik Pendidikan</p> <p>06.01 Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan validasi dan integrasi data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan</p> <p>06.02 Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan validasi dan integrasi data satuan pendidikan dan proses pembelajaran</p> <p>06.03 Pendayagunaan dan pelayanan data serta statistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak, statistik pendidikan dasar dan menengah</p> <p>07 Monitoring dan Evaluasi</p> <p>08 Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data statistik pendidikan dan kebudayaan meliputi laporan statistik bulanan, triwulan, semester, tahunan</p> <p>09 Bidang Kebudayaan</p> <p>09.01 Penghargaan untuk tokoh Seniman/Budayawan</p> <p>09.02 Rekomendasi Proposal Pengajuan Bantuan</p>
PR	URUSAN PARIWISATA
01	<p>Kebijakan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi :</p> <p>01.01 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>01.02 Penyiapan bahan</p> <p>01.03 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>01.04 Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>01.05 Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)</p> <p>02 Pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <p>02.01 Perancangan destinasi dan investasi Pariwisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perancangan destinasi dan investasi Pariwisata meliputi:</p> <p>a. Kawasan pengembangan destinasi dan investasi Pariwisata</p> <p>b. Kawasan pengembangan Destinasi pariwisata (perancangan destinasi Pariwisata)</p> <p>c. Pengembangan zona kreatif</p> <p>1) Zona kreatif berbasis seni dan budaya</p> <p>2) Zona kreatif berbasis media, desain, dan IPTEK</p> <p>d Inventasi Pariwisata</p> <p>1) Pengembangan potensi investasi</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>2) Promosi investasi</p> <p>02.02 Pengembangan Daya Tarik Wisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan daya tarik wisata meliputi Bimtek daya tarik wisata, Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata, Pengembangan daya tarik wisata kota pustaka, Penilaian kelayakan tugas pembantuan, serta Penghargaan pengelolaan daya tarik wisata (Cipta Award)</p> <p>02.03 Industri Pariwisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan Industri Pariwisata meliputi:</p> <p>a. Sarana Pariwisata</p> <p>1) Usaha daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata</p> <p>2) Penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa</p> <p>b. Jasa Pariwisata:</p> <p>1) Jasa transportasi wisata</p> <p>2) Jasa informasi Pariwisata</p> <p>3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</p> <p>4) Jasa perjalanan wisata</p> <p>5) Jasa konsultan Pariwisata</p> <p>6) Jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan</p> <p>7) Insentif</p> <p>8) Konvensi</p> <p>9) Pameran</p> <p>c. Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja</p> <p>02.04 Pemberdayaan masyarakat destinasi Pariwisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat destinasi Pariwisata meliputi Perancangan dan pemantauan pemberdayaan Pariwisata, Peningkatan kapasitas masyarakat desa serta Kemitraan dan kelembagaan Masyarakat</p> <p>02.05 Pengembangan Wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan event Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan event meliputi:</p> <p>a. Pengembangan wisata kuliner dan belanja</p> <p>b. Pengembangan rekreasi dan hiburan</p> <p>1) Pengembangan wisata spa dan kesehatan</p> <p>2) Pengembangan wisata olahraga</p> <p>c. Pengembangan wisata alam dan budaya</p> <p>d. Pengembangan wisata konvensi, insentif dan event</p> <p>03 Pemasaran Pariwisata</p> <p>03.01 Pengembangan pasar dan informasi Pariwisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan pasar dan informasi Pariwisata meliputi:</p> <p>a. Informasi pasar dalam negeri</p> <p>1) Informasi pasar Pariwisata dalam negeri</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Diseminasi informasi pasar Pariwisata dalam negeri b. Informasi pasar luar negeri <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi pasar Pariwisata luar negeri 2) Diseminasi informasi pasar Pariwisata luar negeri c. Hubungan lembaga Pariwisata dan widya wisata <ul style="list-style-type: none"> 1) Hubungan lembaga Pariwisata 2) Widya wisata d Perancangan pemasaran Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> 1) Perancangan pemasaran dalam negeri 2) Perancangan pemasaran luar negeri <p>03.02 Promosi Pariwisata luar negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan Promosi Pariwisata luar negeri meliputi wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik serta Eropa</p> <p>03.03 Promosi Pariwisata dalam negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan Promosi Pariwisata dalam negeri</p> <p>03.04 Pencitraan Indonesia Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencitraan Indonesia meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencitraan indonesia <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pencitraan Indonesia 2) Pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia b. Komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, dan media ruang <ul style="list-style-type: none"> 1) Promosi media 2) Sarana dan distribusi media c. Kerja sama dan kemitraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama dan kemitraan antar lembaga pemerintah 2) Kerjasama dan kemitraan antar lembaga non-pemerintah <p>03.05 Promosi konvensi,insentif, event, dan minat khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Promosi konvensi,insentif, event, dan minat khusus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi KIE korporasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Korporasi dalam negeri 2) Korporasi luar negeri b. Promosi KIE pemerintah dan non pemerintah <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah 2) Non pemerintah c. Promosi minat khusus <ul style="list-style-type: none"> 1) Wisata bahari 2) Wisata non bahari

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya</p> <p>04.01 Pengembangan Industri Perfilman</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Industri Perfilman <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi usaha perfilman 2) Fasilitasi kegiatan perfilman b. Festival dan Eksebisi Film <ul style="list-style-type: none"> 1) Festival film 2) Eksebisi Film c. Produksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan konten dan Lokasi Film 2) Pelayanan produksi film d. Pemasaran Film <ul style="list-style-type: none"> 1) Distribusi film 2) Pertunjukan film <p>04.02 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan seni pertunjukan dan industri musik <ul style="list-style-type: none"> 1) Kreasi dan produksi seni pertunjukan 2) Fasilitasi pengembangan seni pertunjukan b. Pengembangan Industri Musik <ul style="list-style-type: none"> 1) Kreasi dan produksi musik 2) Fasilitasi pengembangan industri musik c. Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik d. Infrastruktur dan Dokumantasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan 2) Dokumentasi dan publikasi <p>04.03 Pengembangan seni Rupa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan Fotografi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kreasi dan produksi karya seni 2) Fasilitasi pengembangan seni pertunjukan b. Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Distribusi dan komersialisasi karya seni rupa 2) Apresiasi karya seni rupa <p>05 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</p> <p>05.01 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan film animasi dan komik b. Pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi c. Pengembangan karya kreatif audio dan video

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan karya kreatif periklanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Iklan cetak 2) Iklan Elektronik 05.02 Desain dan Arsitektur <ul style="list-style-type: none"> a. Arsitektur dan desain interior b. Komunikasi visual <ul style="list-style-type: none"> 1) desain grafis 2) Desain non busana c. Desain produk dan kemasan d. Mode desain busana dan non busana 05.03 Kerjasama dan Fasilitasi <ul style="list-style-type: none"> a. Lisensi teknologi <ul style="list-style-type: none"> 1) pengembangan teknologi 2) Pemanfaatan teknologi b. Sentra inovasi dan inkubator bisnis <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sentra teknologi 2) Pengembangan inkubator bisnis c. Sentra kreatif <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sentra kreatif 2) Pengelolaan sentra kreatif d. Akses dan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Akses pembiayaan bank 2) Akses pembiayaan non bank 06 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> 06.01 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pariwisata Meliputi Program dan Evaluasi, data dan Publikasi 06.02 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif Meliputi Program dan Evaluasi, data dan Publikasi 06.03 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Meliputi Program dan Evaluasi 06.04 kompetensi kepariwisataan dan Ekonomi kreatif Meliputi Program dan Evaluasi
BD	URUSAN KEBUDAYAAN
01	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman <ul style="list-style-type: none"> 01.01 Registrasi Nasional <ul style="list-style-type: none"> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Registrasi Nasional meliputi Pendaftaran dan penetapan serta Pengelolaan data 01.02 Pelindungan <ul style="list-style-type: none"> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelindungan kebudayaan meliputi perijinan dan pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran 01.03 Pengembangan dan Pemanfaatan <ul style="list-style-type: none"> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dan permuseuman meliputi pengembangan dan pemanfaatan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
02	<p>01.04 Ekspolari dan Dokumentasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dan permuseuman meliputi eksplorasi cagar budaya serta dokumentasi cagar</p> <p>02 Pembinaan Kesenian dan Perfilman</p> <p>02.01 Pembinaan Seni Pertunjukkan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan seni pertunjukan meliputi seni pertunjukkan tradisional dan nontradisional</p> <p>02.02 Pembinaan Seni Rupa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan seni rupa murni maupun terapan</p> <p>02.03 Pembinaan Literasi dan Apresiasi Film Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan literasi dan apresiasi film</p>
03	<p>02.04 Dokumentasi dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi serta publikasi seni dan film</p> <p>03 Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi</p> <p>03.01 Kelembagaan dan Kepercayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan dan kepercayaan meliputi pemberdayaan lembaga dan hubungan antar lembaga.</p> <p>03.02 Komunitas Kepercayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan komunitas kepercayaan meliputi komunitas dan upacara adat</p> <p>03.03 Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional meliputi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya</p> <p>03.04 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lingkungan budaya dan pranata sosial</p>
04	<p>04 Sejarah dan Nilai Budaya</p> <p>04.01 Sejarah Naskah-naskah yang berkaitan dengan sejarah meliputi penggalian sumber sejarah dan penulisan sejarah</p> <p>04.02 Pemetaan Nilai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemetaan serta klasifikasi sejarah dan nilai budaya</p> <p>04.03 Verifikasi dan Perumusan Nilai Naskah-naskah yang berkaitan dengan sejarah dan nilai budaya meliputi verifikasi dan perumusan nilai</p> <p>04.04 Dokumentasi dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi serta publikasi sejarah dan nilai budaya</p>
05	<p>05 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya</p> <p>05.01 Internalisasi Nilai Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Internalisasi nilai budaya meliputi pengemasan dan penanaman nilai budaya</p> <p>05.02 Kekayaan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kekayaan budaya meliputi pencatatan dan penetapan kekayaan budaya</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
05.03	Warisan Budaya Nasional dan Dunia Naskah-naskah yang berkaitan dengan warisan budaya nasional dan dunia meliputi warisan budaya benda dan tak benda
05.04	Diplomasi Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan diplomasi budaya meliputi diplomasi dalam dan luar negeri
06	Arkeologi 06.01 Program dan Kerjasama Penelitian Naskah-naskah yang berkaitan dengan arkeologi meliputi program dan kerja sama penelitian 06.02 Data dan Informasi Penelitaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan arkeologi meliputi data dan informasi penelitian
EK URUSAN EKONOMI KREATIF	
01	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya meliputi: 01.01 Pengembangan Industri Perfilman Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Perfilman meliputi: a. Fasilitasi industri perfilman (Fasilitasi usaha perfilman dan Fasilitasi kegiatan perfilman) b. Festival dan eksibisi film (Festival film dan Eksibisi film) c. Produksi (Pengembangan konten dan lokasi film dan Pelayanan produksi film) d. Pemasaran film (Distribusi film dan Pertunjukan film) 01.02 Pengembangan Seni Pertunjukkan dan Industri Musik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Seni Pertunjukkan dan Industri Musik meliputi: a. Pengembangan seni pertunjukkan dan industri musik (Kreasi dan Produksi seni pertunjukkan, dan Fasilitasi pengembangan seni pertunjukkan) b. Pengembangan industri musik (Kreasi dan produksi musik, dan Fasilitasi pengembangan industri musik) c. Pemasaran seni pertunjukkan dan industri musik d. Infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukkan dan industri musik (Pengembangan sarana dan prasarana pertunjukkan dan Dokumentasi dan publikasi) 01.03 Pengembangan Seni Rupa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Seni Rupa meliputi: a. Pengembangan seni rupa murni, seni rupa terapan fotografi (Kreasi dan produksi karya seni, dan Fasilitasi pengembangan seni) b. Pemasaran dan pengembangan apresiasi (Distribusi dan komersialisasi karya seni rupa, dan Apresiasi karya seni rupa) 02 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi: 02.01 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media meliputi:

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan film animasi dan komik b. Pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi c. Pengembangan karya kreatif audio dan video d. Pengembangan karya kreatif periklanan (Desain Grafis dan Iklan elektronik) <p>02.02 Desain dan Arsitektur Naskah-naskah yang berkaitan dengan Desain dan Arsitektur meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Arsitektur dan desain interior b. Komunikasi visual (Desain Grafis dan Komunikasi visual) c. Desain produk dan kemasan d. Mode (Desain busana dan Desain non busana) <p>02.03 Kerjasama dan Fasilitasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kerjasama dan Fasilitasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lisensi teknologi (Pengembangan teknologi dan Pemanfaatan teknologi) b. Sentra inovasi dan inkubator bisnis (Pengembangan sentra inovasi dan Pengembangan inkubator bisnis) c. Sentra kreatif (Pengembangan sentra kreatif dan Pengelolaan sentra kreatif) d. Akses pembiayaan (Akses pembiayaan Bank dan Akses pembiayaan non Bank) <p>03 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:</p> <p>03.01 Penelitian dan Pengembangan kebijakan kepariwisataan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan kebijakan kepariwisataan meliputi Program dan evaluasi serta Data dan publikasi</p> <p>03.02 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif meliputi Program dan evaluasi serta Data dan publikasi</p> <p>03.03 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi Program dan evaluasi serta Penyelenggaraan dan kerjasama</p> <p>03.04 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kompetensi Kepariwisata dan ekonomi kreatif meliputi Program dan evaluasi serta Evaluasi dan Kerjasama</p>
PO	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
01	<p>Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan pemuda dan olah raga meliputi kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda, pengembangan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
02	<p>Pemberdayaan Pemuda</p> <p>02.01 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda termasuk di dalamnya penelusuran (Potensi lokal, Nasional dan Internasional), pengkajian dan pengembangan potensi (potensi lokal, nasional dan internasional)</p> <p>02.02 Peningkatan Wawasan Pemuda Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Wawasan Pemuda termasuk di dalamnya Wawasan kebangsaan (Program dan Evaluasi), Wawasan Lingkungan (Program dan Evaluasi), Wawasan Sosial dan Hukum (Program dan Evaluasi)</p> <p>02.03 Peningkatan Kapasitas Pemuda Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemuda meliputi Kapasitas Iman dan Taqwa (Program dan Evaluasi), kapasitas IPTEK (Program dan Evaluasi), pemanfaatan IPTEK (Program dan Evaluasi)</p> <p>02.04 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni kepemudaan) Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas pemuda (pemetaan kreativitas/seni kepemudaan) meliputi Pengkajian (Program dan Evaluasi), Pengembangan (Program dan Evaluasi) dan Pendayagunaan/fasilitas (Program dan Evaluasi)</p> <p>03 Pengembangan Pemuda</p> <p>03.01 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Naskah-naskah yang berkaitan program dan evaluasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda meliputi Kepemimpinan (Program dan Evaluasi)</p> <p>03.02 Kewirausahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kewirausahaan meliputi Kelembagaan (Program dan Evaluasi), Pengaderan (Program dan Evaluasi) dan</p> <p>03.03 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan meliputi Organisasi Kepemudaan/kelembagaan dan sumberdaya (Program dan Evaluasi), Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa (Program dan Evaluasi), Pemberdayaan Organisasi</p> <p>03.04 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda Naskah-naskah yang berkaitan dengan standarisasi dan infrastruktur termasuk di dalamnya Standarisasi (Organisasi Kepemudaan, Prasarana dan sarana Kepemudaan, Infrastruktur) dan Infrastruktur Pemuda (Prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan)</p> <p>03.05 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Naskah-naskah yang berkaitan dengan kemitraan dan penghargaan pemuda termasuk di dalamnya Kemitraan dan penghargaan pemuda (lintas sektoral, daerah dan luar negeri) dan Penghargaan Pemuda (Pengembangan penghargaan kepemudaan dan Pengembangan promosi kepemudaan)</p> <p>04 Pembudayaan Olahraga</p> <p>04.01 Pengelolaan Olahraga Pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Olahraga Pendidikan meliputi Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah (Pengembangan dan Evaluasi), Olahraga Pendidikan Tinggi (Pengembangan dan Evaluasi) dan Olahraga Pendidikan Non formal dan Informal (Pengembangan dan Evaluasi)</p> <p>04.02 Pengelolaan Olahraga Rekreasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Olahraga Rekreasi meliputi Olahraga Massal (Pengembangan dan Evaluasi), Olahraga Tradisional (Pengembangan dan Evaluasi) dan Olahraga Petualangan/tantangan dan wisata (Pengembangan dan Evaluasi)</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>04.03 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga meliputi Sentra Olahraga (olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi), pengembangan dan evaluasi</p> <p>04.04 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus meliputi Olahraga Tradisional (lokal dan nasional), dan Layanan Khusus (olahraga usia dini dan lansia serta olahraga penyandang cacat)</p> <p>04.05 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga meliputi Kemitraan Keolahragaan (Lintas sektoral, daerah, luar negeri) dan Penghargaan Olahraga (Penelusuran, penyelenggaraan)</p>
05	<p>Peningkatan Prestasi Olahraga</p> <p>05.01 Pembibitan Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembibitan Olahraga meliputi Pemandu bakat (Penelusuran bakat, penelaahan bakat), Pengembangan olahragawan berbakat (program, evaluasi) dan Kompetisi (Nasional dan internasional)</p> <p>05.02 IPTEK Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan IPTEK Olahraga meliputi Penerapan (identifikasi dan kajian, pendayagunaan, evaluasi dan desiminasi) dan Pengembangan</p> <p>05.03 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan</p> <p>a. Tenaga Keolahragaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tenaga Keolahragaan meliputi Pengembangan Pelatih dan Instruktur (Nasional, Provinsi dan</p> <p>b. Organisasi Keolahragaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Organisasi Keolahragaan meliputi Pendidikan dan rekreasi, Olahraga prestasi (kelembagaan dan</p> <p>05.04 Industri dan Promosi Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Industri dan Promosi Olahraga meliputi Industri Olahraga (Jasa olahraga, produk olahraga dan</p> <p>05.05 Olahraga Prestasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Olahraga Prestasi meliputi Daerah (Pengembangan, pekan dan kejuaraan olahraga), Nasional</p> <p>05.06 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga</p> <p>a. Standardisasi Keolahragaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standardisasi Keolahragaan meliputi Olahraga prestasi, olahraga Pendidikan dan Rekreasi</p> <p>b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan meliputi Olahraga Prestasi, olahraga Pendidikan dan Rekreasi</p> <p>c. Infrastruktur Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Infrastruktur Olahraga meliputi Prasarana dan Sarana olahraga Pendidikan, Prasarana dan Sarana olahraga Rekreasi serta Prasarana dan Sarana olahraga Prestasi</p>
06	<p>Laporan Statistik Kepemudaan dan Olah Raga Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Statistik Kepemudaan dan Olahraga meliputi Laporan Statistik Triwulan, Semester dan Tahunan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
PU	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01	Kebijakan Bidang Pekerja Umum 01.01 Pengairan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengairan meliputi Pembangunan baru, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan. 01.02 Jalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jalan meliputi Pembangunan baru, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan. 01.03 Jembatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jembatan meliputi Pembangunan baru, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan. 01.04 Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bangunan meliputi Pembangunan baru, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan.
02	Rencana Umum Tata Ruang Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang meliputi Master Plan, Block Plan, dan Detail Plan.
03	Standardisasi Kriteria Teknis Bidang Pekerjaan Umum 03.01 Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bangunan meliputi Spesifikasi teknis, Pedoman/prosedur, Manual teknis, dan Manual pelaksanaan. 03.02 Pengairan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengairan meliputi Spesifikasi teknis, Pedoman/prosedur, Manual teknis, dan Manual pelaksanaan. 03.03 Jalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jalan meliputi Spesifikasi teknis, Pedoman/prosedur, Manual teknis, dan Manual pelaksanaan. 03.04 Jembatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jembatan meliputi Spesifikasi teknis, Pedoman/prosedur, Manual teknis, dan Manual pelaksanaan.
04	Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum
05	Perijinan 05.01 Perijinan Bidang Pekerjaan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perijinan Bidang Pekerjaan Umum meliputi Ijin Mendirikan bangunan, Pemborongan Pembangunan, Penggunaan Bangunan, Pembangunan Tanggul, Pengambilan dan Pembuangan air, Pembangunan sumur bor, Proyek air minum, Pemanfaatan tanah daratan, serta Penggunaan jalan dan sejenisnya. 05.02 Penolakan permohonan perijinan 05.03 Keringanan pemberian ijin 05.04 Pembatalan ijin
06	Tata Kota Perkotaan 06.01 Kebijakan pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan penempatan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan daerah meliputi Kawasan Perdagangan, Industri, Perumahan, Rekreasi serta Kawasan ruang Terbuka Hijau (tertuang dalam RDTH)

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
06.02	Investasi Daerah/kawasan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Investasi Daerah/kawasan meliputi Perdagangan, Industri, Perumahan, dan Rekreasi (Hanya merencanakan zona perdagangan, industri dan lain-lain)
06.03	Data Statistik Pembangunan Perkotaan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Statistik Pembangunan Perkotaan meliputi Pemerintah dan Pribadi
06.04	Pengawasan Pembangunan Perkotaan (berupa Fatwa)
06.05	Laporan
07	Bangunan
07.01	Gambar/Rencana Bangunan
07.02	Inventarisasi Bangunan Milik Pemerintah
07.03	Konsultasi bangunan
07.04	Data bahan bangunan
07.05	Laporan
08	Pemborong Kontraktor Bangunan Daerah
08.01	Tender
08.02	Prakualifikasi
08.03	Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya
08.04	Swakelola
08.05	Laporan
09	Pengairan
09.01	Pembangunan Pengairan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembangunan Pengairan meliputi Bangunan Pengairan Waduk, Bangunan Pembagi, Saluran dan Tanggul dan Saluran Drainage
09.02	Pemeliharaan dan Renovasi
	Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan dan Renovasi meliputi Bangunan Pengairan Waduk, Bangunan Pembagi, Saluran dan Tanggul dan Saluran Drainage
09.03	Penertiban/Penanganan kasus-kasus
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penertiban/Penanganan Kasus-kasus meliputi Bangunan Pengairan Waduk, Bangunan Pembagi, Saluran dan Tanggul, Sakuran Drainage, serta Pembuangan Air Kotor dan Limbah
09.04	Inventarisasi Areal Bangunan Pengairan dan Sungai
09.05	Laporan
11	Jalan
12.01	Pembangunan/Pembuatan Jalan meliputi, Kabupaten serta Jalan Desa/Perkebunan
12.02	Pemeliharaan jalan
12.03	Penyediaan Lokasi Jalan
12.04	Pelebaran dan Pemindahan Jalan
12.05	Pengawasan Jalan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
13	12.06 Data dan Statistik Jalan 12.07 Laporan Jembatan 13.01 Pembangunan/Pembuatan Jembatan meliputi, Jembatan Negara, Provinsi, Kabupaten serta Jembatan Desa/Perkebunan 13.02 Pemeliharaan Jembatan Sementara gantung, Jembatan Penyebrangan 13.03 Penyediaan Lokasi Jembatan 13.04 Pelebaran dan Pemindahan Jembatan 13.05 Pengawasan Jembatan 13.06 Data dan Statistik Jembatan 13.07 Laporan
PK	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 01.01 Air Minum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Air Minum meliputi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota 01.02 Air Limbah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Air Limbah meliputi Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah di daerah Kabupaten/Kota 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 02.01 Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perumahan meliputi : a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 02.02 Kawasan Permukiman Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kawasan Permukiman meliputi : a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 02.03 Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh meliputi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota 02.04 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) meliputi Penyelenggaraan PSU Perumahan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>02.05 Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasara, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil</p> <p>03 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</p> <p>03.01 Rekomendasi Izin Lokasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rekomendasi Izin Lokasi meliputi Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</p> <p>03.02 Sengketa Tanah Garapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sengketa Tanah Garapan meliputi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>03.03 Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan meliputi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>03.04 Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan Tanah <i>Absentee</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan Tanah <i>absentee</i> meliputi Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah Kabupaten/Kota</p> <p>03.05 Tanah Ulayat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanah Ulayat meliputi Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota</p> <p>03.06 Tanah Kosong Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanah Kosong meliputi Penyelesaian masalah Tanah Kosong dalam daerah Kabupaten/Kota serta Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Kabupaten/Kota</p> <p>03.07 Izin Membuka Tanah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Izin Membuka Tanah meliputi Penerbitan Izin Membuka Tanah</p> <p>03.08 Penggunaan Tanah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penggunaann Tanah meliputi Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupat</p>
PN	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KB	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	<p>Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>01.01 Ketahanan Ideologi Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara meliputi Penguatan Ideologi Negara dan Implementasi Ideologi Negara.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>01.02 Wawasan Kebangsaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Wawasan kebangsaan meliputi Penguatan wawasan kebangsaan, Pembinaan dan sosialisasi, serta Implementasi.</p> <p>01.03 Bela Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bela Negara meliputi Pendidikan dan Pemberdayaan bela negara.</p> <p>01.04 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penguatan nilai-nilai sejarah, Implementasi nilai-nilai sejarah, dan Penerbitan rekomendasi penilaian.</p>
02	<p>01.05 Pembauran dan Kewarganegaraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembauran dan Kewarganegaraan meliputi Pembinaan pembauran kebangsaan, Pembinaan</p> <p>02 Kewaspadaan Nasional</p> <p>02.01 Fasilitas dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan</p> <p>02.02 Fasilitas Bina Masyarakat perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan</p> <p>02.03 Fasilitas dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintah</p> <p>02.04 Fasilitas dan Laporan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>02.05 Pedoman Kewaspadaan Nasional</p> <p>02.06 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi pengawasan orang asing dan lembaga asing meliputi Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing serta Surat Pemberitahuan penelitaian orang asing.</p> <p>03 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan</p> <p>03.01 Ketahanan Seni Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ketahanan seni meliputi Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian serta Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian.</p> <p>03.02 Ketahanan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketahanan budaya meliputi Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan serta Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan.</p> <p>03.03 Agama dan Kepercayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Agama dan Kepercayaan meliputi Fasilitasi, Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten, Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan, Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan.</p> <p>03.04 Organisasi Kemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat meliputi Pendaftaran Ormas dan Database Ormas, Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan ORMAS/LNL, Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi, Fasilitasi Sengketa Ormas, Fasilitasi Ormas.</p> <p>03.05 Masalah sosial Kemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Masalah Sosial Kemasyarakatan.</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	<p>Politik Dalam Negeri</p> <p>04.01 Implementasi Kebijakan Politik</p> <p>04.02 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi b. Partai Politik yang tidak Memperoleh Kursi c. Pemerintah Daerah d. Database Parpol <p>04.03 Pendidikan Budaya Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan budaya politik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Politik b. Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Politik c. Modul Sebagai Sarana Penyelenggaraan Pendidikan <p>04.04 Pemilihan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemilihan umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu b. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Wakil Rakyat c. Evaluasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden d. Laporan Hasil Perkembangan Politik di Daerah e. Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL <p>05 Ketahanan Ekonomi</p> <p>05.01 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ketahanan Sumberdaya alam dan Kesenjangan perekonomian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Ketahanan di Bidang Sumberdaya Alam, meliputi Sosialisasi dan Publikasi Best Practise dan Inovasi b. Penanganan Kesenjangan Perekonomian <p>05.02 Ketahan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ketahan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Identifikasi Ketahanan di Bidang Perdagangan, Investasi Fiskal dan moneter b. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Monitoring dan Evaluasi <p>05.03 Perilaku Perekonomian Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perilaku Perekonomian Masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian b. Evaluasi Cinta Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen <p>05.04 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Penanganan Kejahatan Lembaga Perekonomian b. Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Lembaga Perekonomian

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
PG	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
01	<p>Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata Operasional dan Sarana prasarana Polisi Pamong Praja meliputi:</p> <p>01.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Operasional Polisi Pamong Praja 01.02 Standardisasi Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja meliputi Fasilitasi (Data Pengajuan DAK), Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan serta Monitoring dan Evaluasi</p> <p>02 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja meliputi:</p> <p>02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja. 02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja</p> <p>03 Perlindungan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan masyarakat meliputi Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat.</p> <p>04 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Sipil meliputi:</p> <p>04.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 04.02 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Administrasi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>05 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia meliputi:</p> <p>05.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Hak Asasi Manusia 05.02 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Konvensi Internasional</p>
OD	OTONOMI DAERAH
01	<p>Penyelenggaraan Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah meliputi fasilitasi, bimbingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari:</p> <p>01.01 Pelaksanaan urusan pemerintah daerah 01.02 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal</p> <p>02 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran</p> <p>03 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan antar Lembaga</p> <p>03.01 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 03.02 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 03.03 Penyiapan perumusan Kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang Pemerintahan 03.04 Hubungan antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04	03.05 Asosiasi Daerah Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan: 04.01 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 04.02 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 04.03 Pengembangan Kapasitas Daerah
BN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	
01	Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Daerah/per wilayah.
02	Pengembangan Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Wilayah meliputi: 02.01 Penyusunan Pedoman Penyerasian Pengembangan Wilayah 02.02 Penyusunan dan Pemutahiran Basis Data dan Informasi Pengembangan Wilayah 02.03 Penyusunan dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah 02.04 Kawasan Strategis dan Andalan meliputi Evaluasi Pengembangan Data dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan 02.05 Wilayah Tertinggal meliputi: a. Penyusunan Data dan Pemutakhiran Basis dan Data Informasi Pengembangan Wilayah b. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah Tertinggal 02.06 Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil meliputi: a. Penyusunan Masterplan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah Tertinggal b. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah Tertinggal c. Penyusunan dan Pemutahiran Basis Data dan Informasi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
03	Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup 03.01 Penataan Ruang Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Wilayah meliputi: a. Evaluasi Perencanaan, Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah b. Evaluasi Pelaksanaan Penyerasian dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah c. Implementasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 03.02 Penataan Ruang Kawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Kawasan meliputi: a. Evaluasi Tata Ruang Kawasan b. Pembinaan Tata Ruang Kawasan c. Implementasi 03.03 Konservasi dan Rehabilitasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Konservasi dan Rehabilitasi meliputi: a. Evaluasi Pelaksanaan Konservasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi c. Implementasi 03.04 Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Air b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Air c. Implementasi 03.05 Pengendalian Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengendalian Lingkungan Hidup meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Instrumen Kelembagaan Lingkungan Hidup b. Analisis dan Audit Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04 Pengembangan Ekonomi Daerah <ul style="list-style-type: none"> 04.01 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Naskah-naskah yang berkaitan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Produk Unggulan dan Analisis Potensi Ekonomi Daerah b. Pengembangan Produk Unggulan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah 04.02 Promosi dan Investasi Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Promosi dan Investasi Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Promosi Ekonomi Daerah b. Pelaksanaan Investasi Daerah 04.03 Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pengembangan Perdagangan Daerah b. Pelaksanaan Perindustrian Daerah 04.03 Kemitraan Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kemitraan Usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Ekonomi Daerah b. Pengelolaan Kemitraan Usaha Ekonomi Daerah 04.04 Kelembagaan Ekonomi daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kelembagaan Ekonomi Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah 05 Penataan Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> 05.01 Perencanaan Pengendalian Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan Perencanaan Pengendalian Perkotaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Perencanaan Perkotaan b. Pengendalian Penataan Perkotaan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>c. Fasilitasi</p> <p>05.02 Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota menengah, dan Kota Kecil meliputi:</p> <p>a. Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan b. Pengendalian Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan c. Fasilitasi</p> <p>05.03 Kerjasama Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kerjasama Perkotaan meliputi:</p> <p>a. Pengendalian Kerjasama Perkotaan Antar Negara b. Pengendalian Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan c. Fasilitasi</p>
PE	PEMERINTAHAN UMUM
01	<p>Dekonsentrasi dan Kerjasama</p> <p>01.01 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 01.02 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Buapti dan Wakil Bupati kepada OPD, Kecamatan dan 01.03 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah 01.04 Fasilitasi Kecamatan, meliputi:</p> <p>a. Fasilitasi Database Pembentukan Kecamatan b. Koordinasi c. Pembinaan dan Pengawasan d. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan</p> <p>01.05 Fasilitasi Pelayanan Umum meliputi:</p> <p>a. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan b. Koordinasi Pelayanan Administrasi Kecamatan c. Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Kecamatan d. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>02 Wilayah Administrasi dan Perbatasan</p> <p>02.01 Toponimi dan Data Wilayah meliputi:</p> <p>a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Toponimi b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami dan Unsur c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Perubahan Nama Rupa Bumi Unsur Alami dan Unsur d. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pindahan Ibukota Daerah dan Pindahan e. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan f. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Penghitungan Luas Wilayah</p> <p>02.02 Batas Antar Daerah Wilayah meliputi:</p> <p>a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Penetapan Batas Antar Daerah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	<p>b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah</p> <p>Kawasan dan Pertanahan</p> <p>03.01 Kawasan Sumber Daya Alam Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kawasan Sumberdaya Alam meliputi Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta</p> <p>03.02 Kawasan Sumber Daya Buatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kawasan Sumberdaya buatan meliputi Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta</p> <p>03.03 Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kawasan ekoknomi, industri dan perdagangan bebas meliputi Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pada Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas</p> <p>03.04 Pertanahan dan Kawasan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pertanahan dan kawasan khusus meliputi Penyelenggaraan urusan pertanahan, Penyelesaian sengketa</p>
HM	HUBUNGAN MASYARAKAT
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	<p>Keprotokoleran</p> <p>Dokumentasi/Liputan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara dinas dalam berbagai media.</p> <p>Pengumpulan Pengolahan Penyajian Informasi Kelembagaan</p> <p>Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah Naskah-naskah yang berhubungan dengan Hubungan Antar Bangsa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Forkompimda b. Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional c. Instansi Vertikal d. Organisasi Kemasyarakatan e. Perguruan Tinggi/Sekolah f. Partai Politik g. Swasta h. Bakohumas i. Media masa <p>Dengar Pendapat/Hearing</p> <p>Bahan/Materi Pidato/Sidang DPRD/Muspida</p> <p>Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, Jurnal</p> <p>Publikasi Melalui Media Cetak maupun Elektronik</p> <p>Pameran/Lomba/Festival</p> <p>Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan</p> <p>Ucapan Terimakasih, Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan maaf</p> <p>Dokumen Hosting</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
SD	URUSAN PERSANDIAN
01	Pembinaan dan Pengendalian Persandian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Dan Pengendalian Persandian meliputi: 01.01 SDM (Sumber Daya Manusia) a. Data Personil Sandi b. Pembinaan Personil Sandi c. Pengawasan dan Pengendalian 01.02 Materil dan Jaring Komunikasi Sandi a. Data Materil dan JKS b. Analisa Kebutuhan Materil dan Jaringan Komunikasi Sandi 01.03 Akreditasi dan Sertifikasi a. Akreditasi Diklat b. Sertifikasi Alat 02 Pengamanan Persandian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengamanan Persandian meliputi: 02.01 Pengamanan Sinyal : Teknik Sandi dan Kripto a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) b. Pelaporan 02.02 Analisis Sinyal : Teknik Sandi dan Kripto a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) b. Pelaporan 02.03 Materil Sandi : Sistem dan Peralatan a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) b. Pelaporan 03 Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, dan Komunikasi Sandi meliputi: 03.01 Perencanaan Pengkajian 03.02 Administrasi Pengkajian 03.03 Administrasi Pengkajian 03.04 Pelaporan
HK	URUSAN HUKUM
01	Program Legislasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Legalisasi meliputi materi/bahan/program legislasi Pemerintah Kabupaten 01.01 Perencanaan Program Legislasi daerah 01.02 Evaluasi Program Legislasi

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
02	Peraturan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah meliputi Naskah Akademik, Rancangan awal sampai dengan Rancangan akhir dan Telaah Hukum.
03	Peraturan Bupati Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Bupati mulai dari Rancangan awal sampai dengan Rancangan akhir dan Telaah Hukum
04	Keputusan/Ketetapan Bupati Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keputusan/Ketetapan Bupati mulai dari Rancangan awal sampai dengan Rancangan akhir dan Telaah Hukum.
05	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten mulai dari Rancangan awal sampai dengan Rancangan akhir dan Telaah
06	Intruksi/Surat Edaran 06.01 Intruksi/Surat Edaran Bupati 06.02 Intruksi/Surat Edaran Sekretaris Daerah
07	Surat Perintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perintah meliputi: 07.01 Surat Perintah Bupati 07.02 Surat Perintah Sekretaris Daerah 07.03 Surat Perintah setingkat Eselon II dan III Daerah
08	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis termasuk Rancangan.
09	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama meliputi dalam dan luar
10	Dokumentasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat
11	Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Maskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/Penyuluhan Hukum meliputi: 11.01 Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum 11.02 Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan hukum
12	Kasus/Sengketa Hukum 12.01 Pidana Berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus/sengketa pidana baik Kejahatan maupun Pelanggaran meliputi: a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai denga vonis. b. Bekas pembelaan dan bantuan hukum c. Telaah hukum dan opini hukum 12.02 Perdata Berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus/sengketa perdata meliputi: a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai denga vonis. b. Bekas pembelaan dan bantuan hukum

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>c. Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>12.03 Tata Usaha Negara Berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus/sengketa tata usaha negara meliputi: a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan vonis. b. Bekas pembelaan dan bantuan hukum c. Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>12.04 Perburuhan Berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus/sengketa perburuhan meliputi: a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan vonis. b. Bekas pembelaan dan bantuan hukum c. Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>12.05 Arbitrase Berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus/sengketa arbitrase meliputi: a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan keputusan arbitrase/Ketetapan Hakim. b. Bekas pembelaan dan bantuan hukum c. Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>12.06 Sengketa adat</p> <p>13 Perijinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perijinan meliputi: 13.01 Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin. 13.02 Permohonan ijin yang ditolak 13.03 Buku Induk Perijinan</p> <p>14 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi: 14.01 Hak cipta 14.02 Hak Paten biasa dan Hak Paten Sederhana 14.03 Hak Desain Industri 14.04 Hak Rahasia Dagang 14.05 Hak Merk 14.06 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS)</p> <p>15 Permohonan HKI yang ditolak Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan HKI yang ditolak (Hak cipta, paten, desain industri, merk, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit)</p>
TU	KETATAUSAHAAN
01	<p>Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Persuratan meliputi: 01.01 Pengurusan Surat Masuk</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
01.02 Pengurusan Surat Keluar 01.03 Korespondensi Internal 02 Pengadaan Surat Masuk 03 Agenda Kegiatan 04 Rapat/Rakor/Rakernis	
OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
01 02 03 04 05 06 07 08 09	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah meliputi pembentukan, perubahan, dan pembubaran. Uraian Jabatan dan Tata Kerja Analisis Jabatan dan Penilaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja termasuk penilaian dan standar kompetensi jabatan struktural Hubungan/Mekanisme Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Telaah tata hubungan, penyusunan, dan bimbingan. Ketatalaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata naskah dinas, stempel, papan nama instansi, termasuk Organisasi yang Tata Laksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan tata laksana yang meliputi Prosedur tetap dan mekanisme kerja. Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum termasuk Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan. Peningkatan Struktur/Kinerja Perangkat Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan kapabilitas struktur perangkat daerah, peningkatan dan pembinaan kinerja perangkat daerah. Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi struktur organisasi, evaluasi tugas pokok dan fungsi, evaluasi uraian jabatan, dan uraian tata laksana.
PL	PERLENGKAPAN
01 02 03 04	Analisa Kebutuhan Tata Ruang Daftar Perkenalan Mampu Penerimaan/Realisasi Pengadaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan/Realisasi Pengadaan meliputi: 04.01 Alat Tulis Kantor 04.02 Perlengkapan Kantor 04.03 Tanah dan Bangunan 04.04 Kendaraan 04.05 Instalasi/Jaringan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04.06 05 06 07 08 09	Peralatan Kearsipan Penyimpanan/Pergudangan Distribusi Pemeliharaan Inventarisasi Penghapusan
RT	KERUMAHTANGGAAN
01 02 03 04 05	<p>Perjalanan Dinas Pimpinan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas Pimpinan meliputi:</p> <p>01.01 Dalam Negeri</p> <p>01.02 Luar Negeri</p> <p>Rapat Pimpinan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat Pimpinan meliputi:</p> <p>02.01 Sarana dan Prasarana</p> <p>02.02 Jamuan Rapat</p> <p>Kantor</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan KANTOR meliputi:</p> <p>03.01 Pemeliharaan Gedung</p> <p>03.02 Perlengkapan Kantor</p> <p>03.03 Air, Listrik dan Telekomunikasi</p> <p>03.04 Keamanan Kantor</p> <p>03.05 Kebersihan Kantor</p> <p>03.06 Jamuan Tamu</p> <p>03.07 Halaman dan Taman</p> <p>Rumah Dinas</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rumah Dinas meliputi:</p> <p>04.01 Pemeliharaan Gedung</p> <p>04.02 Perlengkapan Rumah Dinas</p> <p>04.03 Air, Listrik dan Telekomunikasi</p> <p>04.04 Keamanan Rumah Dinas</p> <p>04.05 Kebersihan Rumah Dinas</p> <p>04.06 Jamuan Tamu</p> <p>04.07 Halaman dan Taman</p> <p>Fasilitas Pimpinan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitas Pimpinan meliputi:</p> <p>05.01 Kendaraan Dinas</p> <p>05.02 Pengawasan dan Pengamanan</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
UM	UMUM
01	Kekayaan Daerah
02	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sumber daya alam daerah, aset daerah, pemanfaatan dan pengamanan kekayaan daerah, penghapusan aset dan
03	Peralatan kantor
04	Naskah-naskah yang berkaitan dengan alat tulis, mesin kantor, perabot kantor, alat angkut/kendaraan dinas, senjata/alat pengaman kantor, pakaian
05	Pengadaan barang/jasa
06	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penunjukkan dan pemilihan langsung, seleksi, lelang.
07	Lambang
08	Naskah-naskah yang berkaitan dengan lambang garuda, lambang bendera kebangsaan, lambang daerah, dan lambang lainnya.
09	Tanda Kehormatan
10	Naskah-naskah yang berkaitan dengan monumen, penghargaan secara adat.
01	Hari Raya/Besar
02	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hari Raya Nasional (17 Agustus, HUT, Pahlawan, dll), Hari Raya Keagamaan, Hari-hari besar Internasional, dan Hari-hari besar lainnya.
03	Ucapan
04	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ucapan terima kasih, Ucapan selamat, Ucapan belasungkawa, dan Ucapan-ucapan lainnya
05	Undangan
06	Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan yang bersifat umum.
07	Tanda Jabatan
08	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanda Pengenal seperti Pamong Praja, Pejabat lainnya.
09	Protokol
10	Naskah-naskah yang berkaitan dengan keprotokoleran seperti upacara bendera, tata tempat, audiensi menghadap pimpinan, alamat-alamat kantor dan
RC	URUSAN PERENCANAAN
01	Usulan Perencanaan
02	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Perencanaan meliputi:
03	01.01 Aspirasi DPRD
04	01.02 Usulan Langsung Masyarakat On Line dan Manual
05	01.03 Usulan Perangkat Daerah
06	01.04 Usulan Unit Kerja Dalam Perangkat Daerah
07	02 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
08	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) meliputi:
09	02.01 Musrenbang RPJP/RPJM
10	02.02 Musrenbang RKPD
11	02.03 Forum Perangkat Daerah
12	03 Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
13	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan meliputi:

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03.01 03.02 03.03 04	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan meliputi: 04.01 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 04.02 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) 04.03 Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah 04.04 Penetapan Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah
04.05 05	Penetapan Kinerja Pejabat Esselon 3 dan Esselon 4 Rencana Kerja Wilayah Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Wilayah Strategis meliputi: 05.01 Pusat Pertumbuhan Nasional dan Regional 05.02 Metro Politan Bandung dan Bodebekkapur 05.03 Pembangunan Bagian Wilayah 05.04 Pembangunan Tematik 05.05 Pembangunan Sektoral
06	Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat meliputi: 06.01 Kajian Rencana Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat 06.02 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat 06.03 Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat
07	Indikator Keberhasilan Pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Indikator Keberhasilan Pembangunan meliputi: 07.01 Kajian Penetapan Indikator Keberhasilan Pembangunan 07.02 Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan Pembangunan
08	Kerjasama Perencanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kerjasama Perencanaan meliputi: 08.01 Kegiatan Komite Perencanaan 08.02 Rekomendasi Komite Perencanaan 08.03 Kerjasama Perencanaan Dengan Perguruan Tinggi 08.04 Kerjasama Perencanaan Dengan Pemerintah Daerah 08.05 Kerjasama Perencanaan Dengan Luar Negeri
09	Pejabat Fungsional Perencanaan (Perencana) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pejabat Fungsional Perencanaan (Perencana) 09.01 Kajian Pengembangan Perencana 09.02 Pembinaan Perencana

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
10 11 12 13 14 15	<p>Laporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan meliputi: 10.01 Laporan Berkala (Laporan Triwulan dan Semesteran) 10.02 Laporan Tahunan Esselon 3 10.03 Laporan Tahunan Perangkat Daerah 10.04 Laporan Khusus 10.05 Progress Report 10.06 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</p> <p>Evaluasi Program/Kegiatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Program/Kegiatan meliputi: 11.01 Unit Kerja 11.02 Lembaga / Instansi</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan</p> <p>Konsultasi Perencanaan Pembangunan</p> <p>Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan</p> <p>Perencanaan Pendanaan Pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Pendanaan Pembangunan meliputi: 15.01 Pendanaan Luar Negeri dan Hibah 15.02 Pendanaan Dalam Negeri 15.03 Kerjasama Pembangunan Internasional 15.04 Surat Berharga sariah Negera 15.05 Pendanaan On Top dan Atau Inisiatif Baru 15.06 Corporate Social Responcibility (CSR)</p>
PP	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
01 02 03	<p>Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi meliputi: 01.01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi 01.02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi</p> <p>Pengembangan Dunia Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Dunia Usaha meliputi: 02.01 Koordinasi DBHCT 02.02 Koordinasi CSR Kabupaten Tasikmalaya 02.03 Sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif 02.04 Penyusunan Master Plan pengembangan wisata dan ekonomi kkkreatif</p> <p>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah meliputi:</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03.01 Kegiatan penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya 03.02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya 03.03 Koordinasi dan Evaluasi Kawasan Perdesaan 03.04 Koordinasi dan Evaluasi Bidang Sospem 03.05 Sinkronisasi Rancangan RPJMDes dengan RPJMD 04 Sosial dan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosial dan Budaya meliputi: 04.01 Perencanaan dan Evaluasi SPM pelayanan dasar bidang Sosbud 04.02 Perencanaan penganggaran Responsive Gender 04.03 Kabupaten Sehat 04.04 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 05 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan meliputi: 05.01 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Antar Pemerintah Daerah 05.02 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dengan Perguruan Tinggi 05.03 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dengan Swasta dan Masyarakat 06 Hasil Penelitian dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil Penelitian dan Pengembangan meliputi: 06.01 Data Base Hasil Penelitian dan Pengembangan 06.02 Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 06.03 Penerbitan Jurnal	
PW	URUSAN PENGAWASAN
01 Rencana Kegiatan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kegiatan Pengawasan meliputi: 01.01 Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan 01.02 Rencana Kegiatan Pengawasan Khusus 01.03 Rencana Strategis Pengawasan 01.04 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan 01.05 Rakor Pengawasan tingkat nasional 02 Pengawasan Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Tahunan meliputi: 02.01 Kegiatan Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan 02.02 Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan 02.03 Tindak Lanjut Hasil Audit	

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
03	Pengawasan Khusus
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Khusus meliputi:
	03.01 Kegiatan Audit Khusus
	03.02 Laporan Hasil Audit Khusus
	03.03 Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus
04	Pengaduan Masyarakat
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengaduan Masyarakat meliputi:
	04.01 Pusat Pengaduan Masyarakat
	04.02 Penanganan/Tindak Lanjut Atas Pengaduan Masyarakat
	04.03 Evaluasi Penanganan/Tindak Lanjut
05	Pengawasan Melekat
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Melekat meliputi:
	05.01 Sosialisasi
	05.02 Kegiatan Pengawasan Melekat
	05.03 Evaluasi Kegiatan Pengawasan Melekat
06	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan meliputi:
	06.01 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program
	06.02 Pemantauna Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)
	06.03 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
07	Sumber Daya Manusia Pengawaans (Auditor)
	07.01 Pengembangan Sumber daya Manusia Pengawasan
	07.02 Pembinaan Auditor
08	Pengembangan Akuntabilitas Publik
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Akuntabilitas Publik meliputi:
	08.01 Desk Akuntabilitas
	08.02 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
	08.03 Pemantauan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
	08.04 Evakuasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
09	Pelaksanaan Pengawasan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan meliputi:
	09.01 Laporan Hasil Audit mencakup di dalamnya:
	a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL).
	b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut.

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<p>c. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL).</p> <p>d. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut.</p> <p>09.02 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat</p> <p>09.03 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan</p> <p>09.04 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara</p> <p>09.05 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah</p> <p>09.06 Good Corporate Governance (GCG), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).</p>
AT	URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p>	<p>Ketertiban</p> <p>Naskah- naskah yang berkaitan dengan Ketertiban meliputi:</p> <p>01.01 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mencakup di dalamnya Pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta Penyelidikan juga penyidikan.</p> <p>01.02 Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mencakup di dalamnya Operasi dan pengendalian juga kerjasama</p> <p>01.03 Sumber daya aparatur keamanan dan ketertiban yang mencakup di dalamnya Pelatihan dasar dan teknis.</p> <p>Keamanan</p> <p>Naskah- naskah yang berkaitan dengan Keamanan meliputi:</p> <p>02.01 Kepolisian yang mencakup di dalamnya polisi, polisi pamong praja, polisi hutan, polisi khusus, polisi wisata.</p> <p>02.02 Huru hara/demonstrasi</p> <p>02.03 Senjata tajam/tajam</p> <p>02.04 Bahan peledak</p> <p>02.05 Perjudian</p> <p>02.06 Surat-surat kaleng</p> <p>02.07 Pengaduan</p> <p>02.08 Terorisme</p> <p>02.09 Hibauan/larangan tentang keamanan dan ketertiban</p> <p>Kejahatan</p> <p>Naskah- naskah yang berkaitan dengan Kejahatan meliputi:</p> <p>03.01 Makar/pemberontak</p> <p>03.02 Pembunuhan</p> <p>03.03 Penganiayaan/pencurian yang mencakup di dalamnya bunuh diri dan keracunan</p> <p>03.04 Subversi/penyelendupan/narkotika</p> <p>03.05 Pemalsuan</p> <p>03.06 Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan/KKN</p> <p>03.07 Pemerksaan/pelecehan seksual</p> <p>03.08 Kejahatan lainnya</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
DC	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
01	<p>Pendaftaran Penduduk</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk meliputi:</p> <p>01.01 Identitas Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (arsip digital) b. Penyiapan Pemberian Nomor Kendali Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk c. Fasilitasi Pencetakan dan Distribusi Blangko Dokumen Kependudukan <p>01.02 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia b. Fasilitasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk Orang Asing c. Fasilitasi Pelaksanaan Perubahan Alamat <p>01.03 Pindah Datang Penduduk Antar Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelaksanaan Pendaftaran Perpindahan Penduduk Indonesia Keluar Negeri dan Warga Negara Indonesia dan Luar Negeri b. Fasilitasi Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas <p>01.04 Pendataan Penduduk Rentan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Penduduk Korban Bencana b. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang c. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Orang Terlantar d. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan <p>01.05 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring Pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk b. Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk c. Pelaksanaan Dokumentasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk <p>02 Pencatatan Sipil</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil meliputi:</p> <p>02.01 Kelahiran dan Kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran b. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kematian c. Fasilitasi Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran dan Kematian d. Pelaksanaan Hubungan antar Lembaga dalam Rangka Pencatatan Kelahiran dan Kematian <p>02.02 Perkawinan dan Perceraian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Agama Islam b. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam c. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian d. Pelaksanaan Hubungan antar Lembaga dalam Rangka Pencatatan Perkawinan dan Perceraian <p>02.03 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubabahan dan Pembatalan Akta</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Perubahan dan Pembatalan Akta

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan dan Pembatalan Akta c. Pelaksanaan Hubungan antar Lembaga dalam Rangka Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta <p>02.04 Pencatatan Kewarganegaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Kelahiran b. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Pewarganegaraan Akibat non Kelahiran c. Pelaksanaan Pelayanan Pewarganegaraan Kelahiran dan non Kelahiran d. Pelaksanaan Pelayanan antar Lembaga dalam Rangka Pengangkatan Pelayanan Pencatatan Pewarganegaraan <p>02.05 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Program dan Kegiatan Direktorat Pencatatan Sipil b. Monitoring Pelaksanaan Program Pencatatan Sipil c. Evaluasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil d. Pelaksanaan Dokumentasi Kebijakan Pencatatan Sipil
03	<p>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi:</p> <p>03.01 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan b. Pengembangan Aplikasi c. Pengembangan Pemanfaatan Infrastruktur <p>03.02 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem Kelembagaan b. Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kelembagaan Informasi Kependudukan <p>03.03 Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan b. Pemeliharaan Database Administrasi Kependudukan c. Pengembangan Database Administrasi Kependudukan d. Pelayanan Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan <p>03.04 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan b. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Melalui Media Elektronik c. Pelaksanaan Layanan Informasi Melalui Media Cetak <p>03.05 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Materi Wawasan Kependudukan Melalui Jalur Sekolah dan melalui Jalur Luar Sekolah b. Kebijakan Kependudukan dan Pengembangan Wawasan Kependudukan c. Pelaksanaan Hubungan antar Lembaga dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kependudukan d. Pelaksanaan Dokumentasi Pelayanan Informasi Kependudukan <p>04 Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Kebijakan Kependudukan meliputi:</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
04.01	Kuantitas Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Penyusunan Analisis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk b. Pelaksanaan Analisis Pertumbuhan Penduduk c. Kebijakan Kuantitas Penduduk
04.02	Kualitas Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Penduduk Usia Anak, Remaja dan Pemuda b. Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia c. Pelaksanaan Hubungan antar Lembaga dalam Rangka Kebijakan Kualitas Penduduk
04.03	Mobilitas Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Penataan Persebaran Penduduk antar Wilayah b. Pelaksanaan Penataan Urbanisasi dan Migrasi non Permanen c. Kebijakan Mobilitas Penduduk
04.04	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk b. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pemberdayaan Penduduk c. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
04.05	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Materi Wawasan Kependudukan Melalui Jalur Sekolah dan melalui Jalur Luar Sekolah b. Pengembangan Wawasan Kependudukan c. Pelaksanaan Hubungan antar Lembaga dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kependudukan
05	Penyerasian Kependudukan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyerasian Kependudukan meliputi:
05.01	Indikator Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Analisis Indikator Kependudukan b. Penyusunan Indikator Statis Kependudukan c. Pelaksanaan Penerapan Pengembangan Indikator Kependudukan d. Penyusunan dan Penetapan Indikator Kependudukan
05.02	Proyeksi Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Analisis Proyeksi Penduduk b. Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Penduduk c. Pelaksanaan Perumusan Implikasi Proyeksi Penduduk d. Penyusunan Penetapan dan Perumusan Implikasi Proyeksi Penduduk
05.03	Perencanaan Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Perencanaan Kependudukan b. Pelaksanaan Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan c. Pelaksanaan Penyiapan Perencanaan Kependudukan d. Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Kependudukan

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	05.04 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah a. Penyelesaian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Internasional b. Penyelesaian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Masyarakat dan Nirlaba c. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Usaha Swasta d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga non Pemerintah 05.05 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah


BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

NO	JENIS/SERIES ARSIP
1	2
	05.04 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Internasional b. Penyelesaian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Masyarakat dan Nirlaba c. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Usaha Swasta d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga non Pemerintah 05.05 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO